

ISSN 2086-4515

**JURNAL
EKONOMI
&
BISNIS**

Volume 8, Nomor 1, Juli 2017

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PORT NUMBAY

Jl. BERINGIN ENTROP JAYAPURA - PAPUA

(0967) 531127 - 551787 FAX. (0967) 551787

EKONOMI & BISNIS

Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Bisnis

Terbit dua kali setahun, Januari – Juli, berisi artikel analisis sosial, ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Memuat artikel berupa analisis, kajian dan aplikasi teori, hasil penelitian dan kajian pustaka.

PELINDUNG/PENASEHAT

Ketua STIE Port Numbay

PENGARAH

Melmambessy Moses

Muhamad Syafii

Ruslan Ramli

Hengki Athabu

PIMPINAN REDAKSI

Victor F. Pasalbessy

EDITOR NASKAH

Wa Ariadi

Dani Melmambessy

Anita Latuheru

PUBLIKASI/PEMASARAN

Fachri Baasalem

Yuniar Sri Hartati

JURNAL EKONOMI & BISNIS diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura, Jln. Beringin II Entrop Jayapura

Alamat Redaksi: Ruang LP2M Gedung Sekretriats Kampus STIE Port Numbay Lantai I, Jalan Beringin II Entrop Jayapura, Telepon (0967) 531127, Fax (0967) 551787

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum diterbitkan dalam media cetak lain. Naskah diketik dalam spasi ganda pada kertas ukuran folio, 10 – 20 halaman 1 eksemplar. (baca petunjuk bagi penulis pada sampul dalam bagian belakang). Naskah yang masuk akan dievaluasi oleh Staf Penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud dan isinya

PRAKATA

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 8, Nomor 1, Juli 2017 kini hadir sebagai sarana komunikasi ilmiah yang mengkaji berbagai fenomena-fenomena sosial berupa kajian-kajian teori, konsep sosial, hasil penelitian maupun aplikasi sosial.

Jurnal Ekonomi dan Bisnis adalah jurnal yang dibina dan diterbitkan oleh LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay, sebagai wahana ilmiah, dimaksudkan untuk menampung berbagai pikiran-pikiran kritis ilmiah para akademisi baik di kalangan sendiri maupun kalangan luar yang berminat untuk memberikan sumbangan tulisan.

Akhirnya, catatan yang patut dinformasikan bagi peminat yang ingin menyumbangkan artikel, dihimbau agar berupaya mengikuti gaya selingkung Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

Penyunting

EKONOMI & BISNIS

Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Bisnis

- Prakata
- Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura (1 – 14)
La Ode Abdul Wahab
- Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura (15 – 23)
Abraham Rieuwpassa
- Analisis Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Toko Roti Ropan Wamena Kabupaten Jayawijaya (25 – 35)
Victor F. Pasalbessy
- Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Kotaraja Kota Jayapura (36 – 44)
Dani Melmambessy
- Analisis tingkat likuiditas dan profitabilitas terhadap Kinerja keuangan pada PT. Pos indonesia (persero) Kantor Pos Cabang Waena Kota Jayapura (45 – 54)
Elius Heluka
- Analisis Pengaruh Hutang Terhadap Profitabilitas Pada Hotel Grand Abe Di Jayapura (55 – 63)
Jemy Ricardo Parera
- Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Tenaga Kerja Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura (64 – 73)
Yuniar Sri Hartati
- Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Papua (74 – 84)
Verdi Payung Tappi
- Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Papua (86 – 90)
Melmambessy Moses / Wa Ariadi

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

LA ODE ABDUL WAHAB
Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang kinerja dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura pada tahun anggaran 2010-2014.

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura, diukur dari tingkat kemandirian daerah pada tahun anggaran 2010-2014 masuk dalam kriteria sangat kurang, dan tingkat ketergantungan daerah pada periode tersebut masuk dalam kriteria sangat tinggi dengan kriteria pola hubungan instruktif. Rasio desentralisasi fiskal masih sangat kurang, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010-2014 tergolong dalam katagori sangat efektif dengan rasio efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang sangat efisien. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura dalam hal ini tingkat kemandirian dan ketergantungan daerah serta tingkat desentralisasi fiskal dinilai baik jika pemerintah Kabupaten Jayapura sudah bisa menaikkan prosentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi di atas 40% terhadap dana perimbangan.

Kata kunci : *Kemampuan Keuangan Daerah, Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Efektivitas, Efisiensi*

LATAR BELAKANG MASALAH

Pertimbangan mendasar dari terselenggaranya Otonomi Daerah (otda) adalah ditinjau dari perkembangan kondisi didalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Menurut Halim (2001 : 2) "selain itu keadaan diluar negeri yang juga menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap Negara, termasuk daya saing Pemerintahan Daerahnya." Selanjutnya peningkatan kemandirian Pemerintahan Daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah. Tujuan program otonomi daerah menurut Bastian (2006 : 338) adalah Untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan cultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah ingin melaksanakan pasal 18 UUD 1945, yaitu dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Otonomi Daerah di Indonesia didasarkan pada undang-undang nomor 22 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi dan sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 januari 2001. Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan

sumber daya manusia (aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis. Adapun misi utama undang-undang nomor 33 tahun 2004 adalah bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan. Selanjutnya Bastian (2001 : 6) menyatakan bahwa "untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri." Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari Pemerintahan Daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan *Good Governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata cara pemerintahan yang baik dan bersih. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Menurut Sedarmayanti (2003 : 2) "perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran kapasitas parlemen, serta

tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas". Pada dasarnya terdapat tiga pilar utama didalam mewujudkan *good governance*, yaitu : Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Salah satu upaya nyata didalam penerapan prinsip-prinsip dasar *Good Governance* ini adalah didalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan daerah dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Karena sebagian besar otonomi daerah (tugas dan kewenangan mengatur daerah sendiri) diberikan kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota atas dasar pertimbangan budaya, politik (demokrasi), dan ekonomi lokal.

Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan Pemerintahan Pusat dan sumbangan lain-lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada Pemerintahan Pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas. Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain ini sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materiil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah UU No. 22 Tahun 1999 berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah UU No. 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang keuangan daerah serta diberikannya kekhususan tahun 2001 di Papua, merupakan sebagai tonggak baru pengelolaan keuangan daerah di Indonesia sebagai implementasi desentralisasi fiskal di Kabupaten Jayapura.

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk itu evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah.

Berdasarkan data APBD Kabupaten Jayapura selama 5 (lima) tahun anggaran, pada posisi pendapatan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah Kabupaten Jayapura terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2010-2014 kendati paket otonomi daerah telah digulirkan. Pada sisi belanja daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini merupakan dampak dari kewenangan

otonomi daerah, dimana pemerintah daerah secara aktif dan lebih leluasa melakukan pembiayaan dalam upaya pengembangan segala bentuk aktifitas program-program pembangunan di daerah.

Hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu analisis mengenai kemampuan keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. Dimana dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura mampu membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat di tahun-tahun berikutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2007:23), keuangan daerah dapat diartikan sebagai "semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku."

Menurut Halim (2004:20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari "keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)."

Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD." (Saragih, 3003:12)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 (sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005), tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan terhadap keuangan daerah setelah dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergertian dan Unsur-unsur APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang memuat tentang rencana penerimaan, rencana pengeluaran serta rencana pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran.

Menurut Bastian (2006:189), APBD merupakan "pengejawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik."

Menurut Saragih (2003:122), "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun."

Menurut Mamesah dalam Halim (2007:20), APBD dapat didefinisikan sebagai:

Rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Menurut Halim dan Nasir (2006 :44), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah "rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah."

Pada era Orde Lama, defenisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong (1962:81) dalam Halim (2004:15) adalah: Rencana pekerjaan keuangan (financieel werkplan) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (grondslog) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004:15-16) adalah sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci,
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan,
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,
- d. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun,

Struktur APBD

Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri 13/ 2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu:"pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah."

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. (Permendagri 13/ 2006). Sedangkan struktur APBD berdasarkan format Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 terdiri atas 3 bagian, yaitu:"pendapatan, belanja, dan pembiayaan."Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja digolongkan menjadi 4 yakni belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasi menjadi 3 kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi 3 yakni belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan yaitu:sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah:sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas:pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang. (Halim, 2004:18).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah daerah terhadap bantuan Pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar Pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6, "Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: a. Pajak Daerah, b. Retribusi daerah, c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah".

Menurut Mardiasmo (2002:132), "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah".

Menurut Halim (2004:67) "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah."

Definisi Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja (*Performance*) dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan.

Menurut Halim (2004 : 24) "kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah." Hadirnya otonomi daerah yang dimulai dengan hadirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentunya membawa konsekuensi terhadap pembiayaan daerah. Sebelum era otonomi daerah, hampir sebagian pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil Pemerintahan Pusat. Menurut Mardiasmo (2002 : 30) dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding dengan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kehadiran undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya adalah momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara penuh (desentralisasi fiskal). Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, sesuai azas otonomi daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai Reformasi Pembiayaan.

Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, karena perubahan ini tidak hanya perubahan paradigma, namun juga perubahan manajemen. Model manajemen yang cukup populer misalnya adalah *New Public Management* yang mulai dikenal tahun 1980-an dan populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa bentuk konsep "*managerialism*", "*market based public administrator*", dan lain sebagainya. Manajemen sektor publik berorientasi kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan yang membawa konsekuensi pada perubahan pendekatan anggaran yang selama ini dikenal dengan pendekatan anggaran tradisional (*tradisional budget*) menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance budget*), tuntutan melakukan efisiensi, optimalisasi pendapatan, pemangkas biaya (*cost cutting*) dan kompetisi tender (*compulsory competitive tendering contract*). Dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan tentang Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Dale A Henderson menuliskan didalam *Journal of Accounting* yang berjudul *Performance Measure for Non Profit Organization* bahwa terdapat indikator pengukuran kinerja organisasi non profit antara lain :

- a. *Customer focused*
- b. *Balance*
- c. *Timely*
- d. *Cost Effective*
- e. *Compatible and Comparable*

Didalam penilaian indikator kinerja sekurang-kurangnya ada empat tolok ukur penilaian kinerja keuangan pemerintahan daerah yaitu:

- a. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD.
- b. Efisiensi Biaya
- c. Efektifitas Program.
- d. Pemerataan dan keadilan.

Menurut Widodo dalam Halim (2002 : 126) terdapat beberapa analisa rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Dengan Formulasi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan APBD Tanpa Subsidi}}$$

c. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

d. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan

rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah rasio kemandirian. Menurut Halim (2002:128) gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui beberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya di samping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata di dalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan daerah.

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola yang memperkenalkan "hubungan situasional" yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah" (Halim, 2002:168-169), Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2001) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
- Pola hubungan Konsultatif campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- Pola hubungan partisipatif peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Pola hubungan delegatif campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang

berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian suatu daerah.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian tempat penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Jenis dan Sumber Data

Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Umar (2003:42) data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau data oleh pihak lain. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan, laporan dari beberapa instansi terkait yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jayapura yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara *Logging data*, yaitu saat pengumpulan data. Pada tahapan terakhir ini proses mengumpulkan data penelitian yang diperlukan, maka menggunakan teknik pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara (interview)

Teknik ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal dan terstruktur guna menggali pandangan dan informasi dari obyek yang diteliti dari informan tersebut. Informan pada penelitian ini adalah Staff Bagian Akuntansi dan bendahara pengeluaran BPKAD Kabupaten Jayapura.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengcopy dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang diperlukan antara lain : Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Jayapura dan Laporan perincian PAD Kabupaten Jayapura tahun 2010-2014, dari SKPD Dispenda kabupaten Jayapura.

Teknik Analisis Data

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kemampuan keuangan daerah. Rumus yang digunakan dalam mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi menurut Halim (2001:127) adalah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada

masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel berikut ini:

Tabel 1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM , 1991

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010 : 142):

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan APBD Tanpa Subsidi}}$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel berikut ini:

Tabel 2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM , 1991

Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan rasio desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut :

Tabel 3 Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM , 1991

Rasio Efektifitas PAD

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}}$$

Tabel 4 Kriteria Penilaian Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Tingkat Efektivitas
Di atas 100 %	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996

Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efektif apabila nilai

prosentasinya besar. Semakin besar rasio efektifitas berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel 5 Kriteria Penilaian Efisien

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Tingkat Efisiensi
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM , 1991

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh, maka tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6
 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura
 Tahun 2010-2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Keterangan	Pola Hubungan
2010	28.812.145.760	501.433.089.663	5,75	Sangat Kurang	Instruktif
2011	24.319.641.889	517.659.850.489	4,70	Sangat Kurang	Instruktif
2012	32.544.334.958	598.279.667.656	5,44	Sangat Kurang	Instruktif
2013	47.003.680.309	636.419.891.977	7,39	Sangat Kurang	Instruktif
2014	81.007.745.806	708.726.243.361	11,43	Kurang	Instruktif
Rata-Rata			6,94		

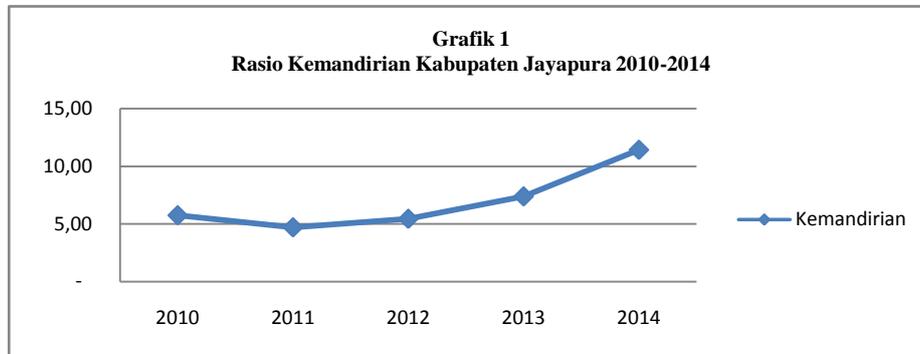
Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan pada Tabel 4.1 di atas, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jayapura selama periode tahun anggaran 2010-2014 adalah sebesar 6,94%, sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah adalah Kabupaten Jayapura dengan tingkat kemandirian keuangan daerah sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayapura selama periode tahun anggaran 2010-2014 memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan, dan jika dihubungkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Kabupaten Jayapura masuk dalam kategori pola hubungan

instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah menunjukkan bahwa pada sumber penerimaan daerah masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih relatif kurangnya PAD yang dapat digali oleh pemerintah daerah, sedangkan untuk pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam pemungutan berdasarkan undang-undang/persyaratan pemerintah dan daerah hanya menjalankan serta menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari : bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU, DAK dan bantuan propinsi.

Inisiatif, kreatifitas dan kemauan daerah sangat diperlukan dalam meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari jalan yang dapat memungkinkan mengatasi kekurangan pembiayaannya, hal ini memerlukan kreatifitas dari

aparatus pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan dalam program peningkatan PAD. Berikut grafik perkembangan rasio kemandirian Kabupaten Jayapura Tahun 2010 – 2014:



Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa walaupun tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jayapura relative rendah, akan tetapi dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan yang selalu naik. Hal ini menggambarkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura sejak tahun 2010 hingga 2014 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 19,88%, sedangkan penerimaan Dana Perimbangan rata-rata sebesar 8,20% tiap tahunnya. Ini juga menunjukkan bahwa, pemerintah Kabupaten Jayapura telah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, dengan tujuan agar mampu mewujudkan kemandirian daerah yang lebih bagus. Berdasarkan grafik di atas juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 nilai rasio kemandirian mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun

tersebut tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Jayapura cukup tinggi, ini dikarenakan terjadinya turunnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 18,47% sedangkan pada pos dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar 3,13%.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Dari hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh data ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jayapura tahun 2010-2014 sebagai berikut:

Tabel 7
 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura
 Tahun 2010-2014

Tahun	Dana Perimbangan	Total Penerimaan Daerah	Rasio Ketergantungan	Keterangan	Pola Hubungan
2010	501,433,089,663	669,100,670,982	74.94	Sangat Tinggi	Instruktif
2011	517,659,850,489	709,148,045,861	73.00	Sangat Tinggi	Instruktif
2012	598,279,667,656	751,825,620,630	79.58	Sangat Tinggi	Instruktif
2013	636,419,891,977	868,437,011,822	73.28	Sangat Tinggi	Instruktif
2014	708,726,243,361	1,004,538,507,482	70.55	Sangat Tinggi	Instruktif
Rata-Rata			74.27		

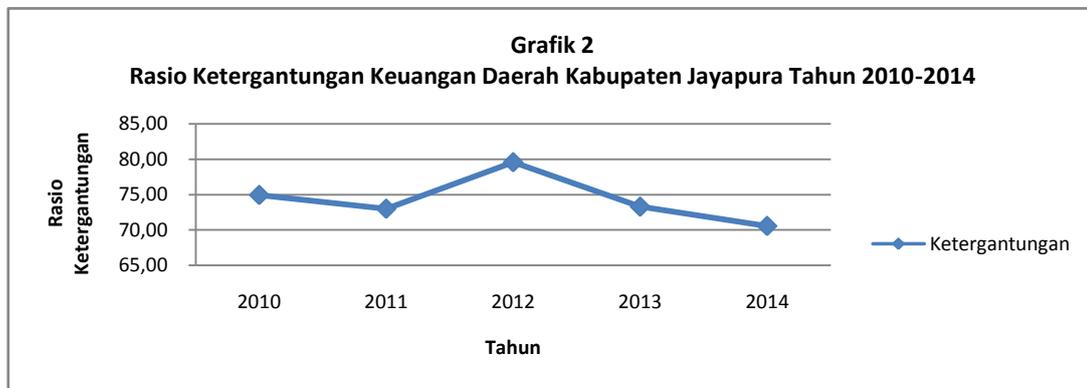
Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah pada Tabel 4.2 di atas, rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jayapura selama periode tahun anggaran 2010-2014 adalah sebesar 74,27%, sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah

adalah sangat tinggi. Terlebih lagi pada tahun 2012, rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jayapura mencapai 79,58%, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 80.619.817.167 atau sebesar 13% dari tahun sebelumnya. Hal ini juga

menggambarkan bahwa pada tahun tersebut ketergantungan pemerintah Kabupaten Jayapura terhadap bantuan pemerintah pusat dalam hal ini dana perimbangan, sangat tinggi. Berikut grafik

perkembangan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jayapura periode 2010 sampai dengan 2014.



Grafik di atas menggambarkan rasio kemandirian ketergantungan keuangan daerah kabupaten Jayapura pada tahun 2012 sangat tinggi dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya, ini dikarenakan pada tahun tersebut dana perimbangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 13% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jayapura pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 turun sebesar 9% dan pada tahun 2014 turun sebesar 4% dari tahun sebelumnya. Ini dikarenakan pada tahun-tahun tersebut penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2013 naik sebesar 31% dan pada tahun 2014 naik sebesar 42% dari tahun sebelumnya. Dengan kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah inilah yang menyebabkan menurunnya tingkat ketergantungan keuangan Daerah Kabupaten Jayapura pada tahun 2013 dan tahun 2014, karena dengan naiknya penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka akan mempengaruhi tingginya total penerimaan daerah, sehingga dengan sendirinya akan mengurangi tingginya kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.

Besarnya derajat ketergantungan keuangan daerah yang tinggi terhadap pusat dalam jangka panjang akan mengakibatkan pemerintah pusat mengalami finansial distress (tekanan berat keuangan) karena kesulitan menanggung beban keuangan daerah. Salah satu penyebab kondisi itu adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan belanja daerah khususnya belanja pegawai selalu mengalami kenaikan yang cukup besar.

Ditinjau dari segi pola hubungan antar pusat dan daerah, maka ketergantungan keuangan daerah

Kabupaten Jayapura selama 5 tahun terakhir masuk dalam kategori pola hubungan instruktif, dimana pemerintah daerah Kabupaten Jayapura memiliki ketergantungan yang tergolong sangat tinggi pada dana transfer dari pusat, atau dengan kata lain peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

Rasio Desentralisasi Fiskal juga merupakan rasio untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) di kali 100% (seratus persen).

Secara umum, semakin tinggi Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti semakin tinggi tingkat Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dan sebaliknya, semakin rendah Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti semakin rendah Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan penulis, diperoleh besarnya rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Jayapura tahun 2010-2014 sebagai berikut:

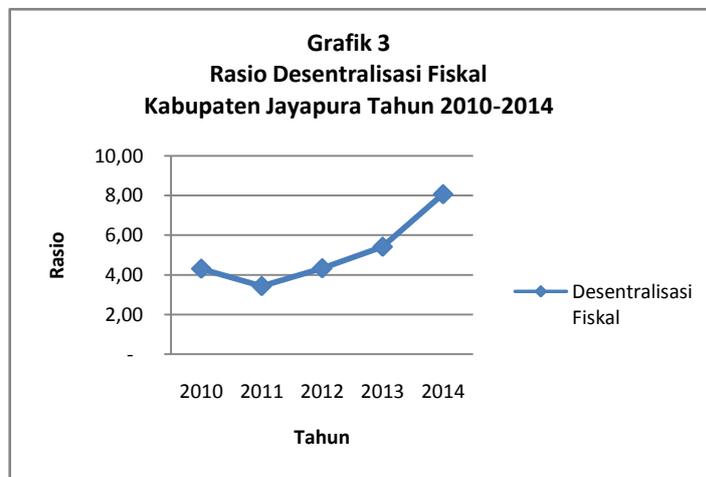
Tabel 8
 Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Jayapura
 Tahun 2010-2014

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Penerimaan Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal	Kriteria
2010	28,812,145,760	669,100,670,982	4.31	Sangat Kurang
2011	24,319,641,889	709,148,045,861	3.43	Sangat Kurang
2012	32,544,334,958	751,825,620,630	4.33	Sangat Kurang
2013	47,003,680,309	868,437,011,822	5.41	Sangat Kurang
2014	81,007,745,806	1,004,538,507,482	8.06	Sangat Kurang
Rata-Rata			5.11	

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Dari hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan otonomi daerah selama tahun 2010-

2014 dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang karena hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 5,11% dari total pendapatan daerah.



Grafik ini menunjukkan bahwa lima tahun terakhir kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya hampir sama untuk setiap tahunnya, dengan kontribusi yang sangat minim. Minimnya PAD yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura karena kurang maksimalnya pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dalam hal pemungutan pajak dan retribusi yang belum optimal dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya masih kurang. Selain itu juga kurangnya pembekalan kepada personil penagihan yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan penagihan langsung. Namun demikian, sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Jayapura cenderung mengalami kenaikan, karena pada tahun-tahun tersebut pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2010-2011, rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Jayapura mengalami penurunan 25,56% dari rasio tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011, total penerimaan PAD Kabupaten

Jayapura mengalami penurunan sebesar Rp. 4.492.503.871 atau 18,47% dari total penerimaan PAD tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Jayapura mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp. 678.901.143 (17%) dan Rp. 557.421.749 (7%) dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, nilai-nilai sangat mempengaruhi besarnya total penerimaan PAD Kabupaten Jayapura pada tahun 2011.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. Adapun hasil perhitungan tingkat efektifitas pendapatan asli daerah, dapat dilihat pada table berikut ini:

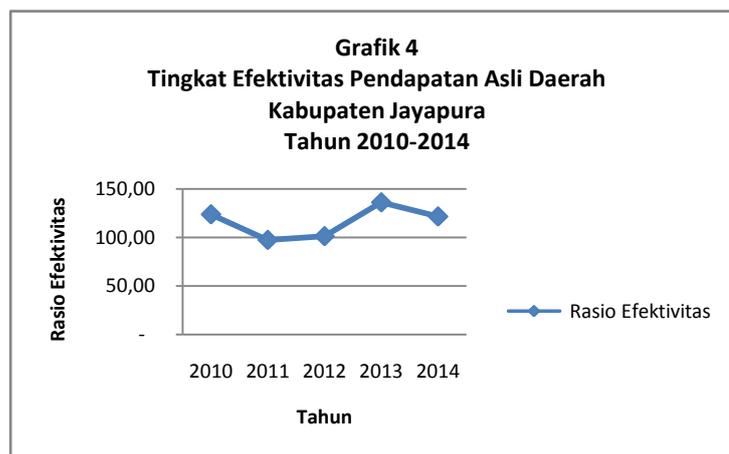
Tabel 9
 Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura
 Tahun 2010-2014

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD)	Target Pendapatan Asli Daerah(PAD)	Rasio Efektivitas	Kriteria
2010	28,812,145,760	23,263,943,124	123.85	Sangat Efektif
2011	24,319,641,889	24,961,254,000	97.43	Efektif
2012	32,544,334,958	32,113,751,921	101.34	Sangat Efektif
2013	47,003,680,309	34,516,471,560	136.18	Sangat Efektif
2014	81,007,745,806	66,596,408,557	121.64	Sangat Efektif
Rata-Rata			116.09	

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas PAD di Kabupaten Jayapura tahun 2010-2014 dapat dijelaskan bahwa efektivitas PAD di Kabupaten Jayapura pada tahun 2010 sampai dengan 2014

tergolong dalam katagori sangat efektif dengan rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 116,09 persen.



Grafik di atas menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif, hal ini dikarenakan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi, sehingga mempengaruhi besarnya penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura. Pada tahun 2011 rasio efektivitas PAD Kabupaten Jayapura mengalami penurunan sebesar 27,12%, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 3,86% dan 25,58%. Sedangkan pada tahun 2014, rasio efektivitas PAD mengalami penurunan sebesar 11,95% dari tahun sebelumnya. Terjadinya penurunan tingkat efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Jayapura pada tahun 2014 tidak sebabkan karena turunnyanya atau tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, akan tetapi disebabkan karena penetapan target penerimaan PAD yang cukup tinggi, dibandingkan tahun sebelumnya,

yaitu naik sebesar 48,17% dari tahun sebelumnya. Pihak pemerintah daerah harus mampu menganalisa dengan baik besarnya target penerimaan yang ditetapkan.

Efektivitas yang tinggi ini merupakan gambaran bahwa, pemerintah Kabupaten Jayapura telah bekerja keras dalam meningkatkan pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya dari tahun ke tahun.

Rasio Efisiensi

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi pemungutan pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura pada tahun 2010 sampai dengan 2014, diperoleh data-data sebagai berikut:

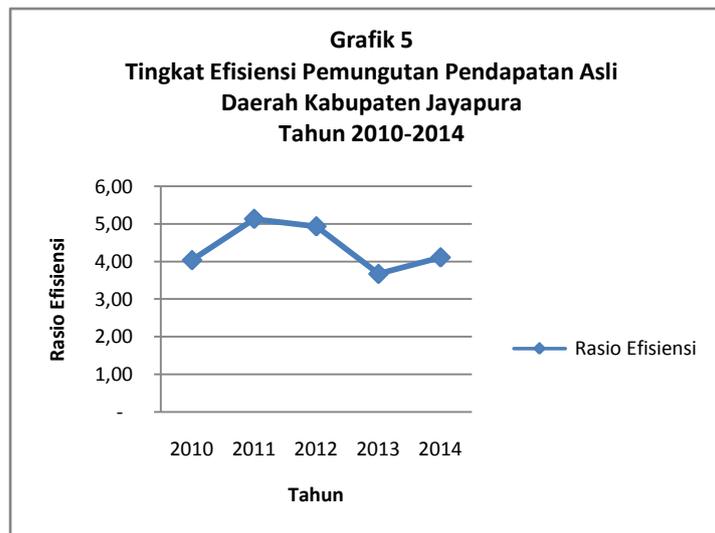
Tabel 10
 Tingkat Efisiensi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura
 Tahun 2010-2014

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2010	28.812.145.760	1.163.197.156	4,04	Tidak Efektif
2011	24.319.641.889	1.248.062.700	5,13	Tidak Efektif
2012	32.544.334.958	1.605.687.596	4,93	Tidak Efektif
2013	47.003.680.309	1.725.823.578	3,67	Tidak Efektif
2014	81.007.745.806	3.329.820.428	4,11	Tidak Efektif
Rata-Rata			4,38	

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Dari hasil perhitungan Rasio efisiensi tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pemungutan pendapatan asli daerah pemerintah daerah Kabupaten Jayapura selama tahun 2010-2014 sudah sangat efisien, hal ini dikarenakan rata-rata rasio efisiensi

pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura selama lima tahun terakhir adalah sebesar 4,38 persen, dimana semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik dalam pemungutan pendapatan asli daerah.



Grafik 4.5 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura selama tahun 2010 sampai dengan 2014 sangat efisien. Walaupun nilai rasio efisiensi pemungutan PAD fluktuatif, akan tetapi masih masuk dalam kategori sangat efisien karena berada di bawah nilai 60%. Pada tahun 2010 besarnya rasio efisiensi pemungutan PAD Kabupaten Jayapura adalah sebesar 4,04%, tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 5,13%, hal ini dikarenakan penerimaan PAD Kabupaten Jayapura tidak mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan yaitu hanya sebesar 97,43%.

Jika dilihat berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2012 dan 2013 tingkat efisiensi pemungutan PAD menunjukkan nilai rasio efisiensi penerimaan yang menurun, ini menggambarkan bahwa pada tahun tersebut terjadi over target, dimana pada tahun 2012 mengalami over target sebesar 1,34% dan pada tahun 2013 sebesar 36,18%. Sedangkan pada tahun 2014, jika dilihat pada grafik di atas mengalami kenaikan, artinya bahwa pada tahun 2014 tingkat efisiensi penerimaan PAD Kabupaten Jayapura tetap sangat efisien, namun tidak sebesar nilai efisiensi pada tahun sebelum, dimana dari total biaya pemungutan PAD yang dikeluarkan, pemerintah daerah hanya mendapatkan over target PAD sebesar 21,64%.

Tabel 11
 Rekapitulasi Hasil Analisis Kinerja Keuangan Daerah
 Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014

INDIKATOR	TAHUN					Rata-Rata	Kriteria
	2010	2011	2012	2013	2014		
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	5,75	4,70	5,44	7,39	11,43	6,94	Sangat Kurang
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	74,94	73,00	79,58	73,28	70,55	74,27	Sangat Tinggi
Rasio Desentralisasi Fiskal	4,31	3,43	4,33	5,41	8,06	5,11	Sangat Kurang
Rasio Efektivitas	123,85	97,43	101,34	136,18	121,64	116,09	Sangat Efektif
Rasio Efisiensi	4,04	5,13	4,93	3,67	4,11	4,38	Sangat Efisien

Sumber: Data Diolah, 2016

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan dan tingkat efektivitas serta efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura selama tahun 2010-2014 masuk dalam kriteria yang sudah tinggi, namun hal tersebut belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura dalam memenuhi besarnya belanja daerah.

Dari data yang telah diperoleh penulis, total penerimaan daerah Kabupaten Jayapura yang masih didominasi oleh dana perimbangan, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah masih belum mampu untuk membiayai belanja daerah yang setiap tahunnya naik. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat kemandirian daerah dan tingginya tingkat ketergantungan daerah, serta masih sangat kurangnya tingkat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Jayapura.

Dari hasil penelitian ini, penulis menilai bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura dalam hal ini tingkat kemandirian dan ketergantungan daerah serta tingkat desentralisasi fiskal dinilai baik jika pemerintah Kabupaten Jayapura sudah bisa menaikkan prosentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi di atas 40% terhadap dana perimbangan, karena dengan demikian Pendapatan Asli Daerah akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap total Belanja Daerah.

Namun demikian, usaha pemerintah Kabupaten Jayapura dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sudah cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan selalu dicapai di atas 100 persen. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, hanya perlu menggali potensi-potensi baru sumber pendapatan asli daerah, sehingga mampu mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Jayapura periode 2010 sampai dengan 2014, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Jayapura pada Tahun Anggaran 2010-2014 diukur berdasarkan rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, masuk dalam kriteria daerah dengan tingkat ketergantungan yang masih Sangat Tinggi. Hal inilah yang menyebabkan tingkat Kemandirian Daerah Sangat Kurang, sehingga dengan sendirinya tingkat Desentralisasi Fiskal juga masuk dalam kriteria sangat kurang. Namun, efektifitas penerimaan PAD Kabupaten Jayapura sudah Sangat Efektif, dan Efisiensi pengelolaan PAD juga sudah menunjukkan hasil yang Sangat Efisien, akan tetapi harus tetap ditingkatkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jayapura terhadap pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayapura dalam hal ini tingkat kemandirian dan ketergantungan daerah serta tingkat desentralisasi fiskal dinilai baik jika pemerintah Kabupaten Jayapura sudah bisa menaikkan prosentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi di atas 40% terhadap dana perimbangan, karena dengan demikian Pendapatan Asli Daerah akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap total Belanja Daerah.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Jayapura harus mampu menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang telah ada, seperti pengelolaan Danau Sentani menjadi tempat wisata dan daerah transmigrasi Kertosai menjadi daerah Agrowisata, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Jayapura harus meningkatkan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi kepada masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
3. Kurangnya pembekalan kepada personil penagihan yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan penagihan langsung, juga menyebabkan masih kurang maksimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga perlu adanya pelatihan yang lebih rutin kepada personil penagihan yang langsung turun ke lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Mhd Karya Satya, 2008. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah", *Tesis*, Departemen Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura 2013
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2004. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Erfa, Azhir, 2008. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Setelah Otonomi Khusus (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara)", *Skripsi*, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Halim, Abdul dan Jamal Abdul Nasir, 2006. "Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang", *Jurnal Manajemen Usahawan*, Nomor 06 Th XXXV Juni 2006, Lembaga Management FE-UI, Jakarta, hal 42.
- Halim, Abdul, 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat.
- Haryati, Sri, 2006. "Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000 dan 2000-2001", *Skripsi*, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Husein Umar, 2003, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta. : PT. Gramedia Pustaka
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Republik Indonesia 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia, 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governanace (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju, Bandung.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi (Konsep dan Strategi)*, Cetakan Pertama, Penerbit Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik
- Wajong J., *Administrasi Keuangan Daerah*, Cetakan ke III, Jakarta, Penerbit Balai Buku Ichtar, 1998.

ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

Abraham Rieuwpassa
Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel budaya organisasi (X) sebesar $6,879 > t$ tabel $1,713$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Dengan demikian hipotesis diduga bahwa variabel budaya organisasi (X) berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

Kemudian koefisien korelasi (R) sebesar $0,815$ menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi (X) terdapat hubungan yang kuat terhadap kinerja pegawai pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

Sementara koefisien determinasi R^2 sebesar $0,663$ mengandung makna bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura sebesar $0,663$ atau $66,3\%$ sedangkan sisanya sebesar $33,7\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci : *Budaya Organisasi, Kinerja*

PENDAHULUAN.

Kajian terhadap organisasi merupakan hal yang paling relevan dan paling banyak di bicarakan, dengan demikian semua organisasi, apapun ukuran serta bentuknya selalu menampilkan peranan individu dan kelompok. Sejalan dengan hal tersebut maka kajian terhadap organisasi formal meliputi usaha untuk menggambarkan karakteristik organisasi sebagai wahana pengelompokan beragam manusia yang masing-masing memiliki kepribadian individu maupun kelompok.

Organisasi dapat di tinjau dari segi ukuran organisasi tentang apakah ukuran organisasi ditentukan oleh jumlah anggota; apakah tingkat pendapatan/gaji ditentukan oleh tingkat pendidikan, atau harus sebanding dengan ketersediaan fasilitas kesejahteraan. Sedangkan pada aspek yang lain dapat dikatakan bahwa karakteristik organisasi tentunya meliputi materi pusat kewenangan dan kekuasaan pengambilan keputusan, kerumitan spesialisasi tugas dan fungsi, atau hubungan antara pusat kekuasaan dengan spesialisasi tugas dan fungsi.

Menurut Rois Arifin Dkk, (2003 : 89), bahwa suatu organisasi merupakan bagian dari kultur

sosial karena didalamnya terdiri dari unsur manusia dan mempunyai pengaruh pada perilaku anggota dalam organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan dalam kultur organisasi itu sendiri mempunyai paling sedikit 5 (lima) fungsi, yaitu : 1) Sebagai penentu batas-batas perilaku dalam arti menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, pada yang dipandang baik atau tidak baik, dan menentukan apa yang benar dan yang salah, 2) Menumbuhkan jati diri suatu organisasi dan para anggotanya, 3) Menumbuhkan komitmen kepada kepentingan bersama di atas kepentingan individual atau kelompok, 4) Sebagai tali pengikat bagi seluruh anggota organisasi, dan 5) Sebagai alat pengendali perilaku para anggota organisasi yang bersangkutan.

Seperti halnya dengan organisasi pada umumnya, maka dalam lingkungan organisasi pemerintah sangat dibutuhkan, artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai tentunya harus diimbangi dengan proses perencanaan, sehingga akan nampak terlihat batas-batas tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dilaksanakan secara jelas. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjamin agar proses pelaksanaan tugas dapat

dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya pekerjaan yang dilakukan akan mencapai hasil yang maksimal.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kajian terhadap organisasi formal antara lain meliputi hubungan antar manusia dalam organisasi demi kepentingan organisasi, serta dampak langsung maupun tidak langsung perilaku individu maupun social terhadap organisasi tersebut.

Sebagaimana di ketahui bahwa untuk mewujudkan kinerja suatu organisasi yang maksimal secara keseluruhan adalah dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia, atau dalam pemahaman tenaga kerja adalah merupakan asset yang terpenting yang harus dicari, dijaga dan dikembangkan, sebab organisasi yang memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas akan memberikan daya saing yang tinggi bagi organisasi tersebut, sebaliknya suatu organisasi akan mengalami kemunduran dan bahkan kehancuran apabila tenaga kerja atau pegawai yang dimilikinya tidak mampu meningkatkan disiplin diri terhadap setiap aturan yang ditetapkan.

Penerapan budaya organisasi pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, tentunya harus menjwai seluruh insani pegawai kedepan sekaligus memberikan karakter atau ciri khas dan menjadi suatu perwujudan agar mampu menarik kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Sebab dengan budaya organisasi yang kuat dan kokoh diharapkan mampu mempererat individu yang ada dalam organisasi sehingga dapat membenruk sikap dan perilaku yang dapat menghasilkan kinerja maksimal demi peningkatan kinerja institusi atau organisasi secara keseluruhan.

Dari uraian yang diungkapkan di atas, apabila dikaitkan dengan kondisi obyektivitas kerja pegawai pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura yang mempunyai peran dalam penataan sistem administrasi keuangan dan perlengkapan daerah, khususnya dalam menunjang tugas-tugas pemerintah kabupaten dalam hal pelayanan kepada masyarakat, tentunya membutuhkan sikap, dedikasi dan disiplin kerja yang tinggi. Namun dalam kenyataannya masih banyak di jumpai kurangnya inisiatif individu dari pegawai dalam melaksanakan tugas, terutama dalam memberikan ruang kebebasan untuk berinovasi dari pimpinan sehingga mengakibatkan ketidak tatatan pegawai dalam mendisiplinkan diri terutama pada saat jam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan gambaran di atas jika dikaitkan dengan keadaan atau objek di lapangan, maka penulis merasa tertarik dan terdorong untuk

mengadakan suatu penelitian ilmiah dengan judul : “Analisis Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.”

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah adalah sebagai berikut: Apakah budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda Kabupaten Jayapura?

Tinjauan Pustaka

Pengertian Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah norma-norma dan kebiasaan yang diterima sebagai suatu kebenaran oleh semua orang dalam organisasi. Budaya organisasi menjadi acuan bersama diantara manusia dalam berinteraksi dalam organisasi. Jika orang-orang yang bergabung dalam sebuah organisasi, mereka membawa nilai – nilai dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Davis dalam Loko (2004 : 29),. Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktikkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi. Adapun hal yang sama juga dikatakan oleh Mangkunegara (2005 : 113), bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau system keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma yang dikembangkan dalam organisasi untuk dijadikan pedoman tingka laku bagi anggota – anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal. Selanjutnya Robins dalam Tampubolon (2004 : 190), mengatakan bahwa budaya organisasi merupakan perekat social yang mengikat anggota – anggota organisasi secara bersama-sama melalui nilai – nilai, norma-norma standar yang jelas tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dan dikatakan oleh anggotanya. Lebih lanjut dikatakan oleh Scein dalam Stoner (1995 : 183), bahwa budaya organisasi digambarkan sebagai suatu pola dari asumsi – asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu dengan maksud agar organisasi belajar mengatasi atau menganggulangi masalah – masalahnya yang timbul akibat adaptasi eksternal maupun internal yang sudah berjalan dengan cukup baik.

Sebagaimana diketahui bahwa budaya organisasi berawal dari kebiasaan saat ini, tradisi, dan cara-cara umum untuk melakukan pekerjaan. Dan kebanyakan berasal dari apa yang telah dilaksanakan sebelumnya

dan tingkat keberhasilan dari usaha – usaha yang telah dilakukan. Dengan demikian budaya organisasi merupakan persepsi umum yang diyakini oleh para anggota organisasi, semakin banyak pegawai suatu organisasi menerima nilai – nilai inti, menyetujui jajaran tingkatannya, dan merasa tertarik kepadanya, maka akan menjadikan sebuah budaya yang kuat. Kemudian Peter F Drucker dalam Tika (2006 : 4), dikatakan bahwa budaya organisasi adalah pokok penyelesaian masalah-masalah eksternal dan internal yang pelaksanaannya dilakukan secara konsisten oleh suatu kelompok yang kemudian diwariskan kepada anggota – anggota baru sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan dan merasakan terhadap berbagai masalah yang ada dalam lingkup organisasi.

Dari berbagai defenisi yang diungkapkan diatas, terkandung unsur – unsur dalam budaya organisasi, yaitu :

1. Asumsi dasar yaitu berfungsi sebagai pedoman bagi anggota maupun kelompok dalam organisasi untuk berperilaku.
2. Keyakinan yang dianut ini mengandung nilai – nilai yang dapat berbentuk slogan atau moto, asumsi dasar, tujuan umum organisasi, dan filosofi usah.
3. Pemimpin atau kelompok pencipta dan pengembangan budaya orga nisasi.
4. Pedoman mengatasi masalah. Didalam organisasi ada 2 (dua) ,masalah pokok yang sering muncul, yakni masalah adaptasi eksternal dan masalah integrasi internal.
5. Berbagai nilai (*sharing of value*). Dalam budaya organisasi perlu berbagai nilai terhadap apa yang paling diinginkan atau apa yang paling baik dan berharga bagi seseorang.
6. Pewaris (*learning process*). Asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi perlu diwariskan kepada anggota – anggota baru dalam organisasi sebagai pedoman untuk bertindak dan berperilaku dalam organisasi tersebut.
7. Adaptasi atau penyesuaian

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai – nilai organisasi yang dijiwai oleh seluruh anggotanya dalam melakukan pekerjaan , sehingga pada akhirnya akan menjadi sebuah nilai atau aturan di dalam organisasi tersebut.

Menurut Rivai (2004 : 432), bahwa budaya organisssi mempunyai fungsi sebagai; a). Peran menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara suatu organisasi dengan organisasi yang lain. b). Memberikan identitas bagi anggota

organisasi. c). Mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas dan pada kepentingan individu. d). Meningkatkan kemantapan system social, serta e). Sebagai mekanisme pembuat makna kendali yang memandu serta membentuk sikap dan perilaku pegawai/karyawan.

Luthans dalam Loko (2004 : 33) , mengidentifikasi 6 (enam) karakter penting dalam budaya organisasi, yaitu *pertama, Observed behavior regulation*, yaitu apabila para partisipan organisasi saling berinteraksi, maka mereka akan menggunakan bahasa, terminology dan ritwal yang sama yang berhubungan dengan rasa hormat dan cara bertindak. *Kedua, norms*, yaitu standar – standar perilaku yang ada mencakup pedoman tentang berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan perbuatan – perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan. *Ketiga, dominant value*, yaitu ada sejumlah nilai – nilai utama yang organisasi anjurkan dan harapkan kepada anggota organisasi untuk menyumbangkannya.

Karakteristik Budaya Organisasi.

Karakteristik – karakteristik budaya organisasi menurut Stephen P.Robbin dalam Tika (2006 : 10), antara lain meliputi

1. Inisiatif Individu, yaitu sejauh mana organisasi memberikan kebebasan kepada setiap pegawai dalam mengemukakan pendapat atau ide-ide didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Toleransi terhadap tindakan beresiko, yaitu sejauh mana para pegawai dianjurkan untuk dapat bertindak agresif, inovatif dan mengambil resiko dalam mengambil kesempatan yang dapat memajukan dan mengembangkan organisasi.
3. Pengarahan, yaitu sejauh mana pimpinan suatu organisasi dapat menciptakan dengan jelas sasaran dan harapan yang diinginkan, sehingga para pegawai dapat memahaminya.
4. Integrasi, yaitu sejauh mana suatu organanisasi dapat mendorong unit-unit organisasi untuk bekerja dengan cara yang terkoordinasi.
5. Dukungan manajemen, yaitu sejauh mana para pemimpin organisasi dapat memberikan komunikasi atau arahan, bantuan serta dukungan yang jelas terhadap pegawai.
6. Sistem Imbalan, sejauh mana alokasi imbalan (kenaikan gaji, promosi dan sebagainya) didasarkanatas prrstasi kerja pegawai, dan bukan sebaliknya didasari atas senioritas, atau sikap pilih kasih dan sebagainya.
7. Toleransi terhadap konflik, yaitu sejauh mana pegawai didorong untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka guna memajukan organisasi.

Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama, dan tugas pokok instansi, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk memutuskan suatu tindakan, dan lain-lain. Kinerja didefinisikan sebagai kontribusi terhadap hasil akhir organisasi dalam kaitannya dengan sumber yang dihabiskan dan harus diukur dengan indikator kualitatif dan kuantitatif maka pengembangan instrumen dilakukan untuk menilai persepsi pekerjaan akan kinerja diri mereka sendiri dalam kaitannya dengan item-item seperti out put, pencapaian tujuan, pemenuhan deadline, penggunaan jam kerja dan ijin sakit.

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang hendak dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja. Kinerja dipergunakan manajemen untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kinerja, organisasi dan manajemen dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kegagalan karyawannya dalam menjalankan amanah yang diterima.

Dalam organisasi formal kinerja karyawan secara individual atau kelompok tergantung pada usaha mereka dan arah serta kompetensi dan motivasi untuk menunjukkan performansi sesuai yang diharapkan untuk mencapai sasaran berdasarkan posisi mereka di dalam sistem.

Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara, 2005:67).

Secara definitif Bernardin dan Russel, menjelaskan kinerja merupakan catatan *out come* yang dihasilkan dari fungsi karyawan tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah, 2003). Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan sehingga mereka mempengaruhi

seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada instansi atau organisasi termasuk kualitas pelayanan yang disajikan.

Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Adapun tujuan dan manfaat pengukuran kinerja adalah Mardiasmo (2002) adalah:

- Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
- Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
- Untuk mengakomodasi pemahaman manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *good congruence*.
- Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Sedangkan manfaat pengukuran kinerja adalah:

- Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
- Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
- Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati
- Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Dharma (2005) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja: Pertama, *efektivitas* dan *efisiensi*. Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicarikegiatan mempunyai nilai yang penting dari hasil yang dipapaisehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang dicari-caritidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efektif. Kedua, *otoritas* (wewenang). Arti *otoritas* adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah

dalam suatu organisasi formal yang dimiliki (diterima) oleh seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya (sumbangan tenaganya). Perintah tersebut menyatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam organisasi tersebut. Ketiga, disiplin. Disiplin kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi di mana dia kerja. Keempat, inisiatif yaitu berkaitan dengan daya dan kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Jadi, inisiatif adalah daya dorong kemajuan yang bertujuan untuk mempengaruhi kinerja organisasi.

Sedangkan (Keith Davis dalam Anwar Prabu Mangkunegara, 2005) merumuskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*). Hal ini sesuai dengan pendapat:

- a. Human Performance = Ability + Motivation
- b. Motivation = Attitude + Situation
- c. Ability = Knowledge + Skill

Tujuan Penilaian Kinerja

Untuk dapat mengetahui kinerja seseorang atau organisasi, perlu diadakan pengukuran kinerja. Menurut Stout (BPKP, 2000), pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Maksudnya setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dengan pencapaian visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan akan kurang berarti apabila tidak ada kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Melalui pengukuran kinerja diharapkan pola kerja dan pelaksanaan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan akan terlaksana secara efisien dan efektif dalam mewujudkan tujuan nasional. Pengukuran kinerja pegawai akan dapat berguna untuk: (1) mendorong orang agar berperilaku positif atau memperbaiki tindakan mereka yang berada di bawah standar kinerja, (2) sebagai bahan penilaian bagi pihak pimpinan apakah mereka telah bekerja dengan baik, dan (3) memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan untuk peningkatan

organisasi (BPKP, 2000). Dalam pengukuran kinerja (*performance measurement*) organisasi hendaknya dapat menentukan aspek-aspek apa saja yang menjadi topik pengukurannya. Pengukuran kinerja menurut Mangkunegara (2005) adalah:

1. Kuantitas, jumlah hasil kerja yang dilakukan dalam suatu periode yang ditentukan.
2. Kualitas Kerja, hasil kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.
3. Ketepatan waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan

Tujuan pokok sistem penilaian kinerja (Simamora, 2000) adalah menghasilkan informasi yang akurat dan sah tentang perilaku dan kinerja anggota-anggota organisasi. Semakin akurat dan sah informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian kinerja, semakin besar potensi nilainya bagi organisasi.

Dalam penelitian ini digunakan konsep pengukuran kinerja menggunakan pendapat Mangkunegara (2005). Penggunaan konsep ini dengan pertimbangan bahwa konsep pengukuran kinerja yang digunakan memuat unsur-unsur yang penting dalam pelaksanaan penilaian kinerja karyawan atau pegawai yang mengacu pada kadar pencapaian tugas-tugas yang diberikan pada karyawan atau pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi,

Metode Analisa Data

Untuk mengetahui apakah variabel budaya organisasi (X) berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y) maka digunakan persamaan regresi sederhana menurut M. C Maryati (2001), dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b x$$

Dimana :

Y = Variabel kinerja

α = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Variabel budaya organisasi

Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel Budaya Organisasi (X)

Berdasarkan hasil kuesioner yang disampaikan kepada responden, maka diperoleh tanggapan tentang variabel budaya organisasi (x) sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Budaya Organisasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	7.7	7.7	7.7
	3.00	4	15.4	15.4	23.1
	4.00	14	53.8	53.8	76.9
	5.00	6	23.1	23.1	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2016

Sesuai dengan hasil olah data dengan menggunakan program SPSS pada tabel 4.6 diatas diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju tercatat sebanyak 6 orang (23,1%), yang menyatakan setuju tercatat sebanyak 14 orang (53,8%), yang menyatakan kurang setuju tercatat sebanyak 4 orang (15,4%) dan responden yang menyatakan tidak setuju tercatat sebanyak 2 (7,7%).

Artinya bahwa berdasarkan uraian diatas, ternyata variabel budaya organisasi dengan 4 (empat)

indicator yang digunakan maka 53,8% dari responden menyatakan setuju bahwa budaya organisasi adalah salah satu variabel yang memberi dampak terhadap kinerja.

Variabel Kinerja (Y)

Berdasarkan hasil kuesioner yang disampaikan kepada responden, maka diperoleh tanggapan tentang variabel kinerja pegawai (y) sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Kinerja Pegawai

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	1	3.8	3.8	3.8
	3.00	8	30.8	30.8	34.6
	4.00	14	53.8	53.8	88.5
	5.00	3	11.5	11.5	100.0
	Total	26	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah, 2016

Sesuai dengan hasil olah data dengan menggunakan program SPSS pada tabel 4.7 diatas diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju tercatat sebanyak 3 orang (11,5%), yang menyatakan setuju tercatat sebanyak 14 orang (53,8%), yang menyatakan kurang setuju tercatat sebanyak 8 orang (30,8%) dan responden yang menyatakan tidak setuju tercatat sebanyak 1 (3,8%).

Artinya bahwa berdasarkan uraian diatas, ternyata variabel kinerja pegawai dengan 4 (empat) indicator yang digunakan maka 53,8% dari responden menyatakan setuju bahwa kinerja pegawai adalah

salah satu variabel yang memberi dampak terhadap budaya organisasi.

Pengujian Hipotesa

Untuk menjawab hipotesis penelitian ini, yaitu diduga variabel budaya organisasi (X) berpengaruh terhadap kinerja pegawai (Y) pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, maka digunakan uji statistic sebagai berikut :

a. Uji T

Untuk membuktikan apakah variabel budaya organisasi (X) berpengaruh secara parsial terhadap

kinerja pegawai (Y), maka digunakan uji t. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan

program SPSS maka diketahui hasil uji t pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Coefficients(a)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.991	.407		2.436	.023
Budaya Organisasi	.698	.102	.815	6.879	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai
Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil olahan data computer pada tabel 4.8 diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel budaya organisasi sebesar 6,879 dengan tingkat α 5%, (n-k) atau 26-3, maka nilai t tabel yang di dapat sebesar 1,713. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel budaya organisasi (X) sebesar 6,879 > t tabel 1,713 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Dengan demikian hipotesis ini terbukti yaitu di duga bahwa variabel budaya organisasi (X) berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai (Y) pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.

b. Persamaan Regresi

Dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana yang diolah dengan menggunakan program SPSS, maka dapat diketahui berapa besar pengaruh variabel budaya organisasi (X) terhadap kinerja pegawai (Y) pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. Dengan demikian persamaan regresi linier sederhana sesuai dengan hasil olahan program SPSS

yang terlihat pada tabel 4.8 diatas sebagai berikut :
 $Y = 0,991 + 0,698x$

Dari persamaan regresi linier sederhana tersebut mengandung arti bahwa :

- 1). Nilai konstanta 0,991 yang berarti bahwa apabila tidak memperhitungkan adanya variabel budaya organisasi (X) maka kinerja pegawai sebesar 0,991.
- 2). Nilai koefisien regresi budaya organisasi (X) sebesar 0,698 mengandung makna bahwa apabila setiap kali peningkatan budaya organisasi sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,698.

c. Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, maka berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS sebagaimana terlihat pada tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.815 ^a	.663	.649	.42885

a. Predictors: (Constant), BUDAYA ORGANISASI
Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan data pada tabel 4.9 diatas, maka diketahui bahwa koefisien korelasi (R) sebesar 0.815, menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi (X) terdapat hubungan yang kuat terhadap kinerja

pegawai pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. Selanjutnya berdasarkan data yang ada pada tabel 4.9 diatas, maka nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,663. Artinya bahwa variabel budaya organisasi (X)

mampu menerangkan atau mempengaruhi variabel kinerja pegawai (Y) pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura sebesar 66,3 % sementara sisanya sebesar 33,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.. Dengan demikian maka mendukung penelitian terdahulu dari Asfar Halim Dalimunthe (2009) yang menyatakan bahwa bahwa antara budaya organisasi dengan kinerja pegawai mempunyai hubungan yang kuat, demikian halnya dengan penelitian Prima Nugraha S Sinaga (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi, Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Hal ini juga didukung oleh berbagai pernyataan para ahli, antara lain yang dikatakan oleh Davis dalam Loko (2004 : 29),. Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi. Adapun hal yang sama juga dikatakan oleh Mangkunegara (2005 : 113), bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau system keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma yang dikembangkan dalam organisasi untuk dijadikan pedoman tingka laku bagi anggota – anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal.

Bersarkan uraian tentang budaya organisasi diatas, dapat dijelaskan bahwa perilaku yang timbul pada diri seseorang didorong oleh adanya keyakinan dan nilai – nilai organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh individu dalam organisasi sehingga memberikan kontribusi yang baik dalam bekerja untuk mencapai kinerja yang baik pula.

Dengan demikian untuk mewujudkan hasil kinerja yang baik seperti yang diharapkan oleh organisasi, maka pihak manajemen, dalam hal ini adalah pimpinan perlu memperhatikan dan motivasi kerja secara seksama kepada setiap pegawai sehingga akan

membangkitkan semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dimuka, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut;

1. Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel budaya organsasi (X) sebesar $6,879 > t$ tabel $1,713$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Dengan demikian hipotesis diduga bahwa variabel budaya organisasi (X) berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.
2. Koefisien korelasi (R) sebesar $0,815$ menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi (X) terdapat hubungan yang kuat terhadap kinerja pegawai pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.
3. Koefisien determinasi R^2 sebesar $0,663$ mengandung makna bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura sebesar $0,663$ atau $66,3\%$ sedangkan sisanya sebesar $33,7\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Saran

Beberapa hasil temuan dari pembahasan penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Kinerja yang ditunjukkan para pegawai saat ini sudah cukup baik, oleh karena itu hal ini harus dipertahankan serta ditingkat dikemudian hari, dengan memberikan perhatian terhadap pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi serta perlu dibangun terus kerjasama antar pegawai, sehingga tercipta kondisi kerja yang harmonis antara pimpinan dengan bawahan dan antar sesama pegawai dilingkungan bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura.
2. Diperlukan adanya pemberian kesempatan seperti; keikut sertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya, sehingga para pegawai dapat meningkatkan kinerja baik secara individu maupun secara bersama-sama dalam organisasi yang ada.

3. Kepada Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Jayapura, untuk senantiasa memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian bonus atau insentif kepada pegawai yang masuk tepat waktu atau yang berprestasi, dengan maksud dapat memotivasi pegawai yang lain sehingga berlomba-lomba untuk menghasilkan kinerja yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar Halim Dalimunthe (2009), Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (study pada Dinas Infokom & Pengelolaan Data Elektronik Kota Medan
- Casco W.F, (1992), Human Resources Management, an Information System Approach, Rerton, Virginia
- Dessler G., (1998). Human Resources Management. Terjemahan: Manajemen Sumber Daya Manusia, Alih Bahasa: Benyamin Molan, Jilid I, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Gomes F.C (2000), Manajemen Sumber Daya Manusia, Andi Offset, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam (2009). Structural Equation Modeling dengan Lisrel 8.80 edisi II. Semarang. Penerbit Universitas Diponegoro
- Ira Puspita Sari (2013), Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank BII cabang Malang.
- Kussiyanto. B (1993), Meningkatkan Produktivitas Karyawan, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Loko Andreas, (2004), Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi, Isu Teor dan Solusi, Yogyakarta, Amara Books
- Luthan, Fred, Organizational Behavior, New York, Mc Grew – Hill Book Company, 3 th, Edt.
- Mangkunegara, Anwar (2005), Prilaku dan Budaya Organisasi, Bandung, PT Rafika Aditama.
- MC Maryati, 2001. Statistik Ekonomi dan Bisnis, UPP AMP YKPN Yogyakarta
- Moeldjono Djokosantoso (2003), Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nurokhman, (1997), Analisis Motivasi Kerja Bagi Peningkatan Produktivitas Karyawan Pada PT. Tanjung Redab Hutani – Berau, Kaltim, Tesis MMA – IPB, (Tidak Diterbitkan).
- Prima Nugraha S Sinaga (2007) “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi, Fakultas Fisip, Universitas Sumatera Utara.
- Rival, Veithzal dan Basri. 2005. Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Robbins S.P (1996), Essential Of Organizational Behavior, Seccond Edition, Englewood Cliff, New Jerse
- Rois Arifin, Dkk (2003), Perilaku Organisasi, Bayumedia, Malang.
- Siagian, Sondang P (2002), Teori Pengembangan Organisasi, Jakarta, PT Bumi Aksara
- Sobirin, Achmad (2007), Budaya Organisasi Pengertian, Makna dan Aplikasi Dalam Kehidupan Organisasi, Yogyakarta IIPP.
- Soeprihanto J. (2000), Penilaian kinerja dan Pengembangan Karyawan, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gaja Mada, Yogyakarta.
- Tampubolon, Manahan. P (2004), Prilaku Keorganisasian, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Tika, Prabundu H. Mohammad (2006), Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Jakarta PT Bumi Aksara
- Terry, George, 2000, Prinsip-Prinsip Manajemen, Gunung Agung, Jakarta.
- Wursanto. IG. 1999, Management Kepegawaian, Kanesus, Yogyakarta.

ANALISIS TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA TOKO ROTI ROPAN WAMENA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Victor F. Pasalbessy

Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena; Permasalahan hanya dibatasi pada variable roti manis dan roti tawar. Data yang digunakan adalah data *time series* kurun waktu 2010 – 2014. Alat analisis yang digunakan adalah menghitung produktivitas tenaga kerja. Data diolah merupakan data sekunder.

Dari hasil analisis, diperoleh perkembangan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari hasil produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja, dimana hasil produksinya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang berdampak pada pendapatan dan biaya tenaga kerja Dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena diperoleh hasil berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, sehingga rata-rata produktivitas tenaga kerja selama 5 tahun adalah sebesar 14,747 persen.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena, antara lain: Magang (*Understudy Training*) dan Studi Banding.

Kata kunci : *tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Apabila kita melihat perkembangan dunia usaha dewasa ini, tampaknya mengalami perkembangan yang sangat pesat baik di pusat maupun di daerah-daerah. Semua jenis usaha baik berskala besar maupun kecil yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, memerlukan tenaga kerja yang produktif. Realita menunjukkan bahwa produktivitas adalah salah satu ukuran keberhasilan kegiatan suatu usaha dan yang dapat menghasilkan output yang maksimal maupun dalam aspek lainnya.

Oleh sebab itu, belakangan ini fenomena sumber daya manusia mendapat perhatian dan penanganan khusus. Untuk meningkatkan volume hasil produksi pada Toko Roti Ropandi dalam menjalankan usaha yang dikelolanya selalu melakukan peningkatan produktivitas kerja karyawan dengan berbagai macam cara yang ditempuh antara lain pelatihan, pemagangan, dan lain-lain. Agar tenaga kerja yang dipekerjakan bisa produktif di dalam melakukan pekerjaan guna memperoleh hasil yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh perusahaan.

Toko Roti Ropan dalam menjalankan usaha yang dikelolanya selalu ada persaingan dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Keunggulan bersaing suatu perusahaan sangat

bergantung pada kemampuan perusahaan tersebut di dalam mencapai kinerja yang optimal. Kinerja yang baik akan dapat diraih jika produktifitas dari karyawan/tenaga kerja mengalami kemajuan atau peningkatan.

Kemajuan Toko Roti Ropan sangat bergantung pada peningkatan produktivitas karyawan atau tenaga kerja, karena dengan adanya peningkatan ini, maka hasil akhir (output) yang diinginkan dan diharapkan dapat tercapai dan akan mendatangkan keuntungan (profit) bagi karyawan dan bagi perusahaan itu sendiri.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka penulis tertarik mengadakan suatu kajian yang lebih mendalam melalui suatu penelitian tentang: "Analisis Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Toko Roti Ropan Wamena Kabupaten Jayawijaya".

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena ?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena ?

Pembatasan Masalah

Untuk tidak memperluas permasalahan yang diambil, maka penulis membatasi permasalahan dengan meneliti roti manis dan roti tawar pada Toko Roti Ropan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan 2014.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui besarnya tingkat produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena;
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan terkait dalam rangka strategi pengambilan keputusan, mengenai produktivitas tenaga kerja;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada dan masyarakat dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
- c. Menjadi bahan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya pada bidang yang sama di Wamena.

KAJIAN TEORITIS

Teori Produktivitas

Perkataan produktivitas muncul untuk pertama kali pada tahun 1866 dalam suatu makalah yang disusun oleh Sarjana Ekonomi Perancis bernama Quesnay (pendiri aliran fisiokrat). Tetapi menurut Walter Aigner dalam karyanya "*Motivation and Awereness*" filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak awal peradaban manusia, karena makna produktivitas adalah keinginan (the will) dan upaya (effort) manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan di segala bidang.

Dalam ilmu ekonomi, produktivitas merupakan nisbah atau rasio antara hasil kegiatan dan segala pengorbanan (biaya) untuk mewujudkan hasil tersebut. Pada umumnya, nisbah atau rasio berupa suatu bilangan rata-rata yang mengungkapkan hasil bagi antara angka-angka keluaran barang atau jasa (seperti : biaya tenaga kerja dan bahan baku).

Pada dasarnya, setiap bentuk masukan bila dikuantifikasikan dapat digunakan sebagai faktor penyebut atau pembagi pada rasio produktivitas modal, produktivitas tenaga kerja, atau produktivitas dari berbagai sub kategori lain masing-masing faktor produksi.

Sampai sekarang, tenaga kerja yang lazim dijadikan faktor produksi pengukur produktivitas itu. Hal ini

disebabkan karena; (1) besarnya biaya yang dikorbankan untuk tenaga kerja sebagai bagian dari biaya yang terbesar untuk pengadaan produk atau jasa; (2) karena masukan pada sumber daya manusia lebih mudah dihitung ketimbang masukan pada faktor produksi lainnya.

Perlu diingat, bahwa kemajuan teknologi yang mempermudah cara pembuatan barang dan berkembang dari faktor tenaga kerja (Handoko, 1993:206).

Menurut Sulitiani dan Rosidah (2000:209) menjelaskan bahwa produktivitas menyangkut hasil akhir adalah seberapa besar hasil akhir yang diperoleh di dalam proses produksi.

Menurut Vernon A. Musselman dan John H. Jackson (1996:25) menjelaskan bahwa produktivitas adalah keluaran atau output dari barang-barang dan jasa-jasa untuk tiap unit tenaga kerja.

Muchdarsyah Sinungan (2000:203) menyebutkan bahwa produktivitas sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang-barang atau jasa-jasa) dengan masukan yang sebenarnya.

Lebih tegasnya lagi, Dewan Produktivitas Nasional Republik Indonesia Tahun 1983 dalam Ravianto (1986) menjelaskan bahwa produktivitas adalah sebagai berikut:

- a. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini;
- b. Secara umum produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan.

Dengan demikian, beberapa pengertian produktivitas yang telah diuraikan di atas dapat penulis rangkai dalam suatu kesimpulan bahwa produktivitas sebagai perbandingan antara besarnya input yang dilibatkan dalam kegiatan produksi terhadap hasil akhir (output) yang dihitung berdasarkan nilai unit atau rupiah barang dan jasa yang dihasilkan.

Manfaat Pengukuran Produktivitas

Suatu perusahaan perlu mengetahui pada tingkat produktivitas mana perusahaan ini beroperasi, agar dapat membandingkannya dengan produktivitas standar yang telah ditetapkan, mengukur tingkat perbaikan produktivitas dari waktu ke waktu, dan membandingkan dengan produktivitas industri sejenis yang menghasilkan produktivitas tenaga kerja serupa. Hal ini menjadi penting, agar perusahaan itu dapat meningkatkan daya saing dari

produktivitas tenaga kerja yang dihasilkannya di pasar global yang amat kompetitif.

Menurut Reksohadiprodjo (1997:13-14), ada beberapa manfaat pengukuran produktivitas dalam suatu organisasi perusahaan, antara lain:

- a. Perusahaan dapat menilai efisiensi sumber dayanya, agar dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan sumber-sumber daya itu;
- b. Perencanaan sumber-sumber daya itu akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang;
- c. Tujuan ekonomis dan non ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu yang dipandang dari sudut produktivitas;
- d. Perencanaan target tingkat produktivitas di masa mendatang dapat dimodifikasikan kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas sekarang;
- e. Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan berdasarkan kesenjangan produktivitas (*productivity gap*) yang ada diantara tingkat produktivitas yang direncanakan (produktivitas ekspektasi) dan tingkat produktivitas yang diukur (produktivitas aktual).

Karena hasil produktivitas perusahaan akan menjadi landasan dalam membuat kebijakan perbaikan produktivitas secara keseluruhan dalam proses bisnis, maka menurut Handoko (1993:211) ada beberapa kondisi berikut ini yang sangat diperlukan untuk mendukung pengukuran produktivitas, antara lain:

- a. pengukuran harus dimulai pada permulaan program perbaikan produktivitas;
- b. pengukuran produktivitas dilakukan pada suatu sistem perusahaan itu;
- c. pengukuran produktivitas seharusnya melibatkan semua individu yang terlibat dalam proses industri itu;
- d. pengukuran produktivitas seharusnya dapat memunculkan data;
- e. pengukuran produktivitas yang menghasilkan informasi-informasi utama seharusnya dicatat tanpa distorsi, yang berarti pengukuran informasi yang akurat;
- f. perlu adanya komitmen secara menyeluruh dari manajemen dan karyawan untuk mengubah produktivitas dan perbaikannya;
- g. program-program pengukuran dan perbaikan produktivitas seharusnya dapat dipecah-pecah atau diuraikan dalam batas-batas yang jelas,

sehingga tidak tumpang tindih dengan program-program yang lain.

Pengukuran Produktivitas

Indikator-indikator pengukuran produktivitas dalam sistem perusahaan masih berada dalam tahap pengembangan, sehingga setiap jenis perusahaan biasanya menentukan indikator-indikator yang sesuai dengan proses kerja dan tujuan manajemen dalam perbaikan produktivitas dari perusahaan itu.

Beberapa indikator pengukuran produktivitas yang berhasil diidentifikasi oleh penulis melalui berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan produktivitas, antara lain:

- a. Pengukuran produktivitas pada departemen produksi.
Bagian atau departemen pemasaran (*production department*) dari suatu perusahaan ketika ingin menetapkan sistem pengukuran produktivitasnya, dapat mempertimbangkan beberapa indikator produktivitas yang pada dasarnya mengacu pada konsep kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam bagian produksi.
- b. Pengukuran produktivitas pada departemen pembelian.
Bagian atau departemen pembelian (*buying department*) dari suatu perusahaan ketika ingin menetapkan sistem pengukuran produktivitasnya, dapat mempertimbangkan beberapa indikator produktivitas yang pada dasarnya mengacu pada konsep kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam bagian pembelian.
- c. Pengukuran produktivitas pada departemen pemasaran.
Bagian atau departemen pemasaran (*marketing department*) dari suatu perusahaan ketika ingin menetapkan sistem pengukuran produktivitasnya, dapat mempertimbangkan beberapa indikator produktivitas yang pada dasarnya mengacu pada konsep kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam bagian pemasaran.
- d. Pengukuran produktivitas pada departemen sumber daya manusia.
Bagian atau departemen sumber daya manusia (*human resources department*) dari suatu perusahaan ketika ingin menetapkan sistem pengukuran produktivitasnya, dapat mempertimbangkan beberapa indikator produktivitas, yang pada dasarnya mengacu pada konsep kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam bagian sumber daya manusia.
- e. Pengukuran produktivitas pada departemen keuangan.
Bagian atau departemen keuangan (*finance department*) dari suatu perusahaan ketika ingin menetapkan sistem pengukuran produktivitasnya,

dapat mempertimbangkan beberapa indikator produktivitas yang pada dasarnya mengacu pada konsep kualitas, efektivitas dan efisiensi dalam bagian keuangan.

Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penentu dalam proses produksi, bahkan tenaga kerja adalah faktor yang dominan dibandingkan dengan faktor-faktor produksi yang lain, karena manusia merupakan faktor penggerak dari semua sektor (kegiatan).

Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa, salah satu potensi terbesar dalam perekonomian Indonesia adalah faktor manusia atau penduduk sebagai faktor dinamis. Namun demikian, masih saja diperhadapkan pada tantangan-tantangan utama yaitu bagaimana mempersiapkan tenaga-tenaga pelaksana pembangunan yang berkualitas, bukan saja jumlah dan terampil dalam melakukan pekerjaan, akan tetapi juga mempunyai daya analisa dan pandangan jauh ke depan.

Menurut A.G. Prigodigdo dan Hassan Shadily (1973:109) bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah pemburuan yang bertalian dengan tenaga kerja manusia, baik mengenai pekerjaan atau tugas yang dilakukan seseorang, maupun yang berkenaan dengan orang lain atau manusia sebagai kelompok sosial yang menjalankan pekerjaan itu.

Dari beberapa pengertian tentang tenaga kerja yang telah dikemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah semua penduduk dalam usia kerja dan sanggup atau bersedia untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan yang telah diberikan oleh organisasi atau perusahaan yang akan menghasilkan barang-

barang atau jasa-jasa dengan memperoleh imbalan berupa penghasilan, biasanya dalam bentuk upah atau gaji.

Mutu Tenaga Kerja

Agar tenaga kerja yang ditarik untuk bekerja pada perusahaan sesuai dengan keinginan perusahaan, maka terlebih dahulu harus ditentukan standar personalia sebagai pembandingnya. Standar itu merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi agar seorang tenaga kerja bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Penentuan mutu atau kualitas seorang tenaga kerja menyangkut rancangan dari pada jabatan.

Studi terhadap tugas dan kewajiban suatu jabatan untuk menentukan kemampuan karyawan yang diperlukan bagi jabatan tersebut. Untuk mempertahankan mutu tenaga kerja, maka perusahaan memperhatikan beberapa kendala yang dihadapi oleh setiap tenaga kerja, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan mulus dan mencapai tingkat produktivitas yang lebih menguntungkan bagi perusahaan, yaitu antara lain:

a. Tingkat absensi

Apabila seorang tenaga kerja tidak hadir di tempat kerjanya, ia dikatakan absen. Tingkat absensi yang makin besar, dengan kata lain makin banyak tenaga kerja yang tidak masuk kerja, akan semakin menyulitkan perusahaan mencapai target produksi, misalnya tingkat absensi merupakan perbandingan antara hari-hari yang hilang dengan keseluruhan hari yang tersedia untuk bekerja, menurut Ranupandoyo (1999:34) bahwa tingkat absensi seseorang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

hari kerja yang hilang

$$\text{Tingkat Absensi} = \frac{\text{-----}}{\text{hari karyawan bekerja} + \text{hari karyawan tidak bekerja}}$$

Tingginya tingkat absensi akan merugikan perusahaan, meskipun seandainya tenaga kerja tersebut tidak dibayar sewaktu tidak masuk kerja. Kerugian ini terjadi, karena jadwal kerja terpaksa tertunda, mutu cenderung berkurang, terpaksa melakukan lembur, dan jaminan sosial juga masih harus dibayarkan.

Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk menekan tingkat absensi dan merupakan hal yang pertama-tama dikerjakan untuk mengetahui sebab-sebab absensinya karyawan. Tiap absensi dikelompokkan sesuai dengan sebab-sebabnya dan diamati polanya, untuk itu perusahaan bisa melakukan analisa dengan cara sebagai berikut:

1. **Mencatat nama karyawan yang absen.**
Sering terjadi bahwa tingkat absensi yang tinggi disebabkan oleh kelompok tenaga kerja yang sering tidak masuk kerja. Dengan demikian bila perusahaan mempunyai catatan tentang nama-nama karyawan yang sering absen, perusahaan mempunyai dasar untuk melakukan tindakan kedisiplinan.
2. **Mencatat sebab-sebab ketidakhadiran.**
Alasan yang sering terjadi adalah faktor sakit. Sebab-sebab lain biasanya tentang kesulitan transportasi (terutama di kota-kota besar), keperluan pribadi, dan menjaga anak-anak. Misalnya untuk alasan sakit, perusahaan bisa

memberi fasilitas kesehatan kepada para tenaga kerja, perusahaan memberi fasilitas jemputan untuk mengatasi persoalan transport, dan bagi perusahaan yang sudah besar dapat mendirikan tempat merawat anak-anak, agar para tenaga kerja tidak perlu merasa cemas meninggalkan anak-anak di rumah sendirian.

3. Memperhatikan kelompok umur yang sering absen.

Pada umumnya tenaga kerja dalam usia belasan tahun mempunyai kecenderungan untuk sering tidak hadir. Sedangkan bagi tenaga kerja yang cukup umur, biasanya mereka jarang tidak masuk kerja, tetapi untuk tenaga kerja golongan tua, absensinya sering dalam waktu lama, karena sebab-sebab kesehatan.

4. Kelompok jenis kelamin yang sering absen.

Kelompok tenaga kerja wanita pada umumnya cenderung sering tidak masuk dibandingkan dengan para tenaga kerja pria. Biasanya karena mereka tergolong kelompok penerima upah yang rendah, pekerjaannya dianggap tidak menyenangkan.

5. Hari-hari sering tidak masuk kerja.

Tabulasi hari-hari sering tidak masuk kerja, akan bisa memberikan pola yang sangat menarik. Biasanya hari sering tidak masuk kerja adalah hari senin atau hari sabtu, sesudah gajian atau sesudah hari libur.

6. Kondisi kerja.

Tingkat absensi mungkin juga disebabkan karena kondisi kerja yang buruk, pekerjaan yang membosankan atau alasan rekan sekerja yang kurang menyenangkan.

Setelah memperhatikan tingkat absensi, maka mungkin tidak akan lagi menarik tarik tenaga kerja yang baru, agar mereka dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana (Ranupandojo, 1999:33-35)

b. Kebutuhan-kebutuhan yang dipuaskan dengan bekerja.

Disamping bekerja, tenaga kerja harus dipuaskan dengan kebutuhan-kebutuhan, sehingga tenaga kerja dapat bekerja dengan baik, sesuai tugasnya masing-masing. Untuk itu perusahaan harus melihat kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, supaya tenaga kerja dapat bekerja secara efektif yaitu antara lain:

1. Kebutuhan psikologi dasar.

Menyangkut pemuasan kebutuhan fisik atau biologis, seperti: makan, minum, tempat tinggal atau yang sejenisnya, sebagaimana kebutuhan untuk mengamankan pemuasan kebutuhan tersebut.

2. Kebutuhan sosial

Karena manusia tergantung satu sama lainnya, maka terdapatlah berbagai kebutuhan yang hanya bisa dipuaskan apabila masing-masing individu ditolong atau diakui oleh orang lain.

3. Kebutuhan egoistik

Ini menyangkut masalah keinginan manusia untuk independen untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya dan mempunyai rasa pencapaian (*sense accomplishment*)

Kerangka Konsep Penelitian

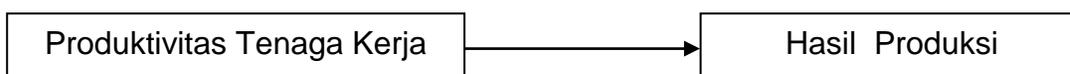
Pada umumnya dalam setiap perusahaan dapat mengatur tenaga kerjanya baik bersifat secara internal maupun eksternal. Secara internal dalam sistem penangan tenaga kerja di atur sesuai dengan sistem yang berlaku dalam perusahaan itu sendiri, sebagai hasil kesempatan bersama, bahwa dengan tetap memperhatikan tujuan dari kepentingan bersama tanpa sedikitpun merugikan atau mengorbankan hak-hak tenaga kerja dalam menjalankan roda perusahaan.

Untuk dapat menjalankan aktivitas perusahaan, perlu adanya tenaga kerja yang mampu menghasilkan (output) dalam perusahaan tersebut.

Alternatif lain yang di ambil oleh pihak perusahaan berhubungan dengan tenaga kerja, dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil adalah mengontrol tenaga kerja atau karyawan yang bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perusahaan.

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Sumber : Kreasi Penulis, 2015

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian sebagai berikut

1. Lokasi Penelitian

Untuk lebih jelasnya, lokasi penelitian dari judul yang penulis ajukan diatas adalah pada Toko Roti Ropan, Jalan Pemuda No. 60 Wamena.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari bulan April sampai dengan Juni 2015

Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Yaitu menyelidiki secara langsung dan mencatat apa yang dilihat atau diamati, dibaca, didengar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dari perusahaan secara langsung untuk memperoleh kejelasan data yang diperlukan.

c. Studi Kepustakaan

Tehnik ini dipergunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan perusahaan, karena bersifat sekunder maka perlu menggunakan referensi serta buku-buku dan dokumen lainnya sebagai bahan acuan dalam penulisan ini.

Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti maka penulis menggunakan 2 (dua) jenis dan sumber data yaitu :

1. Data Primer (data lapangan), adalah data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada obyek penelitian.

2. Data Sekunder (data kepustakaan), yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku atau literatur yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan yang menjadi titik sentral penulisan ini serta dokumen-dokumen yang ada pada Toko Roti Ropan Wamena.

Metode Analisa Data

Dalam menganalisa permasalahan, penulis menggunakan metode analisa yang meliputi :

a. Analisa Kualitatif yaitu uraian-uraian deskriptif yang ditunjukkan untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Atau dengan kata lain bahwa analisa ini merupakan penjabaran atau penjelasan-penjelasan.

b. Analisa Kuantitatif adalah analisa yang menggunakan angka-angka atau dengan menggunakan rumus. Adapun alat analisa data kuantitatif yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana yang dikutip dari **Payaman J. Simanjuntak, (1985)**.

$$\text{Produktivitas Tenaga Kerja (PTK)} = \frac{\text{Hasil Pendapatan (Output)}}{\text{Biaya Tenaga Kerja (Input)}}$$

Dimana :

PTK = Produktivitas Tenaga Kerja

Output = Hasil Pendapatan

Input = Biaya Tenaga Kerja

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Jenis-jenis Roti Manis dan Roti Tawar pada Toko Roti Ropan Wamena

Hasil produksi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana Toko Roti Ropan

menghasilkan dua macam produk yang berbeda, yaitu roti tawar dan roti manis, dimana masing-masing mempunyai jenis dan harga yang berbeda-beda, yaitu roti tawar ada 8 jenis dan roti manis ada 20 jenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Jenis-Jenis Roti Tawar
Pada Toko Roti Ropan Wamena

No.	Jenis Roti Tawar
1	Roti Tawar Putih
2	Roti Tawar Hijau
3	Roti Tawar Kismis
4	Roti Tawar Kasur Isi
5	Roti Tawar Manis Lapis
6	Roti Tawar Long Chesse
7	Roti Tawar Mocca
8	Roti Tawar Keset

Sumber: Toko Roti Ropan, 2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa ada 8 jenis roti tawar yang di produksi oleh Toko Roti Ropan Wamena, namun dari 8 jenis roti tawar yang diproduksi oleh Toko Roti Ropan Wamena, ada 2 jenis roti tawar yang sangat diminati oleh konsumen yaitu roti tawar hijau dan

roti tawar kismis, sehingga 2 jenis roti tawar ini lebih banyak diproduksi oleh Toko Roti Ropan. Disamping memproduksi 8 jenis roti tawar, Toko Roti Ropan juga memproduksi 20 jenis roti manis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Jenis-Jenis Roti Manis
Pada Toko Roti Ropan Wamena

No.	Jenis		Harga/bks
1	Roti Manis Sosis	11	Roti Manis Cokelat Pollo
2	Roti Manis Sri Kaya	12	Roti Manis Cokelat Susu
3	Roti Manis Nanas	13	Roti Manis Coklat Kacang
4	Roti Manis Durian	14	Roti Manis Vla
5	Roti Manis Ayam	15	Roti Manis Pisang Coklat
6	Roti Manis Bakso	16	Roti Manis Pisang Keju
7	Roti Manis Kelapa	17	Roti Manis Pisang Coklat Keju
8	Roti Manis Cokelat	18	Roti Manis Chesse
9	Roti Manis Keju	19	Roti Manis Chesse Cokelat
10	Roti Manis Cokelat Keju	20	Roti Manis Chesse Cokelat Pisang

Sumber: Toko Roti Ropan, 2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa ada 20 jenis roti manis yang di produksi oleh Toko Roti Ropan Wamena, namun dari 20 jenis roti manis yang diproduksi oleh Toko Roti Ropan Wamena, ada 9 jenis roti manis yang sangat diminati oleh konsumen yaitu roti manis coklat, roti manis keju, roti manis coklat keju, roti manis pisang coklat, roti manis pisang keju, roti manis pisang coklat keju, roti manis chesse, roti manis chesse coklat dan roti manis chesse coklat pisang. Dengan demikian, ada 9 jenis roti manis dari 20 jenis roti manis yang lebih banyak diproduksi oleh Toko Roti Ropan Wamena.

Pembahasan

Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja

Perkembangan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari hasil produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja, dimana hasil produksinya mengalami peningkatan atau tidak dari tahun ke tahun, yang nantinya akan berdampak pada pendapatan dan biaya tenaga kerja Toko Roti Ropan Wamena.

Hasil Produksi

Selanjutnya dapat dilihat perkembangan hasil produksi roti manis dari tahun 2010 – 2014 seperti pada tabel berikut:

Tabel 6
Perkembangan Hasil Produksi Roti Manis

Tahun	Roti Manis (buah)	%
2010	225,030	-
2011	225,050	0.009
2012	225,080	0.013
2013	225,090	0.004
2014	225,100	0.004

Sumber: Data diolah, 2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah hasil produksi roti manis dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 jumlah hasil produksi roti manis sebanyak 225.030. Tahun 2011 jumlah hasil produksi roti manis sebanyak 225.050 atau naik 0.009 persen. Tahun 2012 jumlah hasil produksi roti manis sebanyak 225.080 atau naik

0.013 persen. Kemudian pada tahun 2013 jumlah hasil produksi roti manis meningkat sebanyak 225.090 atau naik 0.004 persen. Dan pada tahun 2014 jumlah hasil produksi roti manis sebanyak 225.100 atau naik 0.004 persen sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 7
Perkembangan Hasil Produksi Roti Tawar

Tahun	Roti Tawar (buah)	%
2010	43,220	-
2011	43,240	0.046
2012	43,260	0.046
2013	43,290	0.069
2014	43,300	0.023

Sumber: Data diolah, 2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah hasil produksi roti tawar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tahun 2010 jumlah hasil produksi roti tawar sebanyak 43.220. Tahun 2011 jumlah hasil produksi roti tawar adalah sebanyak 43.240 atau 0.046 persen. Tahun 2012 jumlah hasil produksi roti tawar sebanyak 43.260 atau 0.046 persen. Kemudian pada tahun 2013 jumlah hasil produksi roti tawar meningkat lagi sebanyak 43.290

atau naik menjadi 0.069 persen. Dan pada tahun 2014 jumlah hasil produksi roti tawar sebanyak 43.300 atau naik 0.023 persen.

Dari perkembangan hasil produksi roti tawar dan roti manis yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dilihat perkembangan total hasil produksi roti tawar dan roti manis pada Toko Roti Ropan Wamena selama tahun 2010 – 2014 yang termuat dalam tabel berikut:

Tabel 8
Perkembangan Total Hasil Produksi Roti Manis dan Roti Tawar

Tahun	Roti Manis (buah)	Roti Tawar (buah)	Total	%
2010	225.030	43.220	268.250	-
2011	225.050	43.240	268.290	0,01
2012	225.080	43.260	268.340	0,02
2013	225.090	43.290	268.380	0,01
2014	225.100	43.300	268.400	0,01

Sumber: Data diolah, 2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa total hasil produksi roti tawar dan roti manis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2010 total hasil produksi roti tawar dan roti manis sebanyak 268.250. Pada tahun 2011 total hasil produksi roti tawar dan roti manis adalah sebanyak 268.290 atau naik 0.01 persen. Pada tahun 2012 total hasil produksi roti tawar dan roti manis sebanyak 268.340 atau naik lagi menjadi 0.02 persen. Kemudian pada tahun 2013 total hasil produksi roti tawar dan roti manis meningkat lagi sebanyak 268.380 atau naik menjadi 0.01 persen. Dan pada

tahun 2014 total hasil produksi roti tawar dan roti manis sebanyak 268.400 atau naik 0.01 persen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dari hasil produksi roti tawar dan roti manis seperti pada tabel di atas, maka diketahui bahwa roti manis lebih banyak diproduksi dari pada roti tawar, ini disebabkan karena konsumen lebih banyak mengkonsumsi roti manis dari pada roti tawar.

Pendapatan Roti tawar dan roti manis

Pendapatan Toko Roti Ropan Wamena tergantung pada hasil penjualan roti tawar dan roti manis, sehingga menambah pendapatan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 9
Pendapatan Roti Tawar
Tahun 2010 - 2014

Tahun	Roti Tawar (Buah)	Harga Jual per bks (Rp)	Total (Rp)
2010	43,220	10,000	432,200,000
2011	43,240	15,000	648,600,000
2012	43,260	17,500	757,050,000
2013	43,290	18,500	800,865,000
2014	43,300	20,000	866,000,000

Sumber: Data diolah, 2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2010 roti tawar yang dihasilkan sebanyak 43,220 buah dijual dengan harga Rp. 10,000, maka akan menghasilkan pendapatan per tahun sebesar Rp. 432,200,000. Tahun 2011 roti tawar yang dihasilkan sebanyak 43,240 buah dijual dengan harga Rp. 15,000, maka akan menghasilkan pendapatan per tahun sebesar Rp. 648,600,000. Tahun 2012 roti tawar yang dihasilkan sebanyak 43,260 buah dijual dengan harga Rp. 17,500, maka

akan menghasilkan pendapatan per tahun sebesar Rp. 757,050,000. Tahun 2013 roti tawar yang dihasilkan sebanyak 43.290 buah dijual dengan harga Rp. 8,500, maka akan menghasilkan pendapatan per tahun sebesar Rp. 800,865,000. Pada tahun 2014 roti tawar yang dihasilkan sebanyak 43,300 buah dijual dengan harga Rp. 20,000, maka akan menghasilkan pendapatan per tahun sebesar Rp. 866,000,000.

Tabel 10
Pendapatan Roti Manis
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Roti Manis (buah)	Harga Jual (Rp)	Total
2010	225.030	7.000	1.575.210.000
2011	225.050	7.500	1.687.875.000
2012	225.080	8.000	1.800.640.000
2013	225.090	8.500	1.913.265.000
2014	225.100	9.000	2.025.900.000

Sumber: Data diolah, 2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2010 roti manis yang dihasilkan sebanyak 225,030 buah dijual dengan harga Rp. 7,000, maka akan menghasilkan pendapatan per tahun sebesar Rp. 1,575,210,000. Tahun 2011 roti manis yang dihasilkan sebanyak 225,050 buah dijual dengan harga Rp. 7,500, maka akan menghasilkan pendapatan per tahun sebesar Rp. 1,687,875,000. Tahun 2012 roti manis yang dihasilkan sebanyak 225,080 buah dijual dengan harga Rp. 8,000, maka akan menghasilkan pendapatan per tahun sebesar

Rp. 1,800,640. Tahun 2013 roti manis yang dihasilkan sebanyak 225,090 buah dijual dengan harga Rp. 8,500, maka akan menghasilkan pendapatan per tahun sebesar Rp. 1,913,265,000. Tahun 2014 roti manis yang dihasilkan sebanyak 225,100 buah dijual dengan harga Rp. 9,000, maka akan menghasilkan pendapatan per tahun sebesar Rp. 2,025,900,000.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat perkembangan pendapatan selama tahun 2010 – 2014 seperti pada tabel berikut:

Tabel 11
Perkembangan Pendapatan Toko Roti Ropan Wamena
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Pendapatan Roti Manis (Rp)	Pendapatan Roti Tawar (Rp)	Total	%
2010	432.200.000	1.575.210.000	2.007.410.000	-
2011	648.630.000	1.687.875.000	2.336.505.000	16,39
2012	757.050.000	1.800.640.000	2.557.690.000	9,47
2013	800.865.000	1.913.265.000	2.714.130.000	6,12
2014	866.000.000	2.025.900.000	2.891.900.000	6,55

Sumber: Data diolah, 2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa total pendapatan roti tawar dan roti manis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010 total pendapatan roti tawar dan roti manis sebanyak Rp. 2,007,410,000. Tahun 2011 total pendapatan roti tawar dan roti manis adalah sebanyak Rp. 2,336,505,000 atau naik 16.39 persen. Tahun 2012 total pendapatan roti tawar dan roti manis sebanyak Rp. 2,557,690,000 atau naik lagi menjadi 9,47 persen. Kemudian pada tahun 2013 total pendapatan roti tawar dan roti manis meningkat lagi sebanyak Rp. 2,714,130,000 atau naik menjadi 6.12 persen. Dan pada tahun 2014 total pendapatan roti tawar dan roti manis sebanyak Rp. 2,891,900,000 atau naik 6.55 persen.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, total pendapatan roti tawar dan roti manis seperti pada tabel di atas, menunjukkan berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat.

Biaya Tenaga Kerja

Tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena adalah mereka yang benar-benar bekerja dengan memiliki keahlian, terutama di dalam ketiga bidang atau bagian yang ada pada Toko Roti Ropan Wamena, yaitu bidang keuangan, bidang produksi dan bidang pemasaran, sehingga setiap tenaga kerja diberi upah sesuai dengan hasil pekerjaannya. Adapun perkembangan biaya tenaga kerja yang dimiliki oleh Toko Roti Ropan Wamena adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Perkembangan Biaya Tenaga Kerja
Toko Roti Ropan Wamena
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	%
2010	151,200,000	-
2011	156,000,000	3.17
2012	171,600,000	10.00
2013	179,400,000	4.55
2014	187,200,000	4.35

Sumber: Data diolah, 2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah biaya tenaga kerja dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tahun 2010 jumlah biaya tenaga kerja sebanyak Rp 151,200,000 atau naik 3.56 persen. Tahun 2011 jumlah biaya tenaga kerja sebanyak Rp. 156,000,000 atau naik 3.17 persen. Tahun 2012 jumlah biaya tenaga kerja sebanyak Rp. 171,600,000 atau naik lagi menjadi 10.00 persen. Kemudian pada tahun 2013 jumlah biaya tenaga kerja kembali meningkat lagi sebanyak Rp. 179,400,000 atau naik menjadi 4.55 persen. Dan

pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja sebanyak Rp. 187,200,000 atau naik 4.35 persen.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dengan meningkatnya biaya tenaga kerja, berarti jumlah produktivitas juga semakin meningkat, dimana setiap tenaga kerja dapat menghasilkan produk dari tahun ke tahun yang cukup banyak.

Perhitungan Produktivitas Tenaga Kerja

Berdasarkan formula produktivitas Tenaga Kerja yang dikemukakan oleh Payaman J. Simanjuntak, (1985), yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan penelitian, maka dapat dihitung

besarnya produktivitas tenaga kerja Toko Roti Ropan Wamena sebagai berikut:

Tabel 13
Perkembangan Produktivitas Tenaga Kerja
Toko Roti Ropan Wamena
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	Hasil Pendapatan (Rp)	Produktivitas Tenaga Kerja (%)
2010	151,200,000	2,007,410,000	13.277
2011	156,000,000	2,336,525,000	14.978
2012	171,600,000	2,557,690,000	14.905
2013	179,400,000	2,714,130,000	15.129
2014	187,200,000	2,891,900,000	15.448
Rata-Rata			14.747

Sumber: Data diolah, 2015

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa:

- Pada tahun 2010 jumlah produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena adalah sebesar 13,277 persen. Angka ini menunjukkan bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan bagi tenaga kerja pada dua jenis roti yang berbeda, maka tenaga kerja tersebut akan menghasilkan pendapatan sebesar 13,277 kali dari pengorbanan yang dikeluarkan secara keseluruhan.
- Pada tahun 2011 jumlah produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena adalah sebesar 14,978 persen. Angka ini menunjukkan bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan bagi tenaga kerja pada dua jenis roti yang berbeda, maka tenaga kerja tersebut akan menghasilkan pendapatan sebesar 14.978 kali dari pengorbanan yang dikeluarkan secara keseluruhan.
- Pada tahun 2012 jumlah produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena adalah sebesar 14,905 persen. Angka ini menunjukkan bahwa produktivitas pada tahun 2012 menurun, ini disebabkan karena peralatan yang digunakan di dalam pembuatan roti yang sudah tidak layak digunakan, hal ini akan mempengaruhi kerja karyawan dan akan berdampak pada produktivitas.
- Pada tahun 2013 jumlah produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena adalah sebesar 15,129 persen. Angka ini menunjukkan bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan bagi tenaga kerja pada dua jenis roti yang berbeda, maka tenaga kerja tersebut akan menghasilkan pendapatan sebesar 15.129 kali dari pengorbanan yang dikeluarkan secara keseluruhan.

- Pada tahun 2014 jumlah produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena adalah sebesar 15,448 persen. Angka ini menunjukkan bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan bagi tenaga kerja pada dua jenis roti yang berbeda, maka tenaga kerja tersebut akan menghasilkan pendapatan sebesar 15.448 kali dari pengorbanan yang dikeluarkan secara keseluruhan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, sehingga rata-rata produktivitas tenaga kerja selama 5 tahun adalah sebesar 14,747 persen.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja

Di dalam meningkatkan usahanya, Toko Roti Ropan Wamena selalu melihat kembali hasil kerja dari para karyawan. Dan untuk meningkatkan produktivitas karyawan, pimpinan Toko Roti Ropan Wamena melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah:

1. Magang (*Understudy Training*)

Program ini dibuat kepada para karyawan yang baru di terima bekerja pada Toko Roti Ropan Wamena supaya dilatih guna mengembangkan keterampilannya di dalam melakukan pekerjaan yang diberikan. Di sini, para karyawan belajar bagaimana menggunakan peralatan yang dipakai untuk pembuatan roti yang lebih modern, juga belajar membuat roti yang lebih cepat dalam waktu yang singkat dengan hasil akhir yang lebih memuaskan dan berkualitas.

2. Studi Banding

Setiap karyawan diberikan kesempatan untuk mengikuti studi banding dengan perusahaan-perusahaan roti yang dianggap cukup mapan

dalam usahanya, agar dapat menimbah ilmu dan pengalaman dari kegiatan studi banding. Studi banding dilakukan di Jakarta, Bandung dan Surabaya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- Perkembangan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari hasil produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja, dimana hasil produksinya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang berdampak pada pendapatan dan biaya tenaga kerja Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, sehingga rata-rata produktivitas tenaga kerja selama 5 tahun adalah sebesar 14,747 persen.
- Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada Toko Roti Ropan Wamena, antara lain: **Magang (Understudy Training)** dan **Studi Banding**

Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan, adalah:

- Diharapkan Toko Roti Ropan Wamena dapat meningkatkan produktivitasnya dengan menambah karyawan (tenaga kerja) yang profesional sesuai dengan bidang keahliannya.
- Toko Roti Ropan Wamena juga dapat memperkaya menu roti sesuai dengan kebutuhan konsumen.
- Dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, maka perlu adanya kesesuaian antara harga barang dan kualitas barang, sehingga perlu adanya peralatan yang sempurna, sehingga dapat memproduksi hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilian Tomas, (2009), *Jurnal Teknik, Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Struktur Rangka Atap Baja (Studi Kasus Proyek Pembangunan RSUD. Dr. Moewardi Surakarta Jawa Tengah)*
- Agus Dharman, 1991, *Manajemen Prestasi Kerja CV. Rajawali, Jakarta*
- B. Vander Near, (disadur oleh: J.C.T. Simorangkir), 1975, *Ekonomi Perusahaan*, Cetakan ke-5, Pradya Paramita, Jakarta
- Basir Barto, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bina Aksara Jakarta
- Djati, Sundring Pantja (2004), *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 1.1: pp-22, "Pengaruh

variabel-variabel motivasi terhadap produktivitas tenaga kerja karyawan pada industri rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo."

- Handoko, Hani T., 1993, *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasional*, BPFE, Yogyakarta
- Kartini, Sjahril, 1995, *Pasar Tenaga Kerja Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Muchdarsyah Sinungan (2000:203), *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Mulyadi S., 2003, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Payaman Simanjuntak (1985:1-4), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE Yogyakarta.
- Pringodigdo, A. G. Dan Hassan Shadily, 1973, *Ensiklopedia Umum*, Yayasan Dana Buku Franklin, Jakarta
- Pujotomo, Darminto, Haryo Santoso, and Halimah Nursanti (2008), *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, "Analisis Pengukuran Produktivitas Pada Cv. Citra Jepara Furniture."
- Ranupandojo, dkk., 1999, *Manajemen Personalial*, BPFE Yogyakarta.
- Ravianto (1986), *Produktivitas Tenaga Kerja*, BPFE Yogyakarta.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 1977, *Manajemen Produksi dan Operasional*, Jilid I, BPFE Yogyakarta
- S.P. Siagian (1984:36), *Perilaku Organisasi*, Gratia Ilmu, Yogyakarta
- Simanjuntak, J. Payaman, 1985, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja*, FEUI, Jakarta
- Sinungan, Muchdasyah, 2000, *Produktivitas : Apa dan Bagaimana*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sonny Suwarsono, 2003, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Gratia Ilmu, Yogyakarta
- Sri Budi Cantika, Yuli, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Universitas Muhammadiyah, Malang
- Sulitiani dan Rosidah (2000:209), *Produktivitas Tenaga Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Vernon A. Musselman dan John H. Jackson (1996:25), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE. Yogyakarta.

**PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA
STASION PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) KOTARAJA
KOTA JAYAPURA**

Dani Melmambessy

Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU Kotaraja Kota Jayapura. Hasil penelitian dibuktikan dengan beberapa uji statistik yang menunjukkan bahwa: 1) hasil persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = 0,054 + 0,977X$. Dari persamaan regresi linear sederhana tersebut mengandung arti bahwa variabel kualitas layanan (X) sebesar 0,977 menunjukkan bahwa setiap kali peningkatan kualitas layanan, akan berdampak positif terhadap peningkatan kepuasan pelanggan pada SPBU Kotaraja Kota Jayapura sebesar 0,977. 2) nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,977 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat atau hampir sempurna antara variabel kualitas layanan terhadap variabel kepuasan pelanggan, 3) hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,954 artinya bahwa variabel kualitas layanan mampu menerangkan atau mempengaruhi variabel kepuasan pelanggan sebesar 0,954 atau 95,4% sedangkan sisanya 0,046 atau 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 4) nilai t hitung variabel kualitas layanan $31,443 > t$ tabel $2,0106$ dengan nilai signifikansi $0,00 < \alpha < 0,05$.

Kata kunci; *Kualitas layanan dan kepuasan.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi semakin berkembang sehingga membuat perusahaan-perusahaan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Semuanya ini dilakukan agar perusahaan lebih kompetitif dari perusahaan lainnya. Dalam lingkungan persaingan yang begitu ketat dengan hadirnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang sejenis sehingga menyebabkan banyak-banyaknya pilihan-pilihan maka perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memenuhi kepuasan konsumen agar konsumen tetap loyal terhadap penggunaan produk atau jasa yang diinginkan maka perusahaan perlu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen sehingga dapat menciptakan keunggulan bersaing. Dalam meningkatkan loyalitas pelanggan maka tanggungjawab seorang manajer perusahaan tidak ringan. Karena ketidakpercayaan seorang pelanggan merupakan pertanda bahwa pelanggan melihat ada kurangnya pelayanan yang diberikan kepada pelanggan secara baik sehingga akan berdampak terhadap penerimaan perusahaan. Karena untuk mendapatkan seorang pelanggan membutuhkan biaya.

Kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian pelanggan terhadap tingkat pelayanan yang

dipersiapkan dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Kualitas pelayanan akan dihasilkan oleh operasi yang dilakukan oleh perusahaan yang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu sumberdaya manusia, sistem teknologi yang digunakan. Pada umumnya semakin loyal seorang pelanggan kepada perusahaan, maka semakin berharga pelanggan tersebut. Para pelanggan yang loyal biasanya mengajak pelanggan yang baru untuk menggunakan jasa pelayanan perusahaan tersebut.

Perusahaan yang bergerak dalam bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan salah satu jenis bisnis yang sangat kompetitif dalam memenuhi kebutuhan konsumen meliputi pengisian premium, solar, oli dan lain-lain. Karena begitu ketatnya persaingan bisnis SPBU maka, dalam rangka mempertahankan kepuasan pelanggan maka, manajemen perlu memperhatikan kualitas layanan kepada konsumen.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Raya Abepura merupakan salah satu jenis SPBU yang berada di Kota Jayapura guna melayani konsumen yang membutuhkan pelayanan premium, solar, oli, partamaks dan lain-lain. SPBU Kotaraja melayani pelanggan kendaraan roda dua dan empat yang berasal dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dimana jumlah pelanggan pada tiga Tahun terakhir yaitu dari Tahun 2013 s/d 2015 tidak mengalami peningkatan tetapi sedikit menurun dari Tahun 2014.

Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan kajian yang mendalam tentang kegiatan bisnis pada SPBU Kotaraja Jayapura.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dalam suatu kajian penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kotaraja Kota Jayapura.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kotaraja Kota Jayapura?”

METODE ANALISIS DATA

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan metode analisis data yaitu menggunakan pendekatan analisis statistik dengan alat bantu program SPSS dengan metode analisis regresi linear sederhana yang formulasinya menurut Sugiono (2003:234)

$$Y = a + b X$$

Dimana :

Y :Kepuasan Pelanggan

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

X : Kualitas Layanan

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan merupakan keseluruhan berbagai ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang telah ditentukan atau yang bersifat laten. Berbagai karakteristik jasa diatas, dianggap penting dalam menentukan kualitas jasa dan layanan. Oleh karena itu Parasuraman et al (1988) menyarankan tiga tema pokok dalam menentukan kualitas jasa, yaitu sebagai berikut .

- a. Bagi konsumen, kualitas jasa adalah lebih sulit diukur dibandingkan dengan kualitas barang.
- b. Kualitas jasa adalah hasil pertandingan antara apa yang diharapkan konsumen dengan kinerja yang diterima.
- c. Evaluasi terhadap jasa bukan hanya pada hasil jasa semata, melainkan juga mencakup evaluasi terhadap proses pengirimannya (delivery process)

Zeithaml yang dikutip oleh Umar (2000), mengemukakan lima dimensi dalam menentukan kualitas jasa, yaitu sebagai berikut .

- a. *Reliability*, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan.
- b. *Responsiveness*, yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi : kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, dan penanganan keluhan pelanggan.
- c. *Assurance*, meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas keramahan tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberi pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi keterampilan dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Dimensi kepastian atau jaminan ini merupakan gabungan dari dimensi
 1. kompetensi (*competence*), artinya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan untuk melakukan pelayanan.
 2. kesopanan (*Courtesy*), yang meliputi keramahan, perhatian dan sikap para karyawan dan
 3. kredibilitas (*credibility*), meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan, seperti reputasi, prestasi dan sebagainya.
- d. *Emphaty*, yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Dimensi Emphaty ini merupakan penggabungan dari tiga dimensi, yaitu sebagai berikut .
 1. Akses (*access*), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan perusahaan.
 2. komunikasi (*communication*), merupakan kemampuan melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan atau cara memperoleh masukan dari pelanggan.
 3. Pemahaman pada pelanggan (understanding the consumer), meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan.
- e. *Tangibles*, meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan front office,

tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan karyawan.

Bitner et al. (1994), melalui penelitiannya menyatakan bahwa jasa merupakan keseluruhan kesan konsumen terhadap inferioritas atau superioritas organisasi beserta jasa yang ditawarkannya. Sementara itu Cronin dan Taylor (1992) menyatakan bahwa untuk memperkirakan kualitas dari suatu perusahaan, sampai saat ini belum ada penelitian yang dinilai objektif, akan tetapi biasanya dengan mengukur kinerja dari jasa yang dikonsumsi oleh konsumen.

Kualitas layanan merupakan perbandingan antara apa yang diharapkan konsumen dengan kinerja layanan yang mereka terima. Hal inilah yang dikatakan oleh Taylor dan Baker (1994) sebagai Gap Theory pendapat yang sama dikemukakan oleh Parasuraman et al (1991) yang kemudian mengembangkan sebuah model yang merupakan dasar dari skala SERVQUAL (*service Quality*). Model ini didasarkan pada pengertian, bahwa kualitas layanan adalah bentuk persepsi konsumen atas jasa yang diterima. Perbedaan antara harapan konsumen terhadap kinerja atas layanan secara umum terhadap kinerja yang diterima akan mengarahkan persepsi konsumen terhadap kualitas jasa tertentu.

Parasuraman et al (1991, P.240) mengemukakan model kualitas layanan yang menyoroti beberapa syarat untuk memberikan kualitas layanan yang diharapkan. Dalam penelitian tersebut, diidentifikasi 5 (lima) kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan penyampaian layanan yaitu

- a. kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen, disini manajemen tidak selalu memahami benar yang menjadi keinginan langganan
- b. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas layanan, disini manajemen mungkin benar dalam memahami keinginan pelanggan tetapi tidak menetapkan standar pelaksanaan yang spesifik
- c. Kesenjangan antar spesifikasi kualitas layanan dan penyampaian layanan, dimana para personil mungkin tidak terlatih baik dan mampu memenuhi standar
- d. Kesenjangan penyampaian layanan dan komunikasi eksternal bahwa harapan konsumen dipengaruhi oleh pertanyaan yang dibuat para wakil dan iklan perusahaan.
- e. Kesenjangan antara layanan yang diterima dan layanan yang diharapkan, hal ini terjadi bila konsumen mengukur kinerja perusahaan dengan

cara yang berbeda dan memiliki persepsi yang keliru mengenai kualitas layanan.

Dari beberapa batasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa kualitas layanan, seperti yang diterima atau dirasakan oleh konsumen, berasal dari perbandingan apa yang dirasakan perusahaan jasa tawarkan dengan persepsi mereka atas kinerja perusahaan yang menyediakan jasa.

Kelima kesenjangan tersebut diatas akan sangat membantu pihak manajemen untuk menentukan jenis layanan yang berkualitas yang akan diberikan kepada pelanggannya. Karena kegiatan pemasaran yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, akan memunculkan perasaan puas pada konsumen.

Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa hubungan antara kualitas layanan terhadap keuntungan tidak bersifat langsung atau dengan kata lain diperlukan variabel antara *behavioral intentions*. Oleh karena itu fokus perhatian pada penelitian ini hanya mencoba menghubungkan antara keduanya, yaitu perilaku yang ditunjukkan oleh pelanggan sebagai akibat kualitas layanan yang telah diterimanya.

Kepuasan Pelanggan

Banyak perusahaan yang pada saat ini mempunyai tujuan untuk memuaskan pelanggan. Mereka memiliki cara pengungkapan yang beraneka ragam untuk segala sesuatu seperti yang diharapkan setiap pelanggan. Situasi ini tidak hanya terjadi pada sektor swasta tetapi juga pada sektor pemerintah. Semakin disadari bahwa adanya pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan.

Definisi kepuasan/ketidakpuasan pelanggan menurut Day (1984) dalam Fandy Tjiptono.dkk (2005:197) adalah "respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (*disconfirmation*) yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya". Engel (1990) dan Fandi Tjiptono (1996:146) mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (*outcome*) sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan.

Sedangkan Wilkie (1990) dalam Fandy Tjiptono (1995:24) mendefinisikan sebagai "suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa".

Sedangkan Kotler (1997) dalam Fandy Tjiptono (1995:24) mendefinisikan sebagai "suatu

produk dan harapan-harapannya. Irawan (2002:2) berpendapat seorang pelanggan yang puas adalah pelanggan yang merasa mendapatkan value dari pemasok, produsen atau penyedia jasa. Value ini bisa berasal dari produk, pelayanan, sistem atau sesuatu yang bersifat emosi.

Menurut Engel, dalam Rustika (Skripsi UMS, 2009:30) Kepuasan adalah evaluasi paska konsumsi untuk memilih beberapa alternatif dalam rangka memenuhi harapan. Kotler, dalam Rustika (Skripsi UMS, 2009:30) menyatakan bahwa perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil dari suatu produk dan harapan-harapannya. Menurut Supranto, dalam Rustika (Skripsi UMS, 2009:30) istilah kepuasan pelanggan merupakan label yang digunakan oleh pelanggan untuk meringkas suatu himpunan aksi atau tindakan yang terlihat, terkait dengan produk atau jasa. Contohnya bila seorang pelanggan tersenyum saat melihat produk atau jasa yang sedang dipromosikan maka seseorang itu telah merasakan kepuasan pada produk atau jasa yang dilihat.

Dipertegas oleh Kotler, dalam Rustika (Skripsi UMS, 2009:31) yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan yaitu tingkatan dimana anggapan kinerja (*perceived performance*) produk akan sesuai dengan harapan seorang pelanggan. Bila kinerja produk jauh lebih rendah dibandingkan harapan pelanggan, pembelinya tidak puas. Sebaliknya bila kinerja sesuai dengan harapan atau melebihi harapan, pembelinya merasa puas atau merasa amat gembira. Seiring dengan pendapat diatas, Purnomo dalam Rustika (Skripsi UMS, 2007:31) mengartikan kepuasan pelanggan sebagai "Perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang diharapkan". Maksudnya bahwa kepuasan pelanggan tercipta jika pelanggan merasakan output atau hasil pekerjaan sesuai dengan harapan, atau bahkan melebihi harapan pelanggan.

Oliver, dalam Eka Wulandari (Skripsi UNS, 2007:21) menyatakan kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhan yang berarti bahwa penilaian pelanggan atas barang atau jasa memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan yang tidak sesuai harapan atau pemenuhan yang melebihi harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah rangkuman kondisi psikologis yang dihasilkan ketika emosi yang mengelilingi harapan yang tidak cocok dilipat gandakan oleh perasaan-perasaan yang terbentuk dalam pelanggan tentang pengalaman pengonsumsi (Peter dan Olson, dalam Eka Wulandari ; Skripsi UNS, 2007:21).

Definisi kepuasan pelanggan juga dipaparkan oleh Tse dan Wilson, dalam Rani Handayani (Skripsi UNDIP, 2009:28) bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian. Artinya bahwa pelanggan akan merasa puas bila hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan sebaliknya pelanggan akan merasa tidak puas bila hasilnya tidak sesuai dengan harapan, sebagai contoh seorang pelanggan puas dengan kinerja sebuah bank maka pelanggan tersebut akan terus menabung maka sebaliknya bila tidak puas maka akan menutup rekening di bank tersebut dan pindah ke bank yang lain.

Sesuai dengan pendapat Kuswandi, dalam Rani Handayani (Skripsi UNDIP, 2009:28) kepuasan pelanggan yaitu perbedaan antara harapan pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap apa yang diberikan perusahaan. Menurut Amir, dalam Rani Handayani (Skripsi UNDIP, 2009:28) kepuasan pelanggan adalah sejauh mana mamfaat sebuah produk dirasakan (*perceived*) sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Kemudian secara sederhana kepuasan pelanggan adalah sebuah produk atau jasa yang dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, biasanya pelanggan merasa puas (Gerson, dalam Rani Handayani ; Skripsi UNDIP, 2009:29), contohnya seorang pelanggan akan selalu membeli di toko A karena semua kebutuhan atau harapannya.

Dari berbagai pendapat yang dilontarkan para ahli bisa disimpulkan definisi kepuasan pelanggan adalah respon dari perilaku yang ditunjukkan oleh pelanggan dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Apabila hasil yang dirasakan dibawah harapan, maka pelanggan akan kecewa, kurang puas bahkan tidak puas, namun sebaliknya bila sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas dan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan

Kepuasan pelanggan harus disertai dengan pemantauan terhadap kebutuhan dan keinginan yang bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang diungkap oleh Cravens, dalam Eka Wulandari (Skripsi UNS, 2007:28) ada beberapa faktor kepuasan pelanggan, yaitu:

1. Sistem Pengiriman

Memindahkan produk dari produsen ke pelanggan atau pemakai akhir dalam bisnis biasanya meliputi saluran distribusi dari para pemasok,

pabrikan dan para perantara. Untuk dapat memuaskan pelanggan, jaringan ini harus berfungsi sebagai unit yang terpadu dan terkoordinir, di mana semua anggotanya mengerti dan menanggapi kebutuhan dan keinginan pelanggan.

2. Performa Produk atau Jasa
Performa dan keunggulan suatu produk atau jasa sangatlah penting dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan, yang bisa disebut sebagai hal utama dalam bersaing.
3. Citra
Citra dan merek perusahaan yang baik merupakan keunggulan bersaing yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan dari sudut positif. Terbentuknya citra merek (*brand image*) dan nilai merek (*brand equity*) adalah pada saat pelanggan memperoleh pengalaman yang menyenangkan dengan produk.
4. Hubungan Harga – Nilai
Pelanggan menginginkan nilai yang ditawarkan merek sesuai dengan harga yang diberikan, oleh karenanya terdapat hubungan yang menguntungkan antara harga dan nilai. Merek dipromosikan oleh perusahaan sebagai suatu nilai yang unik sesuai harganya. Di lain pihak, manajemen memutuskan untuk bersaing atas dasar harga rendah di antara merek-merek dimana para pembeli sudah menetapkan nilai yang seimbang.
5. Kinerja atau Prestasi Kerja Karyawan
Kinerja produk dan sistem pengiriman tergantung pada bagaimana semua bagian organisasi bekerjasama dalam proses pemenuhan kepuasan pelanggan. Setiap orang dalam organisasi mempengaruhi pelanggan, baik hal-hal yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan.
6. Persaingan
Kelemahan dan kekuatan para pesaing juga mempengaruhi kepuasan pelanggan dan merupakan peluang untuk memperoleh keunggulan bersaing. Pesaing yang spesifik menimbulkan dampak baik atau buruk dalam rangka memenuhi keinginan segmentasi pasar. Mengetahui kesenjangan (*gap*) antara keinginan pembeli dengan tawaran yang diberikan para pesaing merupakan peluang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Menurut Lupiyodi, dalam Eka Wulansari (Skripsi UNS, 2007:29) ada lima faktor utama yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepuasan pelanggan, yaitu

- a. Kualitas Produk

Pelanggan akan puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.

- b. Kualitas Pelayanan
Pelanggan akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan harapan.
- c. Emosional
Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum bila seseorang menggunakan produk yang bermerek dan cenderung mempunyai kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial yang membuat pelanggan menjadi puas dengan merek tertentu.
- d. Harga
Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya.
- e. Biaya
Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut.

Menurut Wasiyati dan Hastono, dalam Eka Wulansari (Skripsi UNS, 2007:31) faktor-faktor kepuasan pelanggan bisa di lihat dari desain suatu produk atau jasa, yaitu :

- a. Desain tersebut mengirimkan “pesan” kepada pelanggan mengenai nilai dasar organisasi, khususnya mengenai trade off antara kos dan pelanggan.
- b. Desain dapat meningkatkan atau membatasi kemampuan organisasi untuk tetap mempertahankan pelanggan agar senang selama dan setelah penjualan. Suatu desain yang kuat, sukses meningkatkan kepercayaan front line staff, sementara desain yang buruk membuat mereka bersikap membela diri.

Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh beberapa fakto-faktor berikut:

(Kuswadi, dalam Eka Wulansari ; Skripsi UNS, 2004:32)

- a. Mutu produk atau jasa.
Yaitu mengenai mutu produk atau jasa yang lebih bermutu dilihat dari fisiknya.
- b. Mutu pelayanan
Berbagai jenis pelayanan akan selalu dikritik oleh pelanggan, tetapi bila pelayanan memenuhi harapan pelanggan maka secara tidak langsung pelayanan dikatakan bermutu. Contohnya,

pelayanan pengaduan pelanggan yang segera diatasi atau diperbaiki bila ada yang rusak.

- c. **Harga**
 Harga adalah hal yang paling sensitif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan akan cenderung memilih produk atau jasa yang memberikan penawaran harga lebih rendah dari yang lain.
- d. **Waktu Penyerahan**
 Maksudnya bahwa baik pendistribusian maupun penyerahan produk atau jasa dari perusahaan bisa tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- e. **Keamanan**
 Pelanggan akan merasa puas bila produk atau jasa yang digunakan ada jaminan keamanannya yang tidak membahayakan pelanggan tersebut.

Kesimpulan dari beberapa pendapat ahli diatas, teori yang paling lengkap untuk menguloas faktor-faktor kepuasan pelanggan adalah menurut Lupiyoadi, dalam Eka Wulansari (Skripsi UNS, 2007 : 33) yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga dan biaya.

HASIL PENELITIAN
Diskripsi Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan SPSS maka dapat diketahui tanggapan responden mengenai kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU Kotaraja dapat dilihat pada diskripsi variabel sebagai berikut:

a. Kualitas Layanan (X)

Berikut ini adalah presepsi responden terhadap kualitas layanan pada SPBU Kotaraja dapat dilihat pada tabel berikut in

Presepsi Responden Terhadap Kaulalitas Layanan pada SPBU Kotaraja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	2,0	2,0	2,0
2,00	2	4,0	4,0	6,0
3,00	8	16,0	16,0	22,0
4,00	23	46,0	46,0	68,0
5,00	16	32,0	32,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Sumber : data dioleh 2016

Dari prespsi responden diatas maka dapat dikatakan bahwa sebanyak 23 orang atau 46% menyatakan setuju bahwa kualitas layanan SPBU Kotaraja terhadap pelanggan yang mengisi bahan bakar dapat dikatakan sudah baik karena telah tersedia berbagai fasilitas, peralatan, karyawan serta karyawan mampu melayani, tanggap dan bersifat ramah terhadap pelanggan.

b. Kepuasan Pelanggan (Y)

Presepsi responden tentang bagaimana harapan yang diinginkan oleh pelanggan itu dapat terwujud atau merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh pada SPBU Kotaraja terhadap pelanggan yang mengisi bahan bakar minyak,dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Presepsi Responden terhadap Kepuasan akibat layanan Pada SPBU Kotaraja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,00	1	2,0	2,0	2,0
2,00	2	4,0	4,0	6,0
3,00	9	18,0	18,0	24,0
4,00	23	46,0	46,0	70,0
5,00	15	30,0	30,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Sumber : data dioleh 2016

Dari prespsi responden diatas maka dapat dikatakan bahwa sebanyak 23 orang atau 46% menyatakan

setuju bahwa mereka menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang

melakukan pengisian bahan bakar pada SPBU

Analisis Regresi

Untuk membuktikan apakah variabel kualitas layanan (X) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan (Y) maka digunakan uji statistik yaitu persamaan regresi

Kotaraja.

linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS maka dapat diketahui hasil persamaan regresi sebagai berikut:

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,054	,128		,423	,674
	Kualitas Layanan	,977	,031	,977	31,443	,000

a Dependent Variable: Kepuasan

Sumber data : diolah, 2016

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS pada tabel 9 diatas maka persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini sebagai berikut: $Y = 0,054 + 0,977X$. Dari persamaan regresi linear sederhana tersebut mengandung arti bahwa:

Nilai konstanta 0,054 yang menunjukkan bahwa jika variabel kualitas layanan sebagai variabel bebas sama dengan nol (0) maka variabel terikat kepuasan pelanggan sebesar 0,054.

Koefisien regresi variabel kualitas layanan (X) sebesar 0,977 menunjukkan bahwa setiap kali

peningkatan kualitas layanan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kepuasan pelanggan pada SPBU Wxpo Waena sebesar 0,977.

Analisis Koefisien Korelasi (r)

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS maka dapat diketahui korelasi atau hubungan variabel kualitas layanan (X) terhadap kepuasan pelanggan (Y) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,977(a)	,954	,953	,19883

a Predictors: (Constant), Kualitas Layanan

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan data pada table diatas maka dapat diketahui bahwa koefisien korelasi atau hubungan (r) sebesar 0,977 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel kualitas layanan terhadap variabel kepuasan pelanggan.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan data pada tabel 10 diatas maka dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,954 artinya bahwa variabel kualitas layanan mammpu menerangkan atau mempengaruhi variabel

kepuasan pelanggan sebesar 0,954 atau 95,4% sedangkan sisanya 0,046 atau 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji t

Uji statistic ini bertujuan untuk membuktikan apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan maka dilakukan uji t. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS maka dapat diketahui hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini

Coefficients(a)						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,054	,128		,423	,674
	Kualitas Layanan	,977	,031	,977	31,443	,000

a Dependent Variable: Kepuasan
 Sumber, Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil olah data pada tabel di atas maka dapat diketahui nilai t hitung untuk variabel kualitas layanan sebesar 31,443 dengan tingkat kesalahan α 5%, (n-k) atau (50-2)= 48 maka nilai t tabel sebesar 2,0106. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel kualitas layanan 31,443 > t tabel 2,0106 dengan nilai signifikansi $0,00 < \alpha 0,05$. Dengan demikian diduga bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan terbukti.

Hasil penelitian ini juga mendukung beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam memberikan pelayanan harus memperhatikan aspek kualitas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Menurut Goetsh dan Davis (dalam Tjiptono, 2003): kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada SPBU Kotaraja. Hasil penelitian dibuktikan dengan beberapa uji statistik yang menunjukkan bahwa:

1. Hasil persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = 0,054 + 0,977X$. Dari persamaan regresi linear sederhana tersebut mengandung arti bahwa variabel kualitas layanan (X) sebesar 0,977 menunjukkan bahwa setiap kali peningkatan kualitas layanan, akan berdampak positif terhadap peningkatan kepuasan pelanggan pada SPBU Kotaraja sebesar 0,977.
2. Nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,977 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat atau hampir sempurna antara variabel kualitas layanan terhadap variabel kepuasan pelanggan.
3. Hasil koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,954 artinya bahwa variabel kualitas layanan mampu menerangkan atau mempengaruhi variabel kepuasan pelanggan sebesar 0,954 atau 95,4% sedangkan sisanya 0,046 atau 4,6% dipengaruhi

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini maka, penulis dapat menyarankan penelitian sebagai berikut:

1. Persepsi pelanggan terhadap pelayanan pada SPBU Kotaraja sudah dapat memuaskan pelanggan, untuk itu diharapkan agar kualitas layanan yang sudah baik terus ditingkatkan, karena terdapat banyak pesaing untuk usaha SPBU di Kota Jayapura.
2. Diharapkan kepada pengelola agar pelayanan pengisian bahan bakar dapat berjalan dengan lancar dan tertib maka, perlu memperhatikan antrian kendaraan roda dua dan empat sesuai jalur dan tempat pengisian masing-masing kendaraan agar waktu antrian pengisian lebih cepat dan tidak terjadi kemacetan.

DAFTAR PUSTAKA

Handoko, T. Hani, 1984. *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, Liberty, Yogyakarta.

Basu. S 1999. *Loyalitas Pelanggan, Sebuah Kajian Konseptual. Sebagai Panduan bagi peneliti*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. 1999 Bo. 14. No. 3, 73-88.

Imam Gozali, 2004. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,

Irawan, H, 2007, *Prinsip Kepuasan Pelanggan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Jay Heizer dan Barry R. 2006. *Manajemen Operasi*, Edisi Ketujuh. Salemba Empat. Jakarta.

Junaidi, Shellyana dan Basu Swasta Dharmmesta, 2002, *Pengaruh Ketidakpuasan Konsumen, Karakteristik Kategori Produk, dan Kebutuhan Mencari Variasi terhadap Keputusan Pemindahan Merek*, Jurnal Ekoomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 17 No. 1 pp. 91-94

Kotler., and Armstrong, 2005, *Manajemen Pemasaran Edisi Kesebelas*, Diterjemahkan oleh

- Benyamin Molan . Jilid 1 dan 2. Indeks.
Jakarta
- Kotler, P. and Keller, K.L. 2007. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Keduabelas, Jilid 1, Terjemahkan Benyamin Molan, Indeks, Jakarta
- Kotler, P, 2000. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Keduabelas, Jilid 1, Terjemahkan Benyamin Molan, Indeks, Jakarta
- Lamb, Jr., Hair Jr., Mc. Daniel. 2001. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Pertama. Diterjemahkan oleh David Octaveria. Salemba Empat. Jakarta
- Nazir Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan Kelima. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Parasuraman, Valeri A. Zeithaml, and Leonard L Berry, A. *Conceptual Model of Service L. and Its Implications for Future Research* , *Journal of Marketing*, No. 49 (Fall), 1985, PP 41 – 50
- Sadi., 2009, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan Tahu Bakso Ibu Pudji, Ungaran Semarang, Pascasarjana Dipnegoro, Semarang.
- Soedarmayanti, 2005, *Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Staton, W., 1993, *Prinsip Pemasaran*, Edisi Ketujuh, Jilid 1, Erlangga Jakarta.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit CV. Alfabet Bandung.
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta Bandung.
- Umar Uzein, 2001. *Studi Kelayakan Bisnis*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta
- Umar Uzein, 2003, *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi Kedua, Gramedia Pustaka Umum. Jakarta

**ANALISIS TINGKAT LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS CABANG WAENA KOTA JAYAPURA**

Elius Heluka

Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk 1) Menganalisis Tingkat Likuiditas dan Profitabilitas terhadap kinerja keuangan; Sebab PT. Pos Indonesia yang merupakan bagian dari industry, selain industry PT.Pos Indonesia juga sebagai Perusahaan Internasional maka harus menunjukkan kinerja yang optimal dalam rangka mendukung sepenuhnya pembiayaan pembangunan daerah selain itu dengan adanya; 2) Menganalisis laporan keuangan dapat diketahui prestasi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun dan hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini dilakukan menggunakan Metode Analisis Rasio Likuiditas dan Profitabilitas pada perusahaan PT.POS Indonesia (Persero) Kantor Pembantu Cabang Waena, Kota Jayapura sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa PT. POS) Kantor Pembantu Cabang Waena, Kota Jayapura memiliki kinerja keuangan yang lebih baik pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Meski mengalami penurunan ditinjau dari Rasio Lancar, Rasio Kas dan Return of Asset, Operating Profit Margin pada tahun 2014-2016, maka perusahaan perlu menekan biaya usaha dan pengelolaan modal secara efisien.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Likuiditas Profitabilitas, Rasio Lancar, Rasio Kas dan Gross Profit Margin, Net Profit Margin.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seperi halnya perusahaan lain meningkatkan profil merupakan tujuan utama bagi PT. Pos Indonesia (Persero). Selama ini kinerja keuangan perusahaan dikatakan berjalan baik tau sebaliknya hanya dengan melihat perbandingan tingkat *Profil* pada periode pengukuran dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam system pengukuran kinerja keuangan perusahaan, terdapat tujuan tolak ukur yang diperhatikan, yaitu efektivitas, efisiensi, kualitas, probabilitas, produktivitas, *quality of work life* dan inovasi (Sink, 1985).

Setiap perusahaan membutuhkan dana, Pemenuhan dana perusahaan dapat berasal dari sumber dana internal maupun eksternal. Sumber dana internal perusahaan merupakan sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri seperti laba di tahan akumulasi penyusutan. Sedangkan sumber dana eksternal perusahaan merupakan sumber dana dari luar perusahaan yaitu di peroleh dari peminjaman kreditur dan investor, sumber dana eksternal yang di gunakan perusahaan sebagai pelengkap apabila dana internal kurang mencukupi.

Perusahaan dalam penggunaan dana eksternal tersebut akan di hadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang di berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Kewajiban finansial tersebut dapat berupa kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Masalah yang dihadapi perusahaan untuk memenuhi kewajiban

jangka pendeknya atau yang harus segera di penuhi yang di kenal dengan stilah likuiditas.

Likuiditas adalah suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar tersedia. Perusahaan harus yang memberi perhatian lebih terhadap likuiditas dan perusahaan harus memuat strategi yang kompeten dan bermanfaat untuk mengoptimalkan dan mengelola aktiva lancar yang di miliki perusahaan. Hal ini bertujuan agar seluruh kewajiban lancarnya yang harus segera jatu tempo dapat di lunasi dengan baik.

Masalah profitabilitas juga sangat penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus selalu berada pada keadaan yang menguntungkan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber dana yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah Pembantu cabang, dan sebagainya. Pihak manajemen perusahaan dapat berusaha selalu berpikir untuk meningkatkan (*Profil*) keuntungan. karena dengan peningkatan (*Profil*) keuntungan perusahaan sendirinya akan mampu membiayai operasional perusahaan disadari bahwa betapa pentingnya arti keuntungan bagi masa depan perusahaan tersebut.

Keuntungan (*Profil*) juga akan berguna bagi perusahaan dalam menarik modal dari luar, karena tanpa adanya keuntungan perusahaan akan kesulitan untuk menarik modal dari pihak-pihak investor.

Likuiditas sangat berkaitan dengan tujuan perusahaan untuk mencapai laba maksimal. Perusahaan dalam suatu usaha untuk mencapai profitabilitas yang baik harus mampu menentukan campuran aktiva lancar dan utang yang sesuai. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang baik akan berkesempatan untuk mengembangkan usahanya, yang akan berakibat dengan kemampuan laba perusahaan yang semakin baik.

Keadaan likuiditas pos Indonesia yang baik ketika suatu Pos Indonesia memiliki jumlah aset likuid yang dapat menutupi kewajiban jangka pendek dan penarikan dana oleh pelanggan. Sebagai lembaga perbankan di satu sisi Pos Indonesia harus menjaga, penarikan dana dari sumber dana yang di titipkannya seperti kredit yang diberikan pembelian peralatan dan lainnya. Sementara di sisi lain Pos Indonesia harus menjaga penarikan permintaan dana seperti kredit yang di berikan, pembelian peralatan dan lainnya menurut munawir (2010: 64).

Pendapatan terbesar suatu Pos Indonesia berasal dari bunga atas kirim wesell pos dan atas pembayaran dokumen dan barang yang dikirim kota tujuan yang tertentu, yang di berikan kepada masyarakat. Guna profitabilitas yang tinggi maka pos Indonesia akan berusaha menggunakannya ke asset yang menghasilkan bunga yang tinggi, asset jangka panjang dan dengan harapan bahwa operasi harian akan tutup dengan dana baru. Namun tindakan seperti ini sangat berisiko karena apabila dana yang terlanjur di gunakan tidak dapat di tarik, sedangkan dana baru yang di harapkan tidak tersedia, bagaimana suatu pos Indonesia dapat kewajiban memenuhi jangka pendeknya dan memenuhi penarikan dana, pada akhirnya akan menimbulkan masalah likuiditas munawir (200:5).

PT. Pos Indonesia yang merupakan bagian dari industry, perusahaan internasional juga harus menunjukkan kinerja yang optimal dalam rangka mendukung sepenuhnya pembiayaan pembangunan daerah, Perkembangan lingkungan usaha yang semakin cepat dan kompetitif menyebabkan resiko bisnis yang di hadapi oleh PT. Pos Indonesia semakin bervariasi dan kompleks untuk itu, di butuhkan kualitas system pengendalian keuangan yang terarah. Terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga kinerja keuangan yang di milikinya dapat di percaya oleh berbagai pihak.

Dengan demikian perlu di ketahui bahwa, bagaimana tingkat likuiditas dan profitabilitas pada suatu pos Indonesia agar terhindar dari kemungkinan terjadinya resiko Likuiditas.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar tingkat likuiditas pada PT. Pos Indonesia (Persero), Kantor Pembantu Cabang Waena, kota Jayapura?

2. Berapa besar tingkat profitabilitas, pada PT. Pos Indonesia (persero), Kantor Pembantu cabang Waena, Kota Jayapura?
3. Bagaimana perkembangan dari tingkat likuiditas dan profitabilitas pada PT.Pos Indonesia (persero), Kantor Pembantu Cabang waena kota Jayapura?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan Penelitiann ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan, tingkat likuiditas pada PT. Pos Indonesia Kantor Pembantu Cabang Waena, Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan, tingkat profitailitas pada PT. Pos Indonesia Kantor Pembantu Cabang Waena, Kota Jayapura.
3. Untuk mengetahui perkembangan dari tingkat likuidias, dan profitabilitas, pada PT. Pos Indonesia Kantor Pembantu Cabang Waena, Kota Jayapura.

LANDASAN TEORI

Manajemen Keuangan

Perusahaan selalu membutuhkan Dana dalam rangka jangka pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang untuk memenuhi kebutuhan operasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. Menurut Martono (2001), para manajer keuangan perlu memperhatikan biaya modal yang efisien dalam menetapkan struktur modal yang optimal.

Manajemen keuangan atau pembelanjaan merupakan semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Menurut Sutrisno (2007) manajemen keuangan merupakan semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.

Menurut Sartono (2008) tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham atau (*maximization wealth of stack holders*) melalui maksimisasi perusahaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan (memaksimalkan kemakmuran pemegang saham) yang diukur dari harga saham perusahaan. Sedangkan Menurut Weston dan Brigham (2001) menyatakan bahwa fungsi manajemen keuangan ada empat, yaitu sebagai berikut: a) Peramalan dan perencanaan (*forecasting and planning*) Manajemen keuangan harus berinteraksi dengan eksekutif lainnya dalam perusahaan dan bersama-sama merencanakan bentuk posisi masa depan perusahaan; b) Keputusan menyangkut investasi besar dan permodalan. Atas dasar perencanaan jangka panjang, manajer keuangan harus menghimpun dana dan modal yang dibutuhkan

untuk mendukung pertumbuhan perusahaan; 3) Pengendalian (controlling). Manajer keuangan harus berinteraksi dengan eksekutif lainnya dalam perusahaan agar operasional perusahaan dapat seefisien mungkin; 4) Interaksi dengan pasar modal. Aktivitas keempat mencakup penanganan pasar uang dan modal.

Analisis Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menurut Jumingan (2006: 112) mendefinisikan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Berbeda dengan Sutrisno (2009) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Definisi kinerja keuangan menurut Sawir (2003) menjelaskan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu proses atau perangkat proses untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dengan cara pengambilan keputusan secara rasional dengan menggunakan alat-alat analisis tertentu. Analisis kinerja keuangan ini dapat dilakukan baik oleh pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan.

Penilaian kinerja merupakan suatu hal yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian. Melalui penilaian kinerja, perusahaan dapat mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mulyadi (2001) tujuan perusahaan melakukan penilaian kinerja adalah:

1. Menetapkan kontribusi masing-masing divisi atau perusahaan secara keseluruhan atau atas kontribusi dari masing-masing sub divisi dari suatu divisi atau perusahaan (evaluasi ekonomi atau evaluasi segmen);
2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kerja masing-masing manajer divisi (evaluasi manajer);
3. Memotivasi para manajer divisi supaya konsisten mengoperasikan divisinya sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan (evaluasi operasi).

Laporan Keuangan

Untuk membahas manajemen keuangan, tidak bisa terlepas dari laporan keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, oleh karena itu perlu pembahasan singkat mengenai laporan keuangan. Kasmir (2008) berpendapat bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Sutrisno (2007) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama, yakni neraca dan laporan laba rugi.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi, yang meliputi neraca, perhitungan rugi laba dan laba yang ditahan. Laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Berkaitan dengan beberapa pengertian laporan keuangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah sebuah hasil dari siklus akuntansi suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen menurut Baridwan (2004) biasanya terdiri dari:

- 1) Neraca yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
- 2) Laporan laba rugi yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama periode akuntansi..
- 3) Laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal dari jumlah awal periode menjadi jumlah modal pada akhir periode.
- 4) Laporan perubahan posisi keuangan (*Statement of changes in financial position*), menunjukkan arus dana dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama tahun pembukuan yang bersangkutan.

Sedangkan laporan keuangan lainnya seperti laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan sebab-sebab perubahan laba kotor serta daftar-daftar lainnya hanya merupakan laporan pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan lebih lanjut. Dua jenis laporan keuangan yang sering dipakai adalah Neraca (*Balance Sheet*) dan laporan laba rugi (*Income Statement*).

Sedangkan menurut Kasmir (2008:33) memiliki beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu: a) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini; b) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini; c) Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu; d) Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu; e) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva, dan modal perusahaan; f) Memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dalam suatu periode; dan g) Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Adapun tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan menurut Silvi dan Siti (2012) adalah sebagai berikut: a). Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini. b). Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. c). Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. d). Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu

periode tertentu. e) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. f). Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. g). Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan. h). Informasi keuangan lainnya. Jadi, memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, akan dapat diketahui kondisi keuangan secara menyeluruh.

Analisis Rasio Keuangan

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan harus menggunakan analisis rasio keuangan. Menurut Munawir (2002) mengemukakan bahwa analisis rasio keuangan adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan keuangan, pendapat akuntan, praktik dan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan, jenis dan kelengkapan laporan akuntan serta tingkat perbandingannya, *up datenya*, apakah dikonsolidasi dengan anak perusahaan.

Selanjutnya menurut Sutrisno (2007) yang dimaksud analisis rasio keuangan adalah menghubungkan elemen-elemen yang ada di laporan keuangan agar bisa diinterpretasikan lebih lanjut. Beberapa jenis rasio keuangan, yaitu:

- 1) Rasio Likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendek.
- 2) Rasio Leverage adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh perusahaan dibiayai dengan hutang.
- 3) Rasio Aktivitas adalah rasio-rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya.
- 4) Rasio Keuntungan/Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan.
- 5) Rasio pertumbuhan (*Growth Rasio*), yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertemukan posisi ekonominya dalam pertumbuhan ekonominya dan industri.
- 6) Rasio Penilaian (*Valuation Rasio*), yaitu rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi. Rasio ini merupakan paling lengkap tentang prestasi perusahaan, karena mencerminkan rasio resiko pengembalian. Rasio ini penting karena berkaitan langsung dengan tujuan dari kekayaan para pemegang saham.

Menurut Harahap (2009), kegunaan analisis laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: a) Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa; b) Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (*explicit*) dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan (*implicit*); c) Dapat mengetahui kesalahan

yang terkandung dalam laporan keuangan; d) Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan; e) Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, peningkatan; dan f) Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan.

Dasar Hukum Yang Mengatur Usaha Ekspedisi PT. Pos Indonesia

Selama ini peraturan yang mengatur tentang usaha ekspedisi ini hanya UU no. 6 Tahun 1964 tentang monopoli pengiriman jasa surat oleh PT. Pos Indonesia yang sudah mulai dirubah serta Kepmen Perhubungan Tahun 1989 serta sebagian dalam UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Dengan sedikitnya perangkat aturan yang mengatur bisnis ini, maka usaha ini dapat memberikan masukan sekitar Rp. 200 miliar per tahun.

Pasal 1367 KUH Perdata adalah landasan utama bagi pertanggung jawaban tersebut, dimana seorang majikan (*employer*) bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya sejauh hal tersebut terjadi dalam konteks pekerjaan. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut, "*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya yang terdapat dalam izin usahanya, yaitu terdiri dari;* c) Bertanggung jawab atas apa yang diperjanjikannya dan menyelesaikan segala tuntutan yang sah Lebih lanjut, tanggung jawab ini diperjelas dalam Kepmenhub No.10/1988 Jo Pergub DKI No.123/2010, adapun tanggung jawab tersebut pada dasarnya menentukan bahwa suatu perusahaan pengangkutan harus bertanggung jawab pada semua hal yang telah diperjanjikannya dan wajib menyelesaikan segala tuntutan yang sah. d) Bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari pengiriman barang yang menggunakan dokumen-dokumen yang diterbitkannya. Perusahaan jasa pengangkutan bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari pengiriman barang yang menggunakan dokumen-dokumen yang telah diterbitkannya; dan e) Bertanggung jawab menyerahkan barang-barang yang diurusnya dan menutup asuransi terhadapnya. Sanksi terhadap pelanggaran tanggung jawab ini adalah pencabutan izin usahanya. Adapun dasar hukumnya yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD");

- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No.22/2009”)
- d) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (“Pergub DKI No.123/2010”)

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah PT. Pos Indonesia (persero), Kantor Pembantu Cabang Waena, Kota Jayapura.

Jenis dan Sumber Data

Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau sebenarnya yang bersangkutan yang dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di kantor pos cabang waena.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur-literatur berupa teori para ahli menyangkut penelitian ini ataupun data utama dari lokasi penelitian yang berupa data laporan keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Data dikumpulkan melalui hasil wawancara dengan pegawai Pos Indonesia yang berwenang dengan lokasi penelitian.

Dokumentasi

Informasi di kumpulkan dari Laporan Keuangan PT. Pos Indonesia (persero), Kantor Pembantu Cabang Waena Kota Jayapura, tahun 2014 sampai dengan 2016 serta data relevan dengan penelitian baik dari pihak manajer maupun yang berasal dari webOnline maupun Literatur-literatur lain.

Analisa Data

Analisa kualitatif

Dalam analisa kualitatif, penulis akan memaparkan dalam bentuk uraian angka-angka yang telah di peroleh dari Analisa Kuantitatif, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami hasil dari analisis kuantitatif tersebut.

Analisa Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan metode analisis data dalam bentuk angka-angk. Dimana dalam penelitian ini menggunakan Analisa Rasio. Untuk Rasio Likuiditas dan Profitabilitas yang dapat digunakan beberapa Rasio sebagai berikut:

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.

Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar menunjukkan kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus dibayar dengan memakai hutang lancar. Rasio lancar yang ideal adalah 100

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$$

Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total aktiva rasio lancar. Rasio kas yang ideal adalah 100%.

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas}}{\text{Aktiva Lancar}} \times 100\%$$

Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio).

Rasio Profitailitas terdiri dari beberapa jenis berikut:

Return of Asset

Return on equity (ROE), atau rentabilitas modal sendiri mrupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini

menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya, Rumus Rasio untuk mencari return on equity adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih/EAT}}{\text{ekuitas}} \times 100\%$$

Operating Profit Margin

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Operating Profit Margin mengukur presentase dari

profit yang di peroleh perusahaan dari tiap penjualan sebelum sebelum dikurangi dengan biaya bunga dan pajak. Pada umumnya semakin tinggi rasio ini maka semakin baik.

$$OPM = \frac{\text{Laba Usaha EBIT}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan dengan maksud untuk melihat kondisi keuangan pada setiap periode tertentu. Adapun kondisi kegiatan perkembangan dan kemerosotan pada PT. Pos Indonesia (persero)

Waena dilihat dari laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut yang meliputi Laporan Neraca, Laporan Laba rugi, Tahun 2014, 2015 dan 2016. Adapun Laporan Neraca, Laporan Laba rugi Dana pada tahun 2014, 2015 dan 2016 dilihat sebagai berikut:

Tabel.4
PT. Pos Indonesia (Persero) KPC Waena
NERACA
Per 31 Des 2014, 2015, dan 2016

Pos Pos Neraca	2014	2015	2016
Aktiva Lancar :			
Kas	85.000,	90.000,00	93.000,00
Investasi Jangka Pendek			
Piutang Usaha	3,000,	4.000,00	4.300,00
Penyisihan Piutang			
Piutang Lancar Lainnya	1.095,00	2.500,00	2.650,00
Penyisihan Piutang			
Persediaan	50.500,00	6.000,00	5.750,00
Pajak di Bayar di Muka			
Biaya di bayar di Muka			
Jumlah Aktiva Lancar	94.595,00	102.500,00	105.700,00
Aktiva Lainnya :			
Aktiva Lain-lain	12.080,00	10.561,00	13.000,00
Penyisihan Aktiva Lain - lain			
Jumlah Aktiva Lain-lain	12.080,00	10.561,00	13.000,00
Jumlah Aktiva	106.675,00	113.061,00	118.700,00
Kewajiban Lancar :			
HUtang Usaha			
HUtang Pajak	2.000,00	1.000,00	900
Pendapatan diterima di muka	5.000,00	3.400,00	2.000,00
Biaya yang masih Harus di bayar	4.100,00	4.050,00	3.530,00
Hutang lancar lainnya	1.80,	800	
Jumlah Hutang Lancar	12.80,	9.250,00	6.430,00
Jumlah Hutang Jk Panjang			
Modal dan Candangan			
Rekening Kantor Pusat	82.000,00	93.000,00	102.220,00
Candangan Modal	12.595,00		10.050,00
Lab Rugi	105.395	103.811,00	112.270,00
Jumlah Modal	94.595,00	9.250,00	6.430,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	106.675,00	113.061,00	118.700,00

Sumber: PT. POS INDONESIA (Persero) KPC Waena 2017

Tabel. 4.2

**PT. Pos Indonesia (Persero) KPC Waena
Laba/Rugi
Per 31 Des 2014,2015, dan 2016**

(Dalam Rupiah)

Komponen L/R	2014	2015	2016
Pendapatan:			
Jumlah Pendapatan	42.500,00	45.000,00	62.000,00
Jumlah Potongan Pendapatan	20.000,00	15.200,00	16.150,00
Pendapatan Bersih	22.500,00	29.800,00	45.850,00
BEBAN:			
Beban pegawai	2.000,00	1.600,00	1.027,00
Beban Operasi	600	800	960
Beban administrasi			
Beban umum	800	450	1.150,00
Penurunan nilai Asset tetap			
Beban penyusutan dan amortisasi			
Beban pemasaran	3.150,00	350	1.100,00
Beban lainnya	2.025,00	700	650
JUMLAH BEBAN	8.575,00	3.900,00	4.887,00
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	13.925,00	25.900,00	40.963,00
PAJAK 20%	-278.500,00	518.000,00	819.260,00
LABA (RUGI) BERSIH	264.575,00	492.100,00	778.297,00

Sumber: PT. Pos Indonesia (Persero) Waena 2017

Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Profitabilitas

Berdasarkan pengertian dan penggolongan rasio keuangan, dapat dianalisis beberapa rasio keuangan untuk melihat tingkat perkembangan seluruh aktivitas perusahaan.

Rasio Likuiditas

Rasio ini dianalisis untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Berdasarkan perhitungan rasio lancar pada tahun 2014, perusahaan

mampu menjamin setiap hutang lancar dengan 6,2 % aktiva lancar. Dan pada tahun 2015, perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar dengan 1,6% aktiva lancar. Sedangkan pada tahun 2016 perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar dengan 9,10,% aktiva lancar. Hal ini berarti, kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutang lancar dengan jaminan aktiva lancar mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Tetapi hal ini masih dalam kondisi aman.

**Tabel 4.3
Rasio Likuiditas
Akhir Tahun 2014, 2015**

No	Rasio-Rasio Likuiditas	2014	2015	Perbandingan
1	Rasio Lancar (CR)	6,2,%	1,6,%	4,6%
2	Rasio Cash (CR)	9,8	14,8%	-5%

Sumber: Data diolah 2017

Berdasarkan perhitungan rasio lancar pada tahun 2014, perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar dengan 6,2 % aktiva lancar. Dan pada tahun 2015, perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar dengan 1,6% aktiva lancar. Sedangkan pada tahun 2016 perusahaan mampu menjamin setiap hutang lancar dengan 9,10,% aktiva lancar. Hal ini berarti, kemampuan perusahaan dalam

mengembalikan hutang lancar dengan jaminan aktiva lancar mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Tetapi hal ini masih dalam kondisi aman. Jadi Rasio Lancar tahun 2014 dan 2015 mengalami meningkat 4,6% dan Rasio cash tahun 2015 dan 2016 mengalami meningkat juga dengan -2%. Jadi kondisi perusahaan buruk.

Tabel 4.4
Rasio likuiditas
Akhir Tahun 2015, 2016.

No	Rasio-Rasio Likuiditas	2015	2016	Perbandingan
1	Rasio Lancar (CR)	1,6%	9,10,%	-7,5%
2	Rasio cash (CR)	14,8%	16,8%	-2%

Dari kedua komponen rasio likuiditas tersebut, maka secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi perusahaan tersebut masih dalam keadaan liquid, walaupun rasio lancar dan rasio kas yang tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,6% dan tahun 2016 sebesar 9,10%. artinya perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Rasio Lancar dan Cash Rasio tahun 2015 sebesar 14,8% dan tahun 2016 dengan -

2%. Perusahaan perbandingan Rasio Lancar Tahun 2015 dan 2016 memiliki penurunan dengan 1,6%. Rasio Kas tahun 2015 dan 2016 meningkat dengan 7,5%, maka PT. Pos Indonesia (Persero) dikatakan bahwa kondisi perusahaan dalam keadaan sehat.

Rasio Profitabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif pengelolaan perusahaan oleh manajemen.

Tabel 4.5
Rasio Profitabilitas
Akhir Tahun 2014, 2015

No	Rasio Profitabilitas	2014	2015	Perbandingan
1	Retun On Equity (ROE)	14,2%	12,7%	1,5%
2	Operating Profit Margin	7,17%	14,10%	-6,93%

Sumber: Data diolah 2017

Laba bersih yang di peroleh dari operasi perusahaan dengan jumlah aktiva yang di gunakan untuk menghasilkan keuntungan adalah sebesar 14,2% pada tahun 2014 dan sebesar 12,7% pada tahun 2015. Dan 6,5% pada tahun 2016. rasio ini terjadi penurunan rasio sebesar 0,65% pada tahun 2015 dan 2016 naik menjadi 6,2% dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini terjadi karena terjadinya penurunan laba bersih di tahun 2015 sebesar Rp.

492,100, pada tahun 2016 sebesar RP.778.297 dibandingkan dengan tahun 2014. Maka perusahaan ini ROE antara Tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan 1,5, di bandingkan OPM Tahun 2014 dan 2015 menurun juga menjadi 6,93%, dan ROE dan OPM Tahun 2016 memiliki 6,2% dan 2,6% menjadi naik. jadi PT.Pos Indonesia (Persero) Waena dikatakan kondisi perusahaan dalam keadaan aman. Jadi bisa mampu membiayai.

Tabel 4.6
Rasio Profitabilitas
Akhir Tahun 2015,2016

No	Rasio Profitabilitas	2015	2016	Perbandingan
1	Retunt On Equity (ROE)	12,7%	6,5%	6,2%
2	Operating Profit Margin	14,10%	16,7%	-2,6%

Sumber: Data di olah 2017

Dari komponen rasio profitabilitas tersebut maka dapat dikatakan bahwa perusahaan masih mampu melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya. Walaupun terjadi penurunan rasio. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan rasio tahun 2014 dengan tahun 2015 ROE 1,5% dan tahun 2015 dan 2016 terjadi penurunan rasio sebesar 6,2% pada OPM dan sebesar 14,10% dan 16,7% dan pada rasio Operating

Profit Margin yang menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan sehat pada rasio Operating Profit Margin.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada Bab IV perusahaan. Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Berdasarkan dari rasio likuiditas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan dalam keadaan cukup liquid, artinya perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Namun terjadi penurunan rasio likuiditas dari tahun 2014 ke 2015, dan tahun amun tahun 2016 kenaikan
2. Berdasarkan rasio aktivitas 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan perusahaan cukup efektif dalam menggunakan dan mengendalikan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan
3. Berdasarkan rasio profitabilitas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Hal ini terjadi karena perusahaan kurang mampu melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya sehingga rasio terus mengalami penurunan.
4. Berdasarkan rasio leverage perusahaan, terlihat secara keseluruhan mengalami kenaikan. ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya sangat baik, dengan kata lain bahwa perusahaan dalam membelanjai aktivitya atau membiayai usahanya sebagian besar menggunakan modal sendiri. Artinya dana dari pihak luar dalam hal ini adalah hutang, yang tidak terlalu besar sehingga perusahaan sudah dapat dikatakan solvable.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Rasio likuiditas masih dianggap baik oleh teori tetapi cenderung mengalami fluktuasi, hendaknya perusahaan tetap memperhatikan aktiva lancarnya sehingga modal kerja perusahaan mengalami kenaikan, dan sebaiknya manajemen perusahaan membuat suatu kebijakan dimasa yang akan datang untuk meningkatkan aktiva lancar. Misalnya dengan mendapatkan tambahan modal sendiri dan mendapatkan hutang jangka panjang.
2. Rasio aktivitas perusahaan sudah cukup baik karena mengalami peningkatan untuk mempertahankan rasio aktivitas, manajemen harus dapat mengoptimalkan penggunaan aktiva untuk mendapatkan sejumlah laba sehingga tidak ada aset perusahaan yang mengangur.
3. Rasio leverage perusahaan memiliki nilai rasio yang kurang bagus, karena mengalami sedikit kenaikan dan ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya menurun, dengan kata lain bahwa perusahaan dalam membelanjai aktivitya atau membiayai usahanya sebagian besar menggunakan modal sendiri. Keadaan ini

harus diperbaiki perusahaan agar untuk tahun kedepannya tidak mengalami kenaikan kembali nilai rasionya.

4. Pada rasio profitabilitas, perusahaan memiliki nilai rasio yang buruk karena mengalami penurunan disetiap tahunnya. Keadaan ini harus di perbaiki dengan meningkatkan pendapatan operasional dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan perusahaan agar setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmanegara, Devi. 2007. *Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. POS Indonesia (Persero) Malang*. Malang: Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Bambang, Riyanto, 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Baridwan, Zaki. 2004. *Accounting Intermediate*. Edisi Kedelapan, Cetakan Pertama. Penerbit BPFE Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Darsono dan Ashari. 2004. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta.
- Handayan, D., Nilam, K. dan Michael, H. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Profitabilitas Pada PT Bhimex Di Samarinda*. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Harahap, Sofyan Safri. 2010. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Edisi Pertama. Rajawali Pers. Jakarta.
- Harahap, Sofyan Safri. 2009. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Edisi Pertama. Rajawali Pers. Jakarta.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi pertama. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kurniawan, Adi. 2012. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan POS EXPRESS di PT. POS Indonesia kantor POS Cukir*. (Online), Vol.1No.01, (<http://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/AS/article/view/50/36>, diakses Maret 2015)
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, S. 2002. *Analisa Laporan Keuangan*, Edisi Ketiga. LIBERTY. Yogyakarta.
- Martono, 2001. *Manajemen Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Martono dan D. Agus Harjito. 2005.

- Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Pertama, Cetakan Kelima. Ekonisia. Yogyakarta. Sangkala, Abdul A. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Profitabilitas Pada Perusahaan Pabrik Roti Tony Bakery Pare-Pare*. Jurnal Ekonomi Balance Fekon Unismuh Makassar.
- Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Subramayam, K.R, dan John J. Wild. 2012. Analisis Laporan Keuangan, Edisi sepuluh-Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Syahrial, Dermawan dan Purba, Djahotman. 2013. Analisis Laporan Keuangan – Cara Mudah dan Praktis Memahami Lapora Keuangan, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sumber data PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Waena, Kota Jayapura 2017.
- Weston dan Copeland, 2000. *Management Finance*, Binarupa Aksara Jakart

ANALISIS PENGARUH HUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PADA HOTEL GRAND ABE DI JAYAPURA

Jemy Ricardo Parera
Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh hutang terhadap profitabilitas Hotel Grand Abe Di Jayapura. Manfaat penelitian a). Hasil dari penelitian kami dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam proses peningkatan dan pembangunan lembaga universitas. b) Sebagai tambahan pengetahuan bagi setiap orang yang membaca. c). dapat menjadi bahan evaluasi pihak perusahaan untuk dapat terusbembenahi usaha yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai hubungan hutang (*Debt Ratio*) dengan Profitabilitas (*ROI*) pada Hotel Grand Abe Jayapura, maka dapat disimpulkan bahwa : 1). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Hutang (*Debt Rasio*) mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2013 sebesar 0.903, pada tahun 2014 naik sebesar 1,4% yaitu sebesar 0.917 dan tahun 2015 naik sebesar 1% yaitu sebesar 0.918. Sedangkan Profitabilitas (*ROI*) dilihat dari hasil analisis yang dilakukan, mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,367, tahun 2014 turun sebesar 11% yaitu 1,256 dan pada tahun 2015 turun sebesar 17% yaitu 1.078. 2). Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh Hutang (*Debt Ratio*) terhadap Profitabilitas (*Return On Investment*) diperoleh nilai koefisien b bernilai negatif yaitu -14.377, nilai koefisien determinasi (*R Squere*) sebesar 68,4% dan tingkat signifikan sebesar 0.380. Hal ini menunjukkan bahwa hutang (*Debt Ratio*) berpengaruh negatif namun pengaruh tersebut tidak signifikan terhadap profitabilitas (*Return On Investment*) pada hotel Grand Abe Jayapura. 3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai hutang (*Debt Ratio*) pada Hotel Grand Abe Jayapura yang tiap tahun meningkat sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan pada tingkat profitabilitas (*Return On Investment*).

Kata Kunci : *Tingkat Upah, Penyerapan Tenaga Kerja, Angkatan Kerja*

PENDAHULUAN

Latar belakang

Perkembangan dunia usaha yang semakin ketat sekarang ini menimbulkan tantangan-tantangan baru bagi setiap manajer perusahaan. Saat ini jumlah perusahaan yang ada pada suatu daerah bahkan tak terhitung jumlahnya baik yang berupa perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Hal ini baik untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tersebut, namun jumlah besar dari perusahaan yang ada mendatangkan persaingan yang ketat antar sesama perusahaan karena konsumen akan memiliki banyak pilihan, dan konsumen akan selalu memilih produk yang mendatangkan keuntungan dari berbagai segi. Hutang merupakan salah satu aspek yang turut berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan. Munawir (2007:18) berpendapat bahwa "hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor", sedangkan dalam hal ini Hongren, et al. (2006:505) menyatakan bahwa "hutang merupakan suatu kewajiban untuk memindahkan harta atau memberikan jasa di masa yang akan datang", ditinjau

dari jangka waktu pelunasan atau alat pelunasan hutang dapat di bagi menjadi dua kelompok yaitu hutang jangka pendek (hutang lancar) dan hutang jangka panjang..

Sartono, (2001:119) mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva produktif maupun modal sendiri melihat penjelasan dan pentingnya untuk meningkatkan profitabilitas maka setiap perusahaan harus berupaya keras untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin besar profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin besarnya profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri atas Profit Margin, Basic Earning Power, Return On Assets, dan Return On Equity. Pada akhirnya bagi pihak pemilik dan manajemen, dengan mengetahui profitabilitas perusahaan dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan ke depan. Persaingan yang terjadi dalam dunia bisnis saat ini membuat setiap perusahaan baik jasa, dagang maupun manufaktur

membutuhkan suatu manajemen yang baik oleh pihak manajer agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan oleh perusahaan yakni kerugian. Grand Abe Hotel yang tepatnya berada pada kota jayapura merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak dibidang pelayanan jasa, perusahaan ini terbilang cukup maju selain menyediakan layanan kamar, Grand Abe Hotel Jayapura juga memiliki restoran, minibar, dan juga menyediakan fasilitas ruangan yang dapat disewakan

untuk kegiatan-kegiatan tertentu dan produk-produk lainnya yang ditawarkan bagi konsumen..

Dengan menganalisis laporan keuangan Hotel Grand Abe Jayapura terlihat bahwa adanya suatu kondisi dimana laba hotel mengalami penurunan selama tiga tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan tidak dalam kondisi baik. Data dari variabel yang diteliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 1.1
Data Hutang dan Laba Bersih Tahun 2013-2015
Hotel Grand Abe Jayapura.

TAHUN	TOTAL HUTANG	LABA BERSIH
2013	18.260.120.000,00	27.640.000.000,00,
2014	20.000.000.000,00	27.385.000.000,00
2015	22.535.000.000,00	26.450.000.000,00

Sumber : laporan keuangan 2016

Terlihat pada laporan keuangan bahwa adanya hutang perusahaan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2013-2014 hutang mengalami peningkatan sebesar Rp.1.739.880.000,00 dan tahun 2013-2014 hutang perusahaan kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.2.535.000.000,00. Peningkatan hutang perusahaan dapat diakibatkan karena perusahaan kembali mengambil pinjaman karena kebutuhan financial yang belum dapat dipenuhi dengan modal sendiri, dan juga hutang yang masih belum dapat dibayar hingga menimbulkan beban bunga. Hal tersebut tentunya akan membebani perusahaan tersebut dengan beban pengembalian hutang dan juga ditambah dengan beban bunga yang harus dibayar akibat dari penggunaan hutang. Kondisi laba perusahaan terlihat pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan sebesar Rp.225.000.000,00 dan pada tahun 2014-2015 kembali menurun sebesar Rp.935.000.000,00. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan sesuai dengan data yang ada maka dapat dikatakan bahwa profitabilitas perusahaan Hotel Grand Abe dipengaruhi oleh adanya hutang.

Masalah penelitian.

Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah terjadi peningkatan nilai total hutang pada 3 tahun terakhir dan laba bersih perusahaan selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan.

Rumusan masalah.

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka dapat dibuat rumusan masalah yakni, "Bagaimana pengaruh hutang terhadap profitabilitas hotel grand abe di jayapura".

Tujuan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh hutang terhadap profitabilitas Hotel Grand Abe Di Jayapura.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian.

Penelitian Dilakukan Pada Hotel Grand Abe. Hotel Grand Abe adalah hotel berbintang 3 yang terletak Di Jln.Raya Abepura, Kota Baru Jayapura-Papua.

Desain Penelitian.

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data awal yang kemudian dianalisis dan diteliti lebih dalam mengenai masalah yang ditemui menggunakan alat analisis yang sesuai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratori. Penelitian ini menjelaskan hubungan sebab dan akibat antar variabel-variabel yang diteliti.

Variabel Penelitian.

Penelitian ini menggunakan variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y):

- Variabel bebas (X) yaitu Total hutang.
- Variabel terikat (Y) yaitu profitabilitas.

Populasi Dan Sampel.

- Populasi.**Populasi dalam penelitian adalah seluruh laporan keuangan pada Hotel Grand Abe Di Jayapura.
- Sampel.**Sampel dalam penelitian ini adalah laporan neraca dan laba rugi Hotel Grand Abe Tahun 2013-2015.

Metode Pengumpulan Data.

Data yang dikumpulkan menggunakan metode penelitian lapangan, dimana pada penelitian ini peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam kepentingan penelitian. Dalam hal ini data yang diperlukan adalah profil perusahaan dan laporan keuangan perusahaan. Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak perusahaan dan dokumentasi terhadap data-data yang diperlukan. Jenis data yang digunakan dalam proses penelitian adalah :

- a. **Data kuantitatif.** Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari laporan keuangan
- b. **Data kualitatif.** Data yang digunakan dalam bentuk lisan maupun tulisan yang bukan dalam bentuk angka.

Metode Analisis.

a. DR (Debt To Ratio).

Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi persentasenya cenderung semakin tinggi resiko keuangannya. Rasio ini dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{TOTAL HUTANG}}{\text{TOTAL AKTIVA}}$$

b. ROI (Return On Investment).

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari satu

rupiah asset yang digunakan. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{LABA SETELAH PAJAK}}{\text{TOTAL AKTIVA}}$$

c. Regresi linier sederhana.

Untuk melihat hubungan antara kedua variabel yang diteliti dalam penelitian yakni variabel total hutang (variabel dependen) dengan variabel profitabilitas (variabel independen), digunakan teknik analisis linier sederhana.

Persamaan regresi dirumuskan :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

X = total hutang

Y = profitabilitas

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

Analisis Hutang Menggunakan Debt Ratio.

Analisis Debt Rasio merupakan pengukuran jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai dengan hutang atau modal yang berasal dari kreditor. Semakin tinggi persentasenya cenderung semakin tinggi resiko keuangannya. Berikut merupakan tabel yang memperlihatkan nilai debt rasio yang merupakan perbandingan dari total hutang dengan total aktiva Hotel Grand Abe Tahun 2013-2015.

Berikut Analisis perhitungan Debt Rasio :

- Debt Rasio 2013 = $\frac{18.260.120.000}{20.213.260.000} = 0,903$
- Debt Rasio 2014 = $\frac{20.000.000.000}{21.800.000.000} = 0,917$
- Debt Rasio 2015 = $\frac{22.535.000.000}{24.535.000.000} = 0,918$

Dari hasil perhitungan di atas menggunakan rumus Debt Rasio dapat dimasukkan dalam table berikut ;

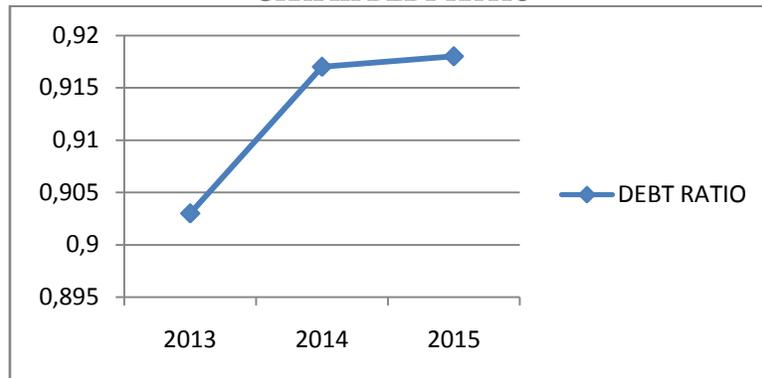
Tabel 4.1
ANALISIS PERHITUNGAN HUTANG
MENGGUNAKAN DEBT RATIO

TAHUN	TOTAL HUTANG	AKTIVA AKTIVA	DEBT RATIO
2013	18,260,120,000	20,213,260,000	0.903
2014	20,000,000,000	21,800,000,000	0.917
2015	22,535,000,000	24,535,000,000	0.918

Sumber : Data Olah, 2017

Gambaran kenaikan Debt Rasio dapat di gambarkan seperti pada gambar Grafik berikut ;

Gambar 4.2
 GRAFIK DEBT RATIO



Sumber : Data Olah, 2017

Dari data pada tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa adanya kondisi *Debt Rasio* yang mengalami peningkatan pada tiap tahun. Pada tahun 2013 *Debt Rasio* sebesar 0,903 kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 0,917, dan pada tahun 2015 kembali mengalami peningkatn menjadi 0,918.

Peningkatan nilai Debt Rasio sesuai data yang ada diatas terjadi akibat dari adanya peningkatan nilai hutang pada Hotel Grand Abe. Peningkatan nilai hutang diakibatkan karena perusahaan belum melunasi pinjaman pada tahun sebelumnya sehingga menimbulkan beban bunga dan juga karena perusahaan kembali mengambil pinjaman untuk

memenuhi kebutuhan financial yang belum dapat dipenuhi dengan modal sendiri.

Analisis Profitabilitas menggunakan Ratio Return On Equity

Analisis return on equity merupakan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aktiva. Semakin tinggi rasio ini semakin baik karena menunjukkan nilai laba bersih perusahaan diukur dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Dibawah ini merupakan tabel nilai ROI yang diperoleh dari perbandingan antara laba setelah pajak dan total aktiva Hotel Grand Abe Tahun 2013-2015.

Berikut Analisis perhitungan *Return On Equity*:

- Return On Investment 2013 = $\frac{27.640.000.000}{20.213.260.000} = 1.367$
- Return On Investment 2014 = $\frac{27.385.000.000}{21.800.000.000} = 1.256$
- Return On Investment 2015 = $\frac{26.450.000.000}{24.535.000.000} = 1.078$

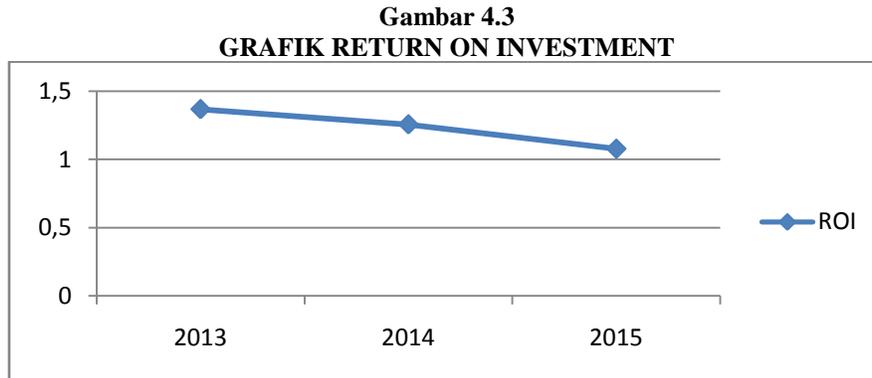
Dari hasil perhitungan di atas menggunakan rumus *return on equity*(ROI) dapat dimasukan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
 ANALISIS PERHITUNGAN PROFITABILITAS MENGGUNAKAN
 RATIO RETURN ON INVESTMENT

TAHUN	EAT	TOTAL AKTIVA	ROI
2013	27,640,000,000	20,213,260,000	1.367
2014	27,385,000,000	21,800,000,000	1.256
2015	26,450,000,000	24,535,000,000	1.078

Sumber : Data Olah, 2017

Gambaran Penurunan *return on investment* dapat di gambarkan seperti pada gambar Grafik berikut ;



Sumber : Data Olah, 2017

Pada data yang ada pada tabel dan grafik diatas menunjukkan terjadi penurunan pada *return on investment (ROI)*. Pada tahun 2013 ROI sebesar 1,367, kemudian pada tahun 2014 terjadi penurunan ROI menjadi 1,256 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 1,078. Kondisi menurunnya profitabilitas perusahaan yang dalam penelitian ini di uji dengan menggunakan rasio *return on investment* diakibatkan oleh adanya penurunan pada laba bersih perusahaan. Laba bersih pada Hotel Grand Abe mengalami penurunan dapat diakibatkan karena hutang perusahaan yang kemudian menimbulkan beban untuk angsuran pengembalian hutang dan juga beban bunga, selain

dipengaruhi hutang terdapat komponen-komponen lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini yang juga turut berpengaruh terhadap laba perusahaan.

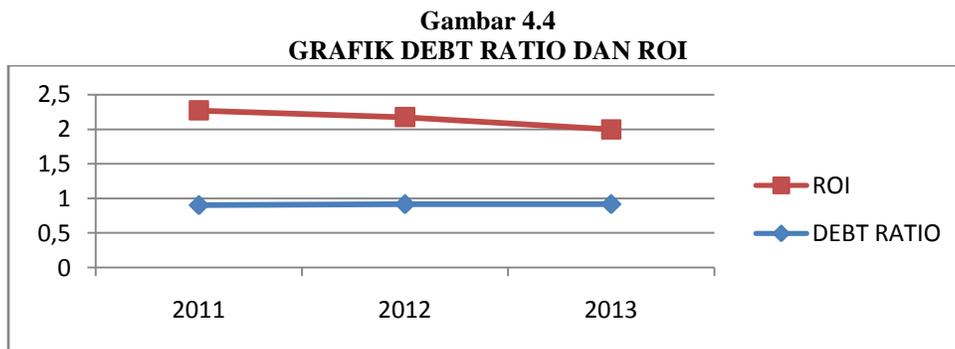
Analisis Hutang (Debt Ratio) Dalam Hubungannya Dengan Profitabilitas (Return On Equity).

Dalam pembahasan ini dikemukakan tentang hubungan antara Hutang yang menggunakan perhitungan *Debt Ratio* dengan Profitabilitas yang menggunakan perhitungan *Return On investment*, yang dapat dilihat dalam tabel dan gambar grafik berikut :

Tabel 4.3
REKAPITULASI ANALISIS DEBT RATIO DAN ROI

TAHUN	DR	ROI
2013	0.903	1.367
2014	0.917	1.256
2015	0.918	1.078

Sumber : Data Olah, 2017



Sumber : Data Olah, 2017

Pada tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada *debt ratio*, sedangkan pada *return on investment* mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi kenaikan pada *debt ratio* menyebabkan *return on equity* akan mengalami penurunan.

Menurunnya nilai laba bersih pada Hotel Grand Abe Di Jayapura yang bersamaan dengan adanya peningkatan pada hutang perusahaan yang dalam penelitian ini menggunakan Debt Rasio sebagai alat analisis menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara hutang dan kemampuan perusahaan memperoleh laba, sehingga ketika terjadi peningkatan pada hutang perusahaan hal tersebut dapat mengakibatkan laba mengalami penurunan. Sutrisno, (2010) menyatakan bahwa penggunaan modal asing dapat menurunkan keuntungan karena harus membayar beban bunga. Setiap perusahaan tentunya ingin agar tidak terjadi penurunan pada laba perusahaan melainkan memperoleh keuntungan dari penggunaan hutang. Oleh karena itu perlu adanya manajemen yang baik agar dapat memanfaatkan hutang yang digunakan agar dapat memperoleh keuntungan. Menurut Irfan Fachmi, (2012) Untuk mencegah agar penggunaan hutang tidak menurunkan keuntungan yang diperoleh perusahaan ada beberapa solusi yaitu: selalu menyediakan alokasi dana untuk

membayar angsuran pinjaman tepat waktu, mempertahankan posisi keseimbangan antara kewajiban yang harus tetap dibayar dan sejumlah dana yang harus dipakai untuk mengaktifkan operasional perusahaan secara berkelanjutan, pengalokasian hutang harus tepat sasaran, jika kebutuhan dana bersifat jangka panjang maka harus dicari dari sumber pembiayaan jangka panjang dan sebaliknya jika kebutuhan bersifat jangka pendek harus dicari dari sumber pembiayaan jangka pendek, manajer perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap kewajiban membayar beban listrik, beban telepon dan beban lain sesuai dengan tanggal jatuh temponya, dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian yang tinggi serta dengan konsep manajemen yang terukur. Strategi-strategi di atas jika dilakukan dengan baik oleh perusahaan maka resiko menurunnya laba perusahaan yang dapat diakibatkan oleh hutang dapat dihindari oleh perusahaan.

Analisis Menggunakan Regresi Linier Sederhana. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Profitabilitas maka disusun persamaan regresi yang menempatkan Profitabilitas (return on investment) sebagai variabel terikat dan Hutang (debt ratio) sebagai variabel bebas. Untuk menganalisisnya penulis menggunakan bantuan Aplikasi SPSS Versi 16.0.

Tabel 4.4
Analisis Linier Sederhana Antara Hutang (*Debt Ratio*) dengan Profitabilitas (*Return On Investment*)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.355	8.919		1.609	.354
DR	-14.377	9.773	-.827	-1.471	.380

a. Dependent Variable: ROI

Sumber : hasil olah data SPSS. 16.0

Dari tabel di atas dapat dibentuk persamaan sebagai berikut ;

$$Y = \alpha + bX$$

Data-data di atas dapat di interpestasikan sebagai berikut ;

$$Y = 14.355 - 14.377X$$

a. Nilai bilangan konstan (α) adalah 14.355

Nilai bilangan konstan (α) sebesar 14.355 menunjukkan bahwa pada saat hutang nol maka Return on Investment 14.355.

b. Nilai Koefisien regresi (b) adalah -14.377
Nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -14.377 yang artinya hutang memiliki arah negatif terhadap Return On Investment dimana apabila hutang naik maka laba perusahaan turun. Sebaliknya jika hutang turun maka laba naik.

• Hasil Pengujian Hipotesis.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Hutang (*Debt Ratio*) terhadap profitabilitas (ROI), maka dilakukan

pengujian hipotesis yang ditemukan sebelumnya melalui analisis berikut ;

Tabel 4.5
Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827 ^a	.684	.368	.115905

a. Predictors: (Constant), DR

b. Dependent Variable: ROI

Sumber : hasil olah data SPSS. 16.0

a. Koefisien Korelasi.

Nilai R pada tabel di atas adalah sebesar 0.827 yang menandakan adanya hubungan yang kuat antara variabel X yaitu Hutang (debt ratio) dan variabel Y Profitabilitas (ROI). Nilai R positif, artinya bahwa variabel X Hutang (debt ratio) memiliki hubungan yang positif terhadap Variabel Y Profitabilitas (ROI).

b. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan suatu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R² yang semakin mendekati satu maka variabel independen yang dapat memberikan hampir semua yang dibutuhkan untuk memprediksi suatu variabel variabel dependen.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi R² (R Square) adalah 0.684 atau 68%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hutang berkontribusi terhadap profitabilitas sebesar 68% dan 32% sisanya dipengaruhi oleh komponen-komponen lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti modal kerja, biaya operasional dsb.

c. Uji T

Untuk menguji hipotesis yang diajukan apakah Hipotesis *null* (H₀) dan hipotesis alternatif (H_a) diterima atau ditolak, maka dilakukan uji statistik t (uji-t) dengan tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0.05$). Nilai t hitung yang diperoleh dari hasil pengelolaan data sebesar -1.471 dengan tingkat signifikan sebesar 0.380 Sedangkan t tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0.05 dengan df = n-2 atau 3-2 = 1. Hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 6.314 maka nilai t hitung < t tabel (-1.471 < 6.314). Hasil ini jika dibandingkan dengan tingkat signifikan yang di gunakan dalam penelitian ini sebesar 0.05 maka tingkat signifikan yang diperoleh pada penelitian ini lebih besar yaitu 0.380, dari hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa Hutang (debt ratio) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROI). Dengan demikian hipotesis yang

dikemukakan pada penelitian ini bahwa Hutang (debt ratio) memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROI) namun tidak signifikan.

Pembahasan Hasil Perhitungan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu hutang (debt ratio) memiliki pengaruh negatif terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas (ROI). Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan hutang (debt ratio) dari tahun 2013-2015 yang diikuti oleh penurunan profitabilitas (ROI) dari tahun 2013-2015.

Hasil analisis menggunakan regresi linier sederhana menunjukkan hutang mempunyai kontribusi yang kuat terhadap profitabilitas sebesar 0.684 atau sebesar 68%, namun pengaruh ini bernilai negatif yang ditunjukkan pada data koefisien regresi (-14.377). Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan hutang maka profitabilitas akan mengalami penurunan dan sebaliknya jika terjadi penurunan hutang maka profitabilitas akan meningkat. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno, (2010) bahwa penggunaan modal asing (hutang) akan menurunkan keuntungan sebab harus membayar beban bunga dan bunga sebagai pengurangan laba.

Berdasarkan hasil analisis di atas disimpulkan Hutang (*debt ratio*) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas (*ROI*) sehingga hipotesis pada penelitian ini ditolak, hasil penelitian ini didukung dalam penelitian terdahulu oleh Dessy Ratnasarry (2012) yang pada penelitiannya memperoleh hasil hutang berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai hubungan hutang (*Debt Ratio*) dengan Profitabilitas (*ROI*) pada Hotel Grand Abe Jayapura, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Hutang (*Debt Rasio*) mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2013 sebesar 0.903, pada tahun 2014 naik sebesar 1,4% yaitu sebesar 0.917 dan tahun 2015 naik sebesar 1% yaitu sebesar 0.918. Sedangkan Profitabilitas (ROI) dilihat dari hasil analisis yang dilakukan, mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,367, tahun 2014 turun sebesar 11% yaitu 1,256 dan pada tahun 2015 turun sebesar 17% yaitu 1.078.
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh Hutang (*Debt Ratio*) terhadap Profitabilitas (*Return On Investment*) diperoleh nilai koefisien b bernilai negatif yaitu -14.377, nilai koefisien determinasi (R Squer) sebesar 68,4% dan tingkat signifikan sebesar 0.380. Hal ini menunjukkan bahwa hutang (*Debt Ratio*) berpengaruh negatif namun pengaruh tersebut tidak signifikan terhadap profitabilitas (*Return On Investment*) pada hotel Grand Abe Jayapura.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai hutang (*Debt Ratio*) pada Hotel Grand Abe Jayapura yang tiap tahun meningkat sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan pada tingkat profitabilitas (*Return On Investment*).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi Hotel Grand Abe Jayapura, yaitu :

1. Dalam pengelolaan hutang pada Hotel Grand Abe Jayapura diharapkan agar dapat lebih optimal lagi dan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan alternatif pembiayaan dan setiap keputusan penggunaan hutang, agar penurunan profitabilitas yang terjadi dapat diatasi dan Hotel Grand Abe dapat memperoleh profitabilitas yang sesuai dengan tujuan perusahaan.
2. Dalam mengawasi tingkat pengelolaan hutang yang berorientasi pada peningkatan profitabilitas, maka Hotel Grand Abe Jayapura dapat menjadikan dasar pertimbangan pada hasil perhitungan tingkat Debt Rasio dalam penentuan pengambilan keputusan pada penentuan penggunaan hutang periode berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arthur J.Keown,John Martin,J.wssiliam Petty,David f scott jr (2008) *manajemen keuangan*.penerbit:PT Indeks
Akhim kuncorojaty (2016), *Pengaruh hutang jangka panjang,jangka pendek,dan total hutang*

- terhadap ROA dan ROE perusahaan yang terdaftar di di indeks LQ-45 di BEI periode 2011-2014.*
- Baridwan (2000) *intermediate accounting* penerbit : BPFE,Jogjakarta
- Djarwanto,(2004). *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*, edisi 2 penerbit : BPFE:Jogjakarta
- Dessy Ratnasarry (2012). *Pengaruh Hutang Terhadap Profitabilitas pada Beberapa Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek.*
- Dermawan Sjahrial (2010), *Manajemen keuangan* edisi 4. Penerbit : Jakarta Mitra Wacana Media
- Farah Margareth,(2005). *Manajemen Keuangan*. Penerbit : Grasido 2005
- Harmono,SE.M,SI (2009) *Manajemen Keuangan*, penerbit : Jakarta Bumi Aksara
- Harahap, Sofayan Syafri .2004 *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Hartono,(2000). *Teori portofolio dan analisis investasi*,jogjakarta
- Hery,S.E.,M.Si ((2013) *Analisis laporan keuangan Keuangan dan Perencanaan* Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Hongren,Charles T, (2006) *akuntansi* . Jakarta : PT Indeks
- Irfan fachmi, (2012) *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi pertama: penerbit ALFABETA, Bandung.
- J.Fred Woston & Thomas.E.Copeland (1998) *manajemen keuangan*,jilid 1 Penerbit:Erlangga
- Kasmir(2008:151), *Analisis Laporan Keuangan* oleh, Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Munawir,(2007). *Analisis laporan keuangan* edisi ke 4,penerbit:liberty.jogjakarta
- Meis sariwating (2016), *Analisis pengaruh penggunaan hutang terhadap profitabilitas pada PT BANK MALUKU cabang maluku.*
- Ridwan S.Sundjaja,Drs.,MSBA,(2003). *Manajemen keuangan 1*. Penerbit : Literata Lintas Media
- Rianto,Bambang (2004). *Dasar-dasar pembelanjaan perusahaaa*,Edisi 2. Penerbit : Gajah Mada, Jogjakarta.
- Riyanto,Bambang,(2001). *Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan*,Edisi 4. Penerbit : BPFE,Jogjakarta.
- Rudianto,(2008). *Pengantar akuntansi* ,penerbit : Erlangga Jakarta
- Sutrisno, (2001). *Manajemen keuangan teori,konsep dan aplikasi*, Ekonisia UII,Yogyakarta.

- Sartono, Agus (2001), *manajemen keuangan teori dan aplikasi*. BPFE Yogyakarta ; Yogyakarta.
- Sutrismo, MM 2001, *Manajemen Keuangan*, kampus fakultas Ekonomi UII. Jogjakarta

ANALISIS PENGARUH TINGKAT INVESTASI, TENAGA KERJA DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA JAYAPURA

Yuniar Sri Hartati

Dosen STIE Port Numba Jayapura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Tingkat Investasi, Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura dalam kurun waktu 2006-2015. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa time series data sekunder dari tahun 2006 hingga 2015. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan Pengujian analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Investasi dan Tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Kota Jayapura. Sedangkan PDRB berpengaruh besar positif dan signifikan terhadap PAD Kota Jayapura.

Kata Kunci : *Investasi, Tenaga Kerja, Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah*

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih bisa mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan peluang pada pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif, dengan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan disektor publik. Untuk itu harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian halnya dengan Kota Jayapura, yang dalam rangka meningkatkan perekonomian otonomi daerah yang lebih nyata, memanfaatkan berbagai sumber/sektor dan sub sektor dalam menunjang pendapatan daerah. Kesiapan Kota Jayapura sendiri dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, identik dengan daerah kota lainnya dimana masih dipandang perlu mengoptimalkan sumber-sumber potensi daerahnya.

Dari tahun 2010 hingga tahun 2014 Pertumbuhan Pendapatan daerah di Kota Jayapura mengalami peningkatan yang sangat signifikan terutama pada pajak daerah Kota Jayapura yang mengalami kontraksi positif lebih dari 50% pada tahun 2014. Data dari dinas pendapatan daerah Kota Jayapura selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dengan selisih yang cukup besar setiap tahunnya. Dilain sisi jika pendapatan perkapita riil suatu daerah semakin tinggi, maka akan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran

pembangunan pemerintahnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga kemampuan masyarakat membayar pajak pun meningkat.

Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan akan lebih sulit dilakukan oleh pemerintah daerah apabila tanpa adanya dukungan dari pihak swasta. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah. Iklim Investasi pada industri di Kota Jayapura yang meningkat setiap tahunnya tentu menjadi salah satu motor penggerak industri ekonomi di Kota Jayapura dan akan mempengaruhi produksi dari industri kecil lainnya yang ada di Kota Jayapura yang juga akan berdampak padameningkatnya pendapatan perkapita.

Yang terakhir modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia (tenaga kerja). Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas disamping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja.

Menurut data Badan Pusat Statistik bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Jayapura memiliki jumlah tingkat partisipasi tenaga kerja yang dirasa cukup memungkinkan dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Kota Jayapura yang diharapkan jika penyerapan tenaga kerja juga meningkat setiap

tahunnya ke berbagai sektor maka tentu selain memiliki pengaruh terhadap pendapatan perkapita masyarakat yang berdampak pada naik atau turunnya pendapatan asli daerah juga diyakini memiliki multiplier effect terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan mutu SDM lokal khususnya di Kota Jayapura .

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah adalah Bagaimanakah pengaruh tingkat investasi, tenaga kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura dan BagaimanapeningkatanPendapatanAsliDaerah (PAD)melalui tingkatinvestasiantenagakerjapadaProduk Domestik Regional Bruto (PDRB)Kota Jayapura ?

Agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan sempurna maka perlu untuk membatasi permasalahan yang dibahas berdasarkan variable penelitian. Oleh sebab itu penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan tingkat investasi, Produk Domestik Regional Bruto, Tenaga Kerja Dan Pendapatan Asli Daerah dengan kurun waktu tahun 2006-2015.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tingkat investasi, tenaga kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Kota Jayapura dan menganalisis upaya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kota Jayapura melalui peningkatan investasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jayapura. Sedangkan manfaat/kegunaan penelitian ini berupa kontribusi empiris, teori dan kebijakan, yaitu :

1. kontribusi empiris pada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Kota Jayapura.
2. kontribusi kebijakan untuk Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah khususnya pemerintah Kota Jayapura dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.
3. kontribusi teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
4. Kontribusi yang bersifat langsung kepada masyarakat maupun pemerintah sebagai salah satu kewajiban mahasiswa sebagai agen pembaruan dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat umum.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Daerah

Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga (2007) dalam Nurul (2008) antara lain:

1. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana

tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.

2. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.
3. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (BPKP, 2005 dalam Warsito, dkk 2008) sebagai berikut:
 - a) Transparansi dan akuntabilitas anggaran
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.
 - b) Disiplin anggaran
Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Keadilan anggaran
Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapatdinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.
 - d) Efisiensi dan efektifitas anggaran
Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi danefektifitas.
 - e) Disusun dengan pendekatan kinerja
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan

memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah.

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009). Menurut Brahmantio (2002) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

PDRB Terhadap PAD

PDRB Konstan akan memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan pemerintah, karena salah satunya peningkatan tarif pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah untuk kalangan pengusaha, seperti halnya teori Peacock dan Wiseman (dalam Mangkosoebroto, 2010; 173) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan berbagai pemungutan pajak dan meningkatkannya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

Tingkat Investasi Terhadap PAD

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 1994: 107). Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka investasi swasta dapat di bagi menjadi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Pengeluaran investasi tersebut terutama meliputi mendirikan bangunan industri, membeli mesin-mesin dan peralatan produksi lain dan pengeluaran untuk menyediakan bahan mentah. Investasi yang dilakukan di masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek memperoleh keuntungan di masa depan. Harold dan Dommar memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhing, 1999: 291).

Tenaga Kerja Terhadap PAD

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (Simanjuntak, 1985). Sedangkan angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memperoleh hasil produksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau mencari pekerjaan. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah tidak terbatas. Dalam keadaan demikian, peranan tenaga kerja mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor

tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern.

Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang bersamaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam dan kapasitas produksi.

Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan produksi, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB. Jika PDRB meningkat maka kemandirian masyarakat dalam perekonomian pun meningkat yang akan menjadi potensi bagi daerah untuk memaksimalkan pendapatannya.

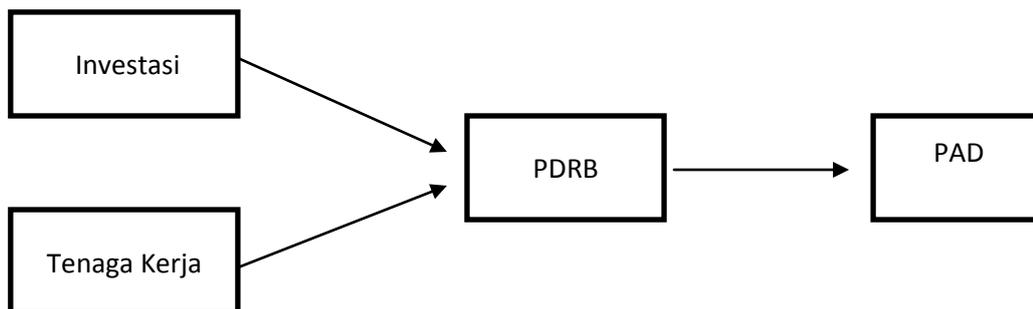
KERANGKA PIKIR

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang tersusun adalah Pendapatan Asli Daerah dapat dipengaruhi oleh perkembangan PDRB, dan PDRB dapat dipengaruhi oleh tingkat investasi dan tenaga

kerja. Dengan alur pemikiran bahwa tenaga kerja yang berasal dari penduduk dengan usia produktif akan tersalurkan dan terserap dengan baik bersamaan dengan munculnya investasi dalam bentuk penanaman modal kepada berbagai sektor demi meningkatkan kapasitas hasil produksi yang pada akhirnya akan diikuti dengan Peningkatan pendapatan yang ditunjukkan oleh perkembangan PDRB yang selanjutnya akan berdampak positif berupa naiknya tingkat produktifitas dan pendapatan masyarakat. Dengan kemandirian ekonomi yang dimiliki masyarakat maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah pun meningkat dan memiliki potensi untuk dioptimalkan. Iklim Investasi yang baik membuat tingkat penanaman modal menjadi relatif stabil dan terus meningkat yang bersamaan dengan itu terjadi pemaksimalan penyerapan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari Sisi inilah pemerintah daerah dirasa harus mengoptimalkan penerimaan daerah baik berupa penyerapan pajak serta pemungutan retribusi ataupun potensi penerimaan daerah lainnya dari peluang yang tercipta tersebut.

Gambar 1.1

Gambar Bagan Kerangka Pikir Pengaruh Tingkat Investasi, Tenaga Kerja dan PDRB terhadap PAD



Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka hipotesis penulis adalah:

1. Diduga bahwa tingkat Investasi berpengaruh terhadap PDRB.
2. Diduga bahwa tingkat Investasi berpengaruh terhadap PAD melalui PDRB.
3. Diduga bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap PDRB.
4. Diduga bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap PAD melalui PDRB.
5. Diduga bahwa PDRB berpengaruh terhadap PAD.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian bertempat di Ibukota Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura. Dengan alasan Kota Jayapura sebagai barometer pembangunan di Provinsi Papua yang bisa menjadi panutan dalam perumusan dan pembuatan kebijakan pembangunan bagi daerah lainnya.

Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka. Sedangkan sumber data yang digunakan serupa data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD, PAD Kota Jayapura dari instansi terkait serta publikasi statistik tahunan dari Badan pusat statistik Kota Jayapura dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Data sekunder dari institusi terkait lainnya yaitu Laporan Publikasi Tahunan Bank Indonesia mengenai Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Papua. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data realisasi investasi PMA maupun PMDN di Kota Jayapura dalam kurun waktu 2006-2015, data PDRB atas dasar harga Berlaku di Kota Jayapura dalam kurun waktu 2006-2015, data Jumlah tenaga kerja Kota Jayapura kurun waktu 2006-2015, data realisasi PAD Kota Jayapura dalam kurun waktu 2006-2015.

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif, sedangkan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya digunakan Regresi Linier Berganda atau teknik metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square*). Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek secara tepat.

Untuk mengetahui pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan regresi linier berganda atau teknik metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square*) Variabel Pendapatan Asli Daerah dengan investasi, tenaga kerja, dan PDRB Kota Jayapura. Dengan demikian, untuk menentukan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura dapat diamati dengan menganalisis variabel-variabel tersebut menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Disini yang menjadi variabel dependen adalah Produk Domestik Regional Bruto (Y_1) dan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y_2), serta yang menjadi variabel independen adalah Tingkat investasi (X_1) dan jumlah tenaga kerja (X_2).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka model yang akan digunakan pada penelitian ini dispesifikasikan dalam fungsi matematis, sebagai berikut:

$$Y_1 = f\{X_1, X_2\}$$

Dimana :

Y_1 = Produk Domestik Regional Bruto

X_1 = Tingkat Investasi

X_2 = Tenaga kerja

Dari fungsi matematis tersebut, kemudian dispesifikasikan ke dalam model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Produk Domestik Regional Bruto

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi Tingkat investasi

β_2 = Koefisien regresi tenaga kerja

X_1 = Tingkat Investasi

X_2 = Tenaga kerja

ε = Error term

Fungsi matematis yang berikutnya adalah :

$$Y_2 = f\{Y_1\}$$

Dimana :

Y_2 = Pendapatan Asli Daerah

Y_1 = Produk Domestik Regional Bruto

Dari fungsi matematis tersebut, kemudian maka model regresi linier sederhana:

$$Y_2 = C_0 + C_1 Y_1 + \varepsilon$$

Dimana :

Y_2 = Pendapatan Asli Daerah

C_0 = Konstanta

C_1 = Koefisien regresi PDRB

Y_1 = Produk Domestik Regional Bruto

X_2 = Tenaga kerja

ε = Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Investasi, Tenaga Kerja, PDRB terhadap PAD .

Tabel 1. Hasil uji Normalitas

Test	Berganda	Sederhana
Test Statistic	0,23	0,264
asympt. Sig. (2- tailed)	0,143	0,46

Berdasarkan hasil diatas dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi untuk model regresi berganda dan

regresi sederhana lebih besar dari 0,05 yang berarti data yang digunakan berdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil uji Multikolinearitas

Variable	Berganda		Sederhana	
	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF
T.Investasi	0,133	0,7493	-	-
Tenaga Kerja	0,133	0,7493	-	-
PDRB	-	-	1	1

Berdasarkan hasil uji diatas dapat dilihat bahwa nilai variable X_1 , X_2 maupun Y_1 lebih besar dari 10,00 yang berarti tidak terjadi mutikolonieritas.

Tabel 3. Hasil uji Heteroskedastisitas

Variable	Berganda		Sederhana	
	t	Sig.	t	Sig.
T.Investasi	0,421	0,686	-	-
Tenaga Kerja	0,11	0,992	-	-
PDRB	-	-	0,1451	0,185

Dari hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena hasil signifikansi dari ketiga variable dari 2 model regresi lebih besar dari 0,05.

Berikut ini adalah hasil analisis pengaruh Tingkat investasi, Tenaga kerja dan PDRB terhadap PAD Kota Jayapura. Hasil analisis dan pembahasan akan disajikan menjadi dua estimasi model yaitu yang pertama bagaimana pengaruh tingkat investasi dan tenaga kerja sebagai variable independent terhadap PDRB sebagai variable dependent dan Pengaruh PDRB sebagai variable independent terhadap PAD sebagai variable dependent .

Teknik Analisis yang digunakan adalah analisis jalur yaitu suatu teknik pengembangan dari regresi linier berganda. Teknik ini digunakan untuk

menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X_1 X_2 terhadap Y_1 serta dampaknya terhadap Y_2 . Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung.

Analisis Pengaruh Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari hasil Uji regresi berganda Tingakt Investasi dan Tenaga kerja Terhadap PDRB dapat di peroleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil uji regresi

Koefisien	Nilai	Signifikan
R	0,974	0,001
R Square	0,948	0,001
Adjusted R2	0,942	0,001
b	0,974	0,307

Tabel 5. Hasil uji variable

Variable	F	T/parsial	Sig. F	Sig. T
Tingkat Investasi	25,418	1,103	0,001	0,307
Tenaga Kerja	25,418	1,547	0,001	0,166

Nilai koefisien *adjusted R-squared* dari hasil regresi adalah 0,844 Angka tersebut menunjukkan bahwa 84,4% variasi output PDRB dijelaskan oleh variabel jumlah investasi, tenaga kerja, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikuti/diluar model. Selanjutnya akan dilakukan analisis uji parsial $\alpha=5\%$.

Pada bagian uji variable (uji F) terlihat bahwa secara simultan variabel-variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y_1 yang ditunjukkan dari nilai Sig. $0,001 < \text{Alpha } 5\%$ Yang berarti uji statistik F telah signifikan.

Pada coefficients variabel (X_1), (X_2), secara simultan terhadap (Y_1) dimaksudkan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen.

Pada koefisien, uji t/parsial terlihat bahwa variabel X_1 dan X_2 secara statistik memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Y_1 yang ditunjukkan oleh nilai Sig 0.307 dan 0,166 lebih besar dari Alpha 5% yang berarti uji parsial tidak signifikan. Jika Tingkat investasi naik sebesar 1 maka PDRB akan naik sebesar 39,7 juta

Dari hasil regresi diatas bisa dijelaskan bahwa secara simultan Tingkat investasi dan tenaga kerja berpengaruh terhadap PDRB , hal ini disebabkan bahwa ketika sektor perekonomian hendak memperbesar output maka di perlukan penambahan modal yang pada penelitian ini di dapatkan dari pembentukan modal yang ada di Kota Jayapura, PMA maupun PMDN nya. Namun penambahan modal ini

tidak serta merta meningkatkan output dari sektor perekonomian guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi SDM yang berkualitas tentu menjadi salah satu modal utama demi melaksanakan tujuan tersebut. Jadi ketika Modal ditanamkan ke dalam sektor-sektor perekonomian maka secara otomatis tenaga kerja pun akan terserap guna memaksimalkan output dari sektor yang bersangkutan selain faktor teknologi serta sumberdaya. Setelah itu jika diuji secara parsial maka Tingkat investasi dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa data investasi yang digunakan dalam penelitian bukan merupakan akumulasi setiap tahun yang lalu melainkan penanaman modal yang terjadi hanya pada satu tahun berlaku. Sedangkan untuk tenaga kerja, menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan data tenaga

kerja yang cenderung tidak stabil, tidak sejalan dengan Pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura yang secara umum mengalami kontraksi positif setiap tahunnya. Secara ekonomi hal tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat investasi dan tenaga kerja harus secara bersama sama berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi jika investasi masuk pada sektor ekonomi namun tidak dibarengi tenaga kerja yang memadai maka pertumbuhan ekonomi tidak dapat tercapai begitu pula sebaliknya.

Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari hasil Uji regresi sederhana PDRB Terhadap PAD dapat di peroleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil uji regresi

Koefisien	Nilai	Signifikan
R	0,938	0,001
R Square	0,879	0,001
Adjusted R2	0,844	0,001
b1	0,397	0,307
b2	0,557	0,166

Tabel 7. Hasil uji variable

Variable	F	T/parsial	Sig. F	Sig. T
PDRB	146,544	12,106	0,000	0,000

Nilai koefisien *adjusted R-squared* dari hasil regresi adalah 0,942 Angka tersebut menunjukkan bahwa 94,2% variasi output PAD dijelaskan oleh variabel PAD, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikuti/diluar model. Selanjutnya akan dilakukan analisis uji parsial dengan $\alpha=5\%$.

Pada bagian uji variable (uji F) terlihat bahwa secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y2 yang ditunjukkan dari nilai Sig. 0,000 < Alpha 5% Yang berarti uji statistik F telah signifikan.

Pada coefficients variabel Y1 secara simultan terhadap (Y2) dimaksudkan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen.

Pada koefisien, uji t/parsial terlihat bahwa variabel Y1 secara statistik memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y2 yang ditunjukkan oleh nilai Sig 0.000 dan lebih kecil dari Alpha 5% yang berarti uji parsial sudah signifikan. Jika PDRB naik sebesar 1 maka PAD naik sebesar 974 Miliar.

Berdasarkan hasil uji diatas dapat dijelaskan bahwa Secara simultan maupun secara parsial PDRB berpengaruh besar serta positif terhadap PAD di Kota Jayapura. Hal ini sesuai asumsi dasar penulis bahwa

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Yang artinya kesejahteraan daerah akan mensejahterakan para penduduknya. Hal ini akan membuat kemampuan masyarakat secara finansial meningkat, sehingga terjadi naiknya barang dan jasa dari sisi permintaan. Perilaku konsumtif masyarakat ini tentu bukan hanya berpengaruh pada meningkatnya usaha maupun industri ekonomi di Kota Jayapura dari segi pendapatan, namun hal ini menjadi potensi bagi daerah untuk memungut PAD mereka secara optimal. Seperti contoh dapat kita ambil pungutan retribusi dari jasa yang di berikan pemerintah dalam jasa umum pada penerimaan retribusi yang meningkat ini disebabkan kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa yang ada semakin besar. Hal ini dikarenakan masyarakat secara finansial mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi atas fasilitas yang terus mereka nikmati. Tak hanya retribusi namun juga pajak, seperti pajak Restoran pada tahun 2011-2015, dimana perilaku masyarakat semakin konsumtif dalam membelanjakan pendapatan mereka yang akhirnya pendapatan dari usaha restoran maupun rumah makan sejenis menjadi meningkat, hal ini secara tidak langsung menarik

perhatian para pengusaha untuk merealisasikan modal mereka untuk membangun restoran maupun rumah makan. Sehingga pajak yang diterima daerah akan semakin besar karena selain jumlah ketersediaan barang dan jasa pun semakin variatif .

Pengaruh Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PAD melalui PDRB

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat di simpulkan bahwa terjadi pengaruh atau mediasi antara variable X1 dan X2 terhadap Y2 melalui Y1, Yang berarti tingkat investasi dan tenaga kerja dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah melalui PDRB secara tidak langsung dengan uji analisis jalur. Analisis jalur dapat digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X_1 X_2 terhadap Y1 serta dampaknya terhadap Y2. Dari hasil analisis jalur tersebut kita dapat melihat besarnya pengaruh yang terjadi secara tidak langsung X1 dan X2 terhadap Y2 melalui Y1 Serta pengaruh secara langsung Y1 terhadap Y2 sebagai berikut :

Pengaruh Tingkat Investasi Terhadap PAD melalui PDRB

Pengaruh X1 melalui Y1 terhadap Y2 adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y1 dengan nilai beta Y1 terhadap Y2 yaitu : $(b_1 \times c_1) 0,397 \times 0,974 = 0,387$. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y2 adalah 0,397. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung terhadap Y1 sebesar 0,397 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,974 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y1 mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y2. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat investasi di Kota Jayapura dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang disalurkan melalui sektor-sektor perekonomian. Dalam hal ini naiknya pendapatan perkapita suatu daerah tidak terlepas dari peran pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Besarnya modal yang ditanamkan dalam setiap sektor perekonomian telah merangsang peningkatan kapasitas produksi berupa barang maupun jasa sehingga pendapatan perkapita daerah secara otomatis meningkat. Meningkatnya pendapatan perkapita suatu daerah dapat di jadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam daerah tersebut, yang mana meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat diartikan bahwa selain pesatnya perkembangan perekonomian di suatu daerah juga menunjukkan kemandirian masyarakat dalam memperoleh penghasilan dari setiap kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Selain itu dari penjelasan dan hasil analisis tersebut dapat

memperkuat asumsi bahwa investasi memiliki peran ganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah, Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan ke dalam setiap aktifitas ekonomi yang ada.

Jika modal perusahaan semakin besar maka output yang dihasilkan pun secara langsung akan semakin besar, namun hal ini secara tidak langsung meningkatkan kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja demi memaksimalkan modal atau sumber daya yang ada. Hal ini secara tidak langsung menjadi celah-celah potensi bagi daerah dalam memungut kewajiban para pelaku ekonomi demi meningkatkan PAD. Jika kita melihat masuknya investasi asing dalam bentuk portofolio, dimana ketika investor menerbitkan dana dalam bentuk surat berharga pada pasar modal, saham dan obligasi hal membuka peluang bagi pendatang baru dalam membentuk usaha baru dalam sektor perekonomian yang ada di Kota Jayapura seperti pada industri pengolahan yang membutuhkan tambahan modal demi kelangsungan hasil outputnya kedepan. Atau ketika ditinjau dari investasi asing secara langsung dengan menanamkan modalnya kepada suatu perusahaan yang akhirnya memberikan andil dalam alih teknologi, keterampilan dan manajemen yang bersifat jangka panjang atau permanen (membeli/akuisisi perusahaan), Investasi ini akan merangkak masuk ke dalam sektor perekonomian seperti perkembangan konstruksi yang terus meningkat, peningkatan tersebut tentu tidak terlepas dari faktor kemampuan dana modal dalam melaksanakan kegiatan produksinya.

Jika kita lihat perkembangan Konstruksi di Kota Jayapura dari tahun 2011 - 2015 menunjukkan bahwa secara tidak langsung menjadi keuntungan bagi pos penerimaan PBB untuk memungut pajak dari banyaknya bangunan yang berdiri di atas Kota Jayapura. Hal ini tentu sangat terkait dan merupakan potensi yang menjanjikan jika melihat pertumbuhan sektor konstruksi yang ada di Kota Jayapura meningkat setiap tahunnya. Selain itu jika kita melihat modal dalam negeri yang ditanamkan pemerintah maupun swasta ke dalam sektor pengadaan listrik, air dan gas maupun usaha industri serta konstruksi, hal ini akan menyebabkan konsumsi listrik, air, maupun gas akan semakin meningkat sesuai kebutuhan masyarakat atau perusahaan. Hal tersebut membuat pemerintah memungut pajak penerangan jalan umum dari tahun 2011 - 2015 menjadi semakin tinggi, kemudian meningkatnya pembangunan usaha di Kota Jayapura dalam bentuk fisik tentu menjadi potensi tersendiri bagi pos penerimaan retribusi perijinan tertentu untuk lebih teliti dan memaksimalkan pemungutan retribusi dari ijin usah tertentu di Kota Jayapura seperti yang menonjol setiap tahunnya yaitu retribusi ijin gangguan maupun retribusi usaha minuman beralkohol.

Kemudian Berkembangnya nilai tambah pada sektor Perdagangan hotel dan restoran secara tidak langsung

akan meningkatkan pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran, juga retribusi jasa umum, dengan penjelasan bahwa meningkatnya sektor perekonomian pada perdagangan serta restoran/rumah makan akan meningkatkan pajak parkir serta retribusi atas jasa parkir di pinggir jalan bagi usaha maupun restoran/rumah makan yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai. Kemudian konsumsi masyarakat yang tinggi karena kemampuan keuangan mereka atas Hotel dan restoran membuat pendapatan pada hotel serta restoran yang ada di Kota Jayapura semakin meningkat, ini menyebabkan pungutan pajak atas hotel dan restoran tersebut meningkat pula sesuai ketentuan yang berlaku dari pemerintah daerah Kota Jayapura

Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap PAD melalui PDRB

Pengaruh X2 terhadap Y2 melalui Y1 adalah nilai beta X2 terhadap Y1 dengan nilai beta Y1 terhadap X2 yaitu : $(b_2 \times c_1) 0,557 \times 974 = 0,542$. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Y2 adalah 0,542. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,557 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,542 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dari pada nilai pengaruh tidak langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung X2 melalui Y1 mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap Y2. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara langsung tenaga kerja memiliki pengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah namun tidak signifikan. Hal ini membuktikan bahwa peranan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi membawa dampak yang besar terhadap kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah.

Tenaga kerja sebagai komponen pertama dalam pembangunan ekonomi memperlihatkan perannya dalam meningkatkan output serta memperluas pasar produksi jika ditinjau dari sisi permintaan. Semakin luasnya pasar membuat daya saing ekonomi semakin tinggi pula sehingga tenaga kerja secara alami akan menciptakan inovasi serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi produksi akan permintaan barang dan jasa sehingga barang dan jasa yang dihasilkan akan semakin bervariasi sehingga kebutuhan masyarakat pun akan terpenuhi dan timbul lah income atau pendapatan, dari sisi inilah pembangunan ekonomi pun dapat mulai terlaksana. Efek berantai dari semakin tingginya tenaga kerja yang tersalur dalam sektor perekonomian membuat kebutuhan akan modalpun semakin berbanding lurus sehingga perusahaan maupun industri ekonomi di suatu daerah akan membuka peluang sebesar besarnya bagi investor untuk menanamkan modalnya. Masuknya investasi di Kota Jayapura pun secara tidak langsung tentu akan menyerap tenaga kerja produktif yang ada di Kota Jayapura sesuai analisis dan pembahasan penulis sebelumnya, tenaga kerja tersebut akan terserap ke dalam sektor-sektor perekonomian dengan tenaga kerja

manusia sebagai komponen utamanya seperti, hotel, restoran, perdagangan dan industri pengolahan di Kota Jayapura yang meningkat, hal inientunya akan berdampak pada semakin banyaknya tenaga kerja dalam sektor ekonomi ini akan menyebabkan output semakin meningkat, dan jika output dari perekonomian semakin meningkat maka potensi daerah dalam memungut pajak dan retribusi akan meningkat seperti pada pajak hiburan dan retribusi jasa umum Dapat dijelaskan jika tenaga kerja terserap ke dalam sektor jasa-jasa yang didalamnya terdapat jasa hiburan dan tempat rekreasi yang membutuhkan tenaga kerja manusia tentu akan meningkatkan pajak tempat hiburan serta retribusi jasa umum pemerintah Kota Jayapura dalam hal jasa parkir kendaraan.

Upaya-upaya Peningkatan PAD Kota Jayapura.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan atas masalah yang terjadi pada bab – bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan dan membahas upaya-upaya apa saja yang mampu meningkatkan PAD Kota Jayapura menjadi lebih meningkat :

1. **Tingkat Investasi Terhadap PAD melalui PDRB**
Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan PAD melalui PDRB adalah dengan memperluas/mempermudah akses permodalan bagi masyarakat/perusahaan dalam melaksanakan kegiatan produksinya, serta jika ditinjau dari nilai tambah sektor ekonomi pada PDRB Kota Jayapura maka upaya lanjutan setelah melakukan akses permodalan adalah meningkatkan fasilitas serta jasa umum pemerintah demi menunjang kebutuhan perusahaan atau masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi yang akan memiliki dampak timbal balik kepada penerimaan retribusi jasa umum di kota jayapura. Upaya berikutnya jika kita melihat tingginya pajak dan retribusi sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan asli daerah maka sumber-sumber wajib pajak tersebut harus lebih di optimalkan. Seperti meningkatkan pembangunan fisik konstruksi di Kota Jayapura yang berupa tempat usaha perdagangan, hotel dan restoran yang pada pos penerimaan PAD merupakan pos pajak dengan penerimaan terbesar setiap tahunnya. Upaya selanjutnya jika kita melihat dari tingginya pajak parkir serta retribusi jasa umum maka akan timbul asumsi bahwa semakin banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut sehingga di rasa perlu untuk memperluas lahan parkir maupun fasilitas umum lainnya sebagai investasi jangka panjang bagi daerah jika melihat potensi penggunaanya selama beberapa tahun terakhir.
2. **Tenaga Kerja Terhadap PAD melalui PDRB**
Sesuai dengan hasil analisis dan pembahasan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu komponen utama dalam menjalankan atau menggerakkan roda perekonomian di Kota Jayapura, maka upaya yang perlu dilakukan

dalam meningkatkan PAD adalah meningkatkan/menciptakan lapangan kerja baru yang bisa bersumber dari tempat usaha milik pelaku usaha baru sesuai penjelasan sebelumnya agar tenaga kerja yang produktif di Kota Jayapura ini tidak tersiasikan. Tenaga kerja yang ada di Kota Jayapura jika kita amati secara sepintas lebih berorientasi kepada pekerja atau pegawai pemerintahan maupun institusi lainnya. Namun tenaga kerja yang produktif ini sangat dibutuhkan oleh sektor-sektor perekonomian yang sudah memiliki akses modal besar untuk memperluas pasar produksi serta meningkatkan output produksi mereka.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Tingkat Investasi (PMA + PMDN) di Kota Jayapura selama 10 Tahun Memiliki Pengaruh namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura (PDRB) namun secara tidak langsung tingkat investasi memiliki pengaruh yang besar terhadap PAD Kota Jayapura.
2. Tenaga Kerja di Kota Jayapura Memiliki Pengaruh namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura (PDRB) hal ini disebabkan perbedaan dinamika pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang ada di Kota Jayapura . Namun Tenaga kerja secara langsung memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap PAD Kota Jayapura.
3. Pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Jayapura setiap tahunnya selama 10 tahun. Hal ini disebabkan tingginya pertumbuhan ekonomi yang berarti meningkatnya kesejahteraan daerah yang membuat pendapatan perkapita masyarakat ikut meningkat melalui pendapatan (income) dari sektor ekonomi yang ada, hal ini menyebabkan semakin tingginya permintaan akan barang dan jasa yang membuat masyarakat menjadi konsumtif yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya akan pajak serta retribusi pada daerah .

DAFTAR PUSTAKA

Kaho, Josef Riwu. 1998. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
Mankiw, N.Gregory. 2000. Teori Makro Ekonomi. Edisi 4. Penerbit Erlangga. Jakarta.

- Marizka. 2009. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
- Natahiddin. 2001. Potensi Dana Perimbangan Pada Pemerintahan Daerah di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : UPP YKPN.
- Nazara, Suahasil. 1994. Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia. PrismaNo.8. LP3ES. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi, (2006), Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Sekaran, Uman, 2002, Research Method for Business : A skill Building Approach, 7th Edition, New York: John Wiley and Sons.
- Singgih, Santoso, 2000, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Jakarta: ElexMedia Komputindo
- Sukriy dan Halim Abdullah (c), 16-17 Oktober 2003, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali, Simposium Nasional Akuntansi VI: 1140-1159, Surabaya.
- Triwidodo, Pambudi, 2007, Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Bali, Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Todaro M.P, 2000, Economic Development, Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman. Inc.
- Ulum Rusydi, 2010, Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal, Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang,
- _____, Undang-undang no.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- _____, 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga Edisi Kedelapan.

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI PAPUA

Verdi Payung Tappi
Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak kendaraan roda dua terhadap pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua, Tahun 2013-2017.

Hasil pembahasan bahwa hubungan variable independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) dengan variable dependen (pajak kendaraan bermotor) menunjukkan hubungan yang positif serta signifikan hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,697 atau sebesar 69,70 persen sedangkan pengaruh variable independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) pengaruhnya ditunjukkan oleh koefisien determinan (r^2) sebesar 0,694 atau 69,40 persen, hal ini disebabkan karena dalam data penelitian ini penerimaan pajak kendaraan roda dua sangat memberikan andil yang baik dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua, atau pajak kendaraan roda dua memberikan pengaruhnya sebesar 69,40 persen terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan sisa sebesar 30,60 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang digunakan, persamaan regresi sebagai berikut: $Y = -1,509 + 6,940X$ persamaan garis regresi tersebut mempunyai pengertian bahwa konstanta dengan nilai -1,509 ini menunjukkan bahwa Jika variable independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) adalah konstan atau sama dengan nol (0) atau tidak mengalami perubahan, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan menurun sebesar Rp. 1,509.

Selain faktor pendukung peningkatan penerimaan pajak kendaraan roda dua adapula faktor penghambat antara lain : adanya mutasi kendaraan bermotor roda dua keluar daerah pada setiap tahun yang jumlah dan nilai pajaknya cukup banyak, adanya kendaraan roda dua yang belum daftar ulang (BDU) terjadi dalam setiap tahunnya, tingkat pertumbuhan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor roda dua tidak terlalu meningkat, kurangnya kepatuhan wajib pajak, dalam melakukan pemenuhan membayar pajak terkadang wajib pajak sangat sulit untuk melakukannya dan penghindaran tarif pajak progresif.

Kata Kunci : *pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kendaraan bermotor merupakan alat yang paling dibutuhkan sebagai media transportasi. Kendaraan dibagi menjadi dua macam, yaitu kendaraan Umum dan pribadi. Kendaraan umum merupakan kendaraan yang digunakan untuk angkutan massal, baik itu manusia maupun barang-barang, seperti bus, kereta api, angkutan umum adalah merupakan kendaraan yang bersifat umum dan sering dipergunakan sebagai alat transportasi massal. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang digunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi. Kendaraan itu berupa mobil dan motor sebagai alat transportasi pribadi yang sering digunakan masyarakat.

Pesatnya kemajuan jaman, membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi, untuk mencapai suatu tujuan membutuhkan kendaraan, baik yang digunakan secara pribadi maupun umum, kendaraan bermotor membuat efisiensi waktu dan tenaga karena diciptakan memang untuk membantu aktivitas manusia. Melihat kondisi saat ini, kendaraan roda dua

atau motor adalah pilihan yang praktis bagi orang yang memilih berkendara pribadi, selain praktis, motor adalah kendaraan yang bebas macet dan irit bahan bakar minyak, sehingga motor merupakan kendaraan yang menjadi pilihan masyarakat luas, karena fungsinya sebagai alat transportasi yang praktis,

kendaraan roda dua atau motor menjadi pilihan favorit masyarakat. Motor dipilih karena harganya yang bisa dijangkau oleh hampir semua kalangan masyarakat. Pembayaran bisa dilakukan secara kredit, selain itu bisa melihat bahwa penawaran bermacam-macam motor menjadi daya tarik tersendiri, setiap merek melakukan promosi besar-besaran dengan harga dan jaminan, slogan yang menyerukan motor paling hemat menjadi kata-kata favorit dalam promosi motor, hal itu sangat relevan dengan adanya harga bahan bakar minyak yang kian melambung.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah

di Indonesia, yaitu mulai 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah-daerah otonom dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta membangun daerahnya. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah otonom.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah. Semangat otonomi daerah membawa reformasi pula dalam undang-undang pajak daerah, maka pada tahun 2000 diberlakukan perubahan pertama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang lahir sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Mengingat pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan yang pada dasarnya sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban tersebut dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan yang dapat saling melengkapi antara peraturan pajak pusat dan pajak daerah. Dalam perkembangan penerapan undang-undang tersebut, pemerintah dan DPR merasa perlu pula melakukan perubahan dan penyempurnaan tersebut seiring dengan perkembangan situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar. Dengan terbentuknya Provinsi Papua sebagai daerah otonom pada awal 2001 maka Provinsi Papua perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan perekonomian salah satunya dengan pemungutan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Salah satu pajak provinsi diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor. Pembayaran pajak kendaraan bermotor biasanya dilayani di saat masing-masing daerah/kota, untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraannya. Besar kecilnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam rangka pemenuhan pendapatan pajak daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, mencerminkan keberhasilan

usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Sedangkan pajak daerah merupakan salah satu faktor penentu tingkat pendapatan asli daerah. Fungsi-fungsi pemerintahan daerah yaitu pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan dapat dilaksanakan secara efektif apabila kemampuan fiskal/pajak dari daerah tersebut dikelola dengan baik. Dengan demikian, apabila pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pusat dan juga daerah semakin leluasa dalam membelanjakan penerimaan mereka sesuai dengan prioritas pembangunan daerah mereka. Kemampuan pajak daerah ini dapat diukur setiap tahunnya melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (Rian Rochadi Ismail, 2012).

Penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah provinsi Papua adalah jenis pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Didalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Kemudian dalam mewujudkan tercapainya kesatuan ekonomi dalam rangka wawasan nusantara, maka pengaturan pajak kendaraan bermotor oleh daerah dilaksanakan dalam pola keterpaduan dan keseragaman secara nasional. Fenomena masalah yang ada berkaitan pajak kendaraan bermotor adalah, banyak diantara pemilik kendaraan tidak melakukan BBNKB kedua, sehingga daerah Papua hanya menerima populasi kendaraan saja tanpa memperoleh penerimaan pajak, karena persoalan itu, maka penjualan kendaraan bermotor di Provinsi Papua yang didatangkan dari luar Papua terus meningkat, seharusnya ini harus berbanding lurus dengan penerimaan pajak kendaraan tetapi hal tersebut tidak terjadi di Provinsi Papua, Data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi dan potensi PKB daerah Provinsi Papua mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2011 - tahun 2012 sampai 2013 mengalami kenaikan rata-rata 5 persen kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan data diatas terlihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khususnya kendaraan roda dua yang diperoleh Provinsi Papua terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitu juga penerimaan pajak kendaraan bermotor yang juga terus meningkat setiap tahunnya. Di lihat dari kontribusi PKB belum terlihat baik karena persentase

kontribusi PKB masih kecil dibawah 50% dan lebih kecil dibandingkan dengan potensi PKB yang ditargetkan. Kondisi ini tentu saja menggambarkan masalah pada kontribusi PKB yang masih jauh dari harapan Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini membuat Pemerintah melakukan iintensifikasi penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan melakukan mobil keliling untuk mempermudah akses masyarakat untuk membayar pajak kendaraan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin menelaah lebih dalam mengenai tentang kondisi pajak kendaraan roda dua di Provinsi Papua dengan mengajukan judul “*Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Roda Dua Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Papua*”

Perumusan Masalah

1. Berapa besar pengaruh pajak kendaraan roda dua terhadap pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua Tahun 2013-2017?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan roda dua di Provinsi Papua Tahun 2013-2017?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak kendaraan roda dua terhadap pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua Tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua, Tahun 2013-2017.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

- a) Manfaat Teoritis
Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara mendalam dibidang perpajakan khususnya mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya pajak kendaraan roda dua.
- b) Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi bahan informasi atau masukan, untuk mengetahui persoalan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan roda dua sebagai pendapatan pajak daerah provinsi.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Untuk dapat mencapai tujuan ini,

negara harus melakukan pembangunan di segala bidang. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material/sosial, Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan ini, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemungutan pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Soemitro (2003) menyebutkan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara meningkatkan pelayanan publik. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan nasional. Pajak dalam pengelolaannya, ada beberapa pajak yang masuk ke pemerintah pusat dan ada yang masuk ke daerah-daerah. Pajak yang pengelolaannya masuk ke dalam pemerintah pusat antara lain: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Prof. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku Siti Resmi, menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan Djajadiningrat dalam buku Siti Resmi, mengungkapkan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak menurut Brotodiharjo (1995:9), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Iuran rakyat kepada negara, Artinya yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa sejumlah uang yang disetorkan kepada kas negara.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Artinya pajak dipungut berdasar Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan terdapat sanksi bagi yang melanggar.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi langsung dari negara. Artinya dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal atau kontraprestasi langsung oleh pemerintah kepada pembayar pajak.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Artinya pendapatan pemerintah yang didapat dari pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pajak daerah asli dan dan pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diberikan kepada daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah, kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab II Bagian Satu tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana undang-undang terbaru tersebut memberikan mandat atau wewenang kepada daerah untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, dimana jenis pajak :

1. Jenis Pajak Provinsi adalah :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota, terdiri atas :
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Teori pembangunan dari bawah berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada daerah daripada kepada Pemerintah Pusat karena mereka dapat melihat manfaat dalam kemudahan dan pembangunan di daerah mereka. Meskipun demikian makin rendah tingkat pemerintahan daerah maka makin dekat antar mereka yang mengenakan pajak dengan mereka yang membayar pajak. Kebebasan untuk menentukan ruang lingkup, metode penilaian dan tarif pajak sendiri jelas akan mendorong kebebasan dan fleksibilitas dalam pembiayaan pemerintahan daerah. Tanggungjawab atas penilaian atau pemungutan suatu pajak atau retribusi tidak selalu bersamaan dengan kemudahan memperoleh hasilnya. Alokasi tanggungjawab untuk melakukan pengenaan dan pemungutan pajak tergantung pada sejumlah faktor : pertama; tingkat kemampuan yang dibutuhkan dan tersedianya tenaga tersebut di tingkat daerah tertentu. Tenaga terampil mungkin terbatas dan sulit bagi pemerintah daerah untuk mempekerjakannya. Tiga faktor lainnya, kalau obyek dari setiap wajib pajak, khususnya suatu perusahaan melampaui batas-batas suatu daerah maka pengenaan secara terpusat mungkin diperlukan.

Penetapan dan pemungutan pajak harus didukung dengan pengawasan yang efisien. Keterlambatan dalam membayar suatu pajak atau retribusi seringkali dikenakan tindakan dengan mengenakan denda dalam bentuk persentase atas jumlah pajak yang terhutang, sanksi apabila tidak membayar pajak dapat dikenakan dalam berbagai bentuk :

- 1) Tindakan kriminal menyangkut harta kekayaan melalui penahanan dan hukuman penjara;
- 2) Tindakan perdata yang sama dengan pengembalian hutang pribadi yang dilakukan melalui penyitaan dan penjualan kekayaan
- 3) Penyitaan dan penjualan langsung atas kekayaan
- 4) Menghentikan pelayanan
- 5) Tidak ada tindakan sama sekali

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan mberoda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak). Dari sejumlah besar pajak yang berlaku dan dipungut bagi daerah, salah satu diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Mengenai PKB dapat dikemukakan sebagai berikut: Pajak Kendaraan Bermotor termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah). Dipungut dari pemegang-pemegang kendaraan bermotor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau, memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin atau juga, yang tidak semata-mata

menggunakan bensin sebagai bahan bakar. Selanjutnya dalam Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 pasal 1 dikutipkan dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak karena memang :

- 1) Kendaraan bermotor yang digerakkan dengan motor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau oleh yang memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin, terlepas dari hal apakah motor itu khusus diperuntukkan guna dipakai dengan minyak tanah atau dengancampuran minyak tanah dan bensin;
- 2) Segala kendaraan bermotor lainnya, yang tidak digerakkan oleh motor yang semata mata memakai bensin sebagai bahan pembakar
- 3) Kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor yang semata-mata memakai bensin sebagai bahan pembakar tetapi mempunyai berat total yang diizinkan 5.500 kg atau lebih dan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh motor dengan semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan pembakar, yang mempunyai berat total yang diizinkan 3.500 kg atau lebih.
- 4) Kendaraan bermotor yang mempunyai berat total yang diperkenankan kurang dari 3.500 kg, kecuali yang telah dikenakan pajak rumah tangga atau yang dibebaskan dari pajak rumah tangga.

Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.

Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Pelayanan pemungutan pada Samsat secara umum terdapat enam pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Baru.
2. Pelayanan Kendaraan Bermotor Tukar Nama.
3. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Khusus

4. Pendaftaran Pengesahan STNK Setiap Tahun
5. Pendaftaran Perpanjangan STNK Setelah 5 Tahun
6. Pendaftaran Ranmor Pindah Keluar Daerah.

Pengertian Kendaraan Roda Dua

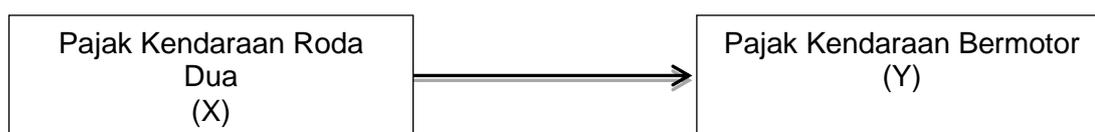
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Kendaraan roda dua adalah : semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga, termasuk alat-alat berat dan besar yang operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Sepeda motor adalah kendaraan beroda duayang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat.

Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2013:93) adalah metode konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam suatu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi serta pengaruh penerimaan pajak kendaraan roda dua serta seberapa besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua. Dari penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel bebas atau variabel independen (X) yaitu pajak kendaraan roda dua dan variabel terikat atau variabel dependen (Y) yaitu pajak kendaraan bermotor, dan untuk memberikan pemahaman yang baik maka penulis membuat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar I
Kerangka Pikir



Sumber : Kreasi Penulis, 2018

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersifat assosiatif kuantitatif. Adapun maksud dari penelitian assosiatif kuantitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:36) adalah “suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variable atau lebih. ”Dari penelitian ini ada dua variabel, yaitu variable bebas atau variable independen (X) yaitu pajak kendaraan roda dua dan variable terikat atau variable dependen (Y) yaitu pajak kendaraan bermotor.

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua melalui Samsat Jayapura dengan alamat Jalan Ahmad Yani No. 34 kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, dan Kantor Samsat Jayapura, jalan raya Abepura, dengan waktu penelitian kurang lebih 3 bulan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan atau digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat data pajak kendaraan roda dua dan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data terhadap pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Papua dan Samsat dengan dokumentasi (proses mengumpulkan catatan-catatan / data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas / kantor / instansi atau lembaga

terkait. Laporan-laporan yang terkait dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Roda 2 dan Pajak Kendaraan Bermotor yang menyangkut realisasi dan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Dan data lain diperoleh dengan cara mengumpulkan dengan studi pustaka dari buku-buku, laporan penelitian, buletin, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan model regresi linear sederhana (Single Linier Regression Method). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 2012 Edisi Revisi). Metode yang digunakan adalah menggunakan rumus regresi liner sederhana seperti :

$$Y = \alpha + \beta x$$

Keterangan

Y = Pajak Kendaraan Bermotor

α = Costanta

β = Koefisien

X = Pajak Kendaraan Roda Dua

(Damonar Gujarati, 2012, *Ekonometrika Dasar*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan komposisi data penelitian dari tahun 2013 – 2017 dimana telah diuraikan data penerimaan pajak kendaraan baik roda dua maupun kendaraan bermotor roda empat dan seterusnya pada Lampiran penelitian ini dan berikut adalah perkembangan penerimaan pajak kendaraan roda dua dan pajak kendaraan bermotor roda 4 keatas seperti pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.1
 Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan
 Bermotor Roda Dua
 Tahun 2013 - 2017

Tahun	PKBRD	Perkembangan (%)
2013	38.888.020.140	-
2014	43.208.911.250	11,11
2015	45.480.094.209	5,26
2016	47.806.289.875	5,11
2017	57.941.459.800	21,20

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (PKBRD) terus mengalami peningkatan dimana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar

21,20 persen, sedangkan peningkatan terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,11 persen, dengan rata-rata perkembangan pertahunnya berkisar 8,54 persen.

Tabel 4.2
Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Tahun 2013 – 2017

Tahun	PKB	Perkembangan (%)
2013	119.810.626.919	-
2014	143.113.364.063	19,45
2015	169.179.943.609	18,21
2016	182.204.827.610	7,70
2017	250.330.166.313	37,39

Sumber : data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terus mengalami peningkatan dimana peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017 sebesar 37,39 persen, sedangkan peningkatan terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,70 persen, dengan

rata-rata perkembangan pertahunnya berkisar 16,55 persen.

Pembahasan

Ringkasan hasil perhitungan analisis regresi antara retribusi daerah dan retribusi perizinan tertentu seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Print Out Persamaan Regresi

Keterangan	Nilai
Konstanta	-1,509
Koefisien Regresi	6,940
r	0,697
r ²	0,694
Persamaan Garis regresi Y = -1,509 + 6,940x	

Berdasarkan *print out* tersebut diatas maka dapat dijelaskan bahwa hubungan variabel independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) dengan variabel dependen (pajak kendaraan bermotor) menunjukkan hubungan yang positif serta signifikan hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,697 atau sebesar 69,70 persen sedangkan pengaruh variabel independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) pengaruhnya ditunjukkan oleh koefisien determinan (r²) sebesar 0,694 atau 69,40 persen, hal ini disebabkan karena dalam data penelitian ini penerimaan pajak kendaraan roda dua sangat memberikan andil yang baik dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua atau pajak kendaraan roda dua memberikan pengaruhnya sebesar 69,40 persen terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan sisa sebesar 30,60 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang digunakan

Dari tabel diatas diperoleh *print out* persamaan regresi sebagai berikut: $Y = -1,509 + 6,940x$ persamaan garis regresi tersebut mempunyai pengertian bahwa konstanta dengan nilai -1,509 ini menunjukkan bahwa jika variabel independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) adalah konstan atau sama dengan nol (0) atau tidak mengalami perubahan, maka

penerimaan pajak kendaraan bermotor akan menurun sebesar Rp. 1,509.

Nilai koefisien regresi variabel independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) sebesar 6,940 mengandung arti bahwa jika variabel independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) naik satu rupiah atau mengalami peningkatan 1 (satu) rupiah, maka akan menyebabkan kenaikan atau penambahan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 6.940.

Berdasarkan analisis data *print out* diatas maka dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di provinsi Papua selalu memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan baik itu pajak kendaraan roda dua, pajak kendaraan roda empat dan pajak kendaraan roda enam keatas, selalu memberikan kontribusi yang baik, dimana ini bisa dilihat dalam perkembangan penerimaan pajak kendaraan roda terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana rata-rata perkembangan penerimaan pajak kendaraan roda yaitu sebesar 8,54 persen per tahun ini menunjukkan bahwa setiap tahun pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan yang terjadi di Provinsi Papua.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor maka Badan Pelayanan Pajak bersama Samsat Provinsi Papua (Samsat Jayapura dan beberapa UPTD di daerah) melakukan upaya-upaya yang antara lain yaitu :

- 1) Peningkatan Sistem Pelayanan, Sistem pelayanan yang dibuat oleh Badan Pelayanan Pajak Samsat Jayapura ada 2 yaitu:
 - a. Gerai SAMSAT, Layanan gerai Samsat merupakan unit pelayanan STNK yang bersinergi dengan pelayanan Kantor Bersama Samsat, yang melayani pengesahan STNK satu tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem banking bank guna mendekatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, pelayanan ini dilakukan di mall atau pertokoan. Gerai Samsat sudah dimiliki oleh Samsat Jayapura. Letaknya di mall Jayapura, daerah Dok IX, Hamadi walaupun gerai Samsat ini baru dilakukan pada beberapa tahun lalu.
 - b. Samling, Samling adalah pelayanan mobil Samsat keliling dalam rangka memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi sehingga memberikan kemudahan untuk melayani pengurusan pengesahan STNK/Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahun. Samsat jayapura membuka samling di dekat lapangan Terminal PTC dan Taman Imbi Jayapura.
- 2) Pemberian Surat Panggilan, Wajib pajak yang telat membayar pajak ataupun menghindari untuk membayar pajak akan diberikan surat panggilan. Pertama kali akan diberikan surat pemberitahuan kemudian surat panggilan. Lalu apabila surat panggilan tersebut tidak ditanggapi maka diberikan surat teguran. Apabila wajib pajak tetap tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak maka akan dikenakan denda kepada wajib pajak tersebut. Contoh surat panggilan dapat dilihat pada lampiran.
- 3) Penagihan BDU, Melakukan penagihan terhadap kendaraan bermotor yang masih belum daftar ulang (BDU), khususnya kepada kendaraan-kendaraan yang memiliki potensi pajak kendaraan bermotor yang nilai tunggakannya besar.
- 4) Pemutihan Denda, melalui Peraturan Gubernur setiap tahun menerapkan pemberian pemutihan/pengurangan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan. Serta penghapusan sanksi administratif selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan (18 Agustus – 18 September setiap tahun).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Roda Dua.

Pajak kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu jenis pajak kendaraan bermotor yang memiliki potensi yang besar dalam menaikkan / meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pajak kendaraan bermotor menjadi pajak yang potensial yaitu:

Faktor Pendukung

- a) Tingginya tingkat jumlah kendaraan bermotor dan industri otomotif, produksi atau persediaan kendaraan bermotor yang terus meningkat dan Industri otomotif yang terus melakukan inovasi-inovasi dalam teknologimesin membuat para konsumen ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut. dengan begitu tingkat pembelian kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Sehingga dengan banyaknya pengguna kendaraan bermotor maka dapat dikatakan pajak kendaraan bermotor roda dua akan ikut terkena dampak yang positif.
- b) Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, menyebabkan timbulnya dorongan dalam dinamika masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Sehingga dinamika ini ikut mendorong meningkatnya potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua.
- c) Fasilitas kredit kepemilikan kendaraan roda dua yang mudah di Provinsi Papua, hal ini disebabkan pengkreditan kendaraan bermotor roda dua yang mudah, dengan tingkat uang muka yang terjangkau, tingkat bunga yang rendah, dan angsuran kredit yang tidak terlalu besar membuat para pengguna kendaraan bermotor roda dua banyak melakukan kredit kendaraan bermotor khususnya roda dua, dengan kemudahan kredit kendaraan bermotor maka jumlah subjek pajak kendaraan bermotor roda dua akan bertambah, dengan begitu potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua akan meningkat.
- d) Sarana transportasi umum yang kurang memadai, dengan tingkat aktivitas yang tinggi yang terjadi di Provinsi Papua, maka dibutuhkan pula transportasi yang seharusnya memadai, akan tetapi sepertinya belum mampu untuk mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman, sehingga membuat para warga lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum.

Faktor-faktor Penghambat

Selain faktor pendukung peningkatan penerimaan pajak kendaraan roda dua adapula faktor penghambat antara lain :

- a) Adanya mutasi kendaraan bermotor roda dua keluar daerah pada setiap tahun yang jumlah dan nilai pajaknya cukup banyak. Akibat dari kondisi tersebut, penerimaan pajak kendaraan bermotor

roda dua mengalami potential loss dari target yang sudah ditetapkan.

- b) Adanya kendaraan roda dua yang belum daftar ulang (BDU) terjadi dalam setiap tahunnya.
- c) Tingkat pertumbuhan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor roda dua tidak terlalu meningkat.
- d) Kurangnya kepatuhan wajib pajak, dalam melakukan pemenuhan membayar pajak terkadang wajib pajak sangat sulit untuk melakukannya. Wajib pajak sering tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, belum daftar ulang kendaraan yang dimiliki, atau menghindari pajak kendaraan yang telah dikenakan. Penyebab terjadinya kurangnya kepatuhan wajib pajak bisa jadi karena jarak yang jauh dalam melakukan pembayaran pajak sehingga membuat wajib pajak malas untuk melakukan pembayaran. Atau karena sanksi administrasi yang ditetapkan dianggap tidak terlalu besar sehingga membuat wajibpajak merasa masih mampu dalam membayar sanksi tersebut dan cenderung menyepelekan pembayaran pajak.
- e) Penghindaraan tarif pajak progresif, tarif pajak progresif ditetapkan untuk setiap wajibpajak pribadi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Penghindaraan tarif pajak progresif hampir dialami oleh semua Samsat tidak hanya di Provinsi Papua, dikarenakan wajib pajak apabila membeli kendaraan yang bukan baru jarang mengganti nama dan juga terkadang wajibpajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu, sering tidak menggunakan namanya. Akan tetapi menggunakan nama anak/istrinya sehingga itu membuatkesulitan Samsat dalam melakukan penenaan pajak progresif.
- f) Kendaraan yang mutasi dari luar daerah, hambatan-hambatan yang menjadi alasan tidak tercapainya salah satunya kendaraan yang mutasi dari luar daerah. Kendaraan yang mutasi dari luar daerah lebih banyak yang tidak merobah plat kendaraan yang masuk daerah. Maksudnya banyak kendaraan yang sebelumnya berada di luar wilayah Papua kemudian masukke daerah Papuatetapi pemiliknya masih menggunakan tanda nomor kendaraan dari daerah asal, dengan begitu penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi loss penerimaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pembahasan melalui analisis yang telah dilakukan penulis pada bab sebelumnya maka dari hasil pembahasan tersebut ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Berdasarkan hasil pembahasan bahwa hubungan variable independen (pajak kendaraan bermotor

roda dua) dengan variable dependen (pajak kendaraan bermotor) menunjukkan hubungan yang positif serta signifikan hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,697 atau sebesar 69,70 persen sedangkan pengaruh variable independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) pengaruhnya ditunjukkan oleh koefisien determinan (r^2) sebesar 0,694 atau 69,40 persen, hal ini disebabkan karena dalam data penelitian ini penerimaan pajak kendaraan roda dua sangat memberikan andil yang baik dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Papua, atau pajak kendaraan roda dua memberikan pengaruhnya sebesar 69,40 persen terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan sisa sebesar 30,60 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model yang digunakan, persamaan regresi sebagai berikut: $Y = -1,509 + 6,940X$ persamaan garis regresi tersebut mempunyai pengertian bahwa konstanta dengan nilai -1,509 ini menunjukkan bahwa Jika variable independen (pajak kendaraan bermotor roda dua) adalah konstan atau sama dengan nol (0) atau tidak mengalami perubahan, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan menurun sebesar Rp. 1,509.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak kendaraan roda dua

1. Faktor Pendukung

- a. Tingginya tingkat jumlah kendaraan bermotor dan industri otomotif, produksi atau persediaan kendaraan bermotor yang terus meningkat dan Industri otomotif yang terus melakukan inovasi-inovasi dalam teknologi mesin membuat para konsumen ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut. dengan begitu tingkat pembelian kendaraan bermotor juga ikut meningkat. Sehingga dengan banyaknya pengguna kendaraan bermotor maka dapat dikatakan pajak kendaraan bermotor roda dua akan ikut terkena dampak yang positif.

- b. Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, menyebabkan timbulnya dorongan dalam dinamika masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Sehingga dinamika ini ikut mendorong meningkatnya potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua.

- c. Fasilitas kredit kepemilikan kendaraan roda dua yang mudah di Provinsi Papua, hal ini disebabkan pengkreditan kendaraan bermotor roda dua yang mudah, dengan tingkat uang muka yang terjangkau, tingkat bunga yang rendah, dan angsuran kredit yang tidak terlalu besar membuat para pengguna kendaraan bermotor roda dua banyak melakukan kredit

- kendaraan bermotor khususnya roda dua, dengan kemudahan kredit kendaraan bermotor maka jumlah subjek pajak kendaraan bermotor roda dua akan bertambah, dengan begitu potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua pun akan meningkat.
- d. Sarana transportasi umum yang kurang memadai, dengan tingkat aktivitas yang tinggi yang terjadi di Provinsi Papua, maka dibutuhkan pula transportasi yang seharusnya memadai, akan tetapi seperti ini belum mampu untuk mewujudkan transportasi yang aman dan nyaman, sehingga membuat para warga lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum.
2. Faktor-faktor Penghambat
 - a. Adanya mutasi kendaraan bermotor roda dua keluar daerah pada setiap tahun yang jumlah dan nilai pajaknya cukup banyak. Akibat dari kondisi tersebut, penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua mengalami potential loss dari target yang sudah ditetapkan.
 - b. Adanya kendaraan roda dua yang belum daftar ulang (BDU) terjadi dalam setiap tahunnya.
 - c. Tingkat pertumbuhan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor roda dua tidak terlalu meningkat.
 - d. Kurangnya kepatuhan wajib pajak, dalam melakukan pemenuhan membayar pajak terkadang wajib pajak sangat sulit untuk melakukannya. Wajib pajak sering tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, belum daftar ulang kendaraan yang dimiliki, atau menghindari pajak kendaraan yang telah dikenakan. Penyebab terjadinya kurangnya kepatuhan wajib pajak bisa jadi karena jarak yang jauh dalam melakukan pembayaran pajak sehingga membuat wajib pajak malas untuk melakukan pembayaran. Atau karena sanksi administrasi yang ditetapkan dianggap tidak terlalu besar sehingga membuat wajib pajak merasa masih mampu dalam membayar sanksi tersebut dan cenderung menyepelekan pembayaran pajak.
 - e. Penghindaran tarif pajak progresif, tarif pajak progresif ditetapkan untuk setiap wajib pajak pribadi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Penghindaran tarif pajak progresif hampir dialami oleh semua Samsat tidak hanya di Provinsi Papua, dikarenakan wajib pajak apabila membeli kendaraan yang bukan baru jarang mengganti nama dan juga terkadang wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu, sering tidak menggunakan namanya, akan tetapi menggunakan nama orang lain yang tidak tercantum dalam kartu keluarga sehingga itu membuat kesulitan Samsat dalam melakukan pengeunaan pajak progresif.

- f. Kendaraan yang mutasi dari luar daerah, hambatan-hambatan yang menjadi alasan tidak tercapainya salah satunya kendaraan yang mutasi dari luar daerah. Kendaraan yang mutasi dari luar daerah lebih banyak yang tidak merubah plat kendaraan yang masuk daerah. Maksudnya banyak kendaraan yang sebelumnya berada di luar wilayah Papua kemudian masuk ke daerah Papua tetapi pemiliknya masih menggunakan tanda nomor kendaraan dari daerah asal, dengan begitu penerimaan pajak kendaraan bermotor terjadi loss penerimaan.

Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran bagi pemerintah Provinsi Papua yaitu :

1. Melihat hasil penelitian ini, bahwa pengaruh pajak kendaraan roda dua sudah cukup baik oleh karena itu pemerintah harus lebih mengintensifkan lagi penerimaan pajak kendaraan roda dua.
2. Pajak kendaraan roda dua yang masih tertunggak diusahakan dalam waktu dekat harus dijalankan atau ditagih.
3. Wajib pajak yang ada di Provinsi Papua diupayakan agar membayar kewajibannya tepat waktu sesuai dengan waktu jatuh tempo.
4. Pemerintah Provinsi Papua harus tegas dalam memberlakukan balik nama atau mutasi kendaraan bermotor yang masuk ke Provinsi Papua, dengan cara memberikan denda/sanksi bagi pemilik kendaraan yang tidak melakukan mutasi dalam kurun waktu 3 bulan, lewat batas tersebut pemerintah memberikan denda 50 persen dari tarif pajak kendaraan dan berlaku untuk setiap 3 bulan berjalan.

Daftar Pustaka

- AG. Subarsono, Msi., MA, 2005. Analisis pengaruh pajak kendaraan roda dua terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor Yogyakarta.
- Depdagri, 1982, *Manual Administrasi Pendapatan Daerah*, PUAD, Jakarta
- Dimas wids. Hadari Nawawi, 1983. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Tiara Wacana.
- Gujarati Damonar, Alih Bahasa Sumarno Zain, 2012, *Ekonometerika Dasar*, edisi revisi, Erlangga Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1981, *Research Teori Metodologi*, Penerbit, PT Bina Nusantara, Jakarta.
- Kamalludin, Rustian, 1983, *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kaho, Josep Riwu, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Penerbit, Rajawali, Jakarta.

- Lansil, C.S.T, 1985, *Kitab Undang-undang Pemerintahan Daerah (KUPD)*, Penerbit, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Perwadarmita, W.J.S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ph, Soetrisno, 1983, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.

IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI PAPUA

Dr. Melmambessy Moses, MM

Wa Ariadi, SE., M.Si

Dosen STIE Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Sistem SIMDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dapat menghindari penyimpangan, penyelewengan, karena dengan sistem yang telah terprogram menyebabkan data yang di input harus berdasarkan data yang seharusnya dan tidak semau masukan data dapat dilakukan sebab ada penolakan dari sistem didalam program. Proses terbitnya SP2D lebih cepat sesuai ketentuan 1 – 2 hari bahkan dapat diselesaikan 1 hari bahkan hanya beberapa jam antara 1 – 3 jam sudah bisa sampai ketangan yang berwenang (bendaharawan atau rekanan).

Hasil analisis menunjukkan (multiple R) yang diperoleh sebesar 0,182 atau 18,20%, dan F ratio sebesar 0,118 yang artinya bahwa Faktor-faktor pada Prosedur (X_1), Pegawai (X_2), dan Sistem Jaringan (X_3), secara simultan berpengaruh terhadap keterlambatan Penerbitan SP2D. (Y) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Assets Daerah. Selanjutnya koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,33 atau 33 % menunjukkan bahwa variabel dependen (Y); dijelaskan oleh variabel independen faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada tahap Prosedur (X_1), Pegawai (X_2), Sistem Jaringan (X_3), sebesar 33,00 % sedangkan yang tidak dijelaskan sebesar 67,00 % (1 – 33,00%). Penyesuaian terhadap koefisien determinasi (adjusted R Square) yang diperoleh sebesar 0,94 atau 94,00 %, menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang belum dimasukkan dalam model penelitian setelah disesuaikan menjadi 0,06%.

Kata Kunci: *Prosedur, Pegawai, Sistem Jaringan dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana*

Pendahuluan

Latarbelakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 6 dijelaskan sebagai berikut “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Dengan demikian tugas pengelolaan sumber daya keuangan daerah menjadi kewajiban bagi manajemen pemerintah di daerah untuk melaksanakannya.

Untuk mewujudkan semua cita-cita tersebut diatas terkait dengan perlunya mekanisme pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) oleh pemerintah pusat, yang diharapkan mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manajemen pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan managerial dan informasi, data yang transparan yang dapat diketahui setiap saat oleh masyarakat. Dengan berjalannya waktu maka pemerintah Provinsi Papua telah menggunakan sistem informasi keuangan yang disebut dengan

SIMDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) yang merupakan sistem jaringan informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah.

Sumber informasi untuk sistem ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan serta dapat meminimalisasikan keterlambatan serta mengurangi tingkat kesalahan yang sering muncul dalam penyusunan laporan yang dibutuhkan termasuk penyusunan, penetapan dan pelaksanaan APBD. Selanjutnya prinsip pengelolaan keuangan daerah memiliki standart misalnya (a) berdasarkan suatu strategi planning, dan (b) Anggaran berbasis kinerja. Didalam pelaksanaan anggaran daerah harus dilandasi oleh *good governance* dan manajemen keuangan efisiensi (*cash management efficiency*). Untuk melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan daerah di Provinsi Papua, Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah yang terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu bagian pembukuan, bagian anggaran, bagian perbendaharaan dan bagian verifikasi menjadi sentral dalam pengontrolan sejak mulai dari pengajuan sampai pada penetapan, dan salah satu jenis pekerjaan yaitu penerbitan surat perintah membayar (SPM) ditangani oleh bagian perbendaharaan, baik untuk pembelajaran rutin maupun pembangunan.

Landasan Teori

Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Menurut Robert G. Murdick (1989;109) sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi dimana informasi masukan (input) direkam, disimpan dan diperoleh kembali (diproses) bagi keputusan (output) mengenai perencanaan, pengoperasian dan pengawasan.

Sesuai dengan maknanya maka istilah sistem informasi manajemen harus ditinjau dengan pendekatan sistem, dimana proses informasinya dilihat sebagai total sistem yang dapat dipergunakan:

- 1). Untuk perencanaan strategi, kebijakan dan pengambilan keputusan.
- 2). Untuk perencanaan Taktik dan pengambilan keputusan.
- 3). Untuk perencanaan operasional, pengambilan keputusan dan pengawasan.
- 4). Untuk proses transaksi, tanggapan terhadap pemeriksaan.

Prinsip dan Tujuan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah

Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat sebuah kehidupan dengan kompleksitas dan heterogenitas problematika yang tercakup didalamnya. Kompleksitas ini memerlukan sebuah bentuk penanganan dan pengelolaan kehidupan yang memerlukan pemikiran dan kemampuan manajemen yang strategik. Dalam proses mengarahkan program kegiatan yang sesuai dengan acuan peraturan yang telah disepakati, maka diperlukan sebuah struktur pembiayaan yang efisien dengan hasil yang maksimal, yakni pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, adil dan tanpa ada diskriminasi. Tujuan pembangunan dibidang ekonomi adalah pencapaian tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah dapat turut campur tangan secara efektif maupun secara pasif. Campur tangan pemerintah dalam pencapaian kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan yang harus tergambar dengan jelas dalam pengelolaan keuangan dan anggaran Negara/daerah tersebut.

Anggaran (*budget*) adalah suatu daftar atau pertanyaan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara/daerah yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan pengelolaan anggaran yaitu:

- a) (a).Kesejahteraan masyarakat: bahwa dengan pengelolaan anggaran yang baik, maka akan mendorong kearah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan yang tepat sasaran kemudian dapat tercipta ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.
- b) (b).Membuka kesempatan kerja: dengan sistem pengelolaan anggaran yang baik dan alokasi secara tepat dengan obyek-obyek vital akan menarik tenaga kerja (*investor*). Membuka lapangan kerja sehingga distribusi anggaran kepada para pekerja, hal ini dapat meningkatkan

daya beli masyarakat yang tinggi, dengan demikian kesejahteraan masyarakat juga dapat dicapai.

- c) (c). Mengurangi penganggura: efektifitas dan efisiensi anggaran dan perubahan alokasi anggaran kepada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagai bentuk perluasan lapangan pekerjaan baru.
- d) (d).Pelayanan masyarakat: indikator keberhasilan sebuah pemerintah adalah bagaimana masyarakat merasa terlayani dengan baik, tingkat kepuasan optimal. Masyarakat merasakan kepuasan maka masyarakat akan semakin sejahtera.

Keuangan Daerah (2006;28) adalah semua hak dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala sesuatu bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya daerah tersebut. Keuangan daerah dikelola dengan 4 (empat) prinsip yaitu:

- 1) Prinsip Kemandirian; prinsip ini mengarah kepada pengelolaan anggaran yang dikelola dengan pengurangan ketergantungan terhadap sumber keuangan yang bersifat pragmatis datang dari atas, tanpa ada usaha dan perlakuan sebuah inovasi dan penemuan sumber-sumber penerimaan baru, optimalisasi sumber daya daerah, peningkatan kualitas sumberdaya yang ada, sehingga akan mendorong perbaikan produktivitas yang akan mengarah pada perbaikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Prioritas: penggunaan skala prioritas objek-objek dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Adanya indikator dalam menentukan pilihan objek yang terbaik dari alternatif yang baik (*best of the best*).
- 3) Efisiensi, efektifitas dan ekonomi; efisiensi adalah input yang digunakan dialokasikan secara optimal dan baik untuk mencapai output yang menggunakan biaya terendah. Efektifitas adalah pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, dan ekonomis adalah penghematan input untuk mendapatkan output yang baik, karena semua input dibiayai dengan murah.
- 4) Disiplin Anggaran; penggunaan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. APBD merupakan ilustrasi yang digunakan dalam memberikan gambaran bagaimana pembangunan dilaksanakan dalam suatu daerah. Terdapat 3 (tiga) instrumen dalam melaksanakan pembangunan di daerah yaitu:

- 1). Pengelolaan keuangan daerah: merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari totalitas atau sistem keuangan daerah dengan sejumlah sub sistem yang ada didalamnya, antara lain:

- (a). Belanja Aparatur, terdiri dari beberapa jenis belanja Administrasi Umum (BAU), belanja operasi dan pemeliharaan (BOP), belanja modal.
 - (b). Belanja pelayanan Publik, terdiri dari belanja Administrasi Umum (BAU), belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP), Belanja Modal, Belanja bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Belanja Tidak disangka.
 - (c). Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan daerah dan Pemakaian Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah.
 - (d). Dana Perimbangan, yang terdiri dari bagi hasil Pajak/bukan Pajak, DAU, DAK dan bantuan keuangan dari Provinsi.
 - (e). Lain-lain Pendapatan yang Sah, yaitu dari bantuan Dana Kontjensi atau Penyeimbangan dari Pemerintah dan Dana Darurat.
- 2). Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dan Aparatur ; pada bagian ini menggunakan indikator sbb:
- (a). Pembangunan Bidang Agama, merupakan landasan moral, spritual dan etika yang semakin baik serta meningkatkan mutu pendidikan agama dalam proses pembangunan, hal ini untuk menjaga dan mempertahankan strategi dan kebijakan pembangunan.
 - (b). Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, yang meliputi beberapa program pembangunan kepada peningkatan kualitas SDM aparatur daerah, kemudian masing-masing program tersebut dijabarkan ke dalam sasaran, arah kebijakan, dan program indikatif.
 - (c). Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah Daerah, mengacu kepada terwujudnya aparatur yang berkualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola keuangan/anggaran daerah.
 - (d). Peningkatan Daya Beli, bertambahnya pendapatan masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran.
 - (e). Peningkatan derajat Kesehatan dan Gizi, meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirkan/meningkatnya status gizi balita meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (2008:36).
- 3). Pengembangan Prasaran dan Sarana pembangunan yang mencakup beberapa hal berikut ini:
- (a). Tersedianya sarana dan prasarana pembangunan yang memadai dan efektif berdasarkan analisis kebutuhan daerah.
 - (b). meningkatnya kualitas pelayanan.

- (c). Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa guna menunjang percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.
- (d). meningkatnya pemanfaatan sumber daya air yang lebih efisien, efektif secara adil dan merata dalam tatanan pengelolaan sumber-sumber air yang tangguh.

Dalam rangka memberikan arah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah untuk keseimbangan sub-sub belanja antara porsi belanja Rutin dan porsi Belanja pembangunan yang merupakan ilustrasi dan arah Pengelolaan Anggaran (2006:30)

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *explanatory*, yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh factor-faktor penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang terdiri dari, Prosedur, Staf Pengelola dan Sistem Jaringan. Untuk mengetahui pengaruh tersebut digunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS *for window* versi 20.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpul dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1). Data Primer adalah data yang dikumpulkan melalui tehnik wawancara langsung kepada staf pengelola, bendaharawan dan rekanan.
- 2). Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dalam bentuk dokumen-dokumen dari Pemerintah Provinsi Papua yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- 3). Studi Kepustakaan yaitu kajian terhadap literatur dan hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua yang berjumlah 87 orang. Sehingga jumlah populasi pada penelitian ini 87 orang.

Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (1983:94) apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar maka diambil 10-15% atau 20-25%. Berdasarkan pendapat tersebut maka penulis mengambil sampel hanya yang berhubungan langsung dengan penerbitan surat pencairan dana yaitu berjumlah 46 orang.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:

1. Kuisisioner
Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kuisisioner yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan atau kuisisioner secara langsung

kepada para responden. Kuesioner tersebut merupakan angket tertutup yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data pribadi responden dan bagian kedua yang digunakan untuk mendapatkan data tentang instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pernyataan-pernyataan dalam angket tertutup dibuat dengan menggunakan skala dengan nilai atau skor 1-5 misalnya untuk kategori pernyataan dengan jawaban sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu-ragu (RR), setuju (S) dan sangat setuju (ST)

2. **Kepustakaan**

Kepustakaan adalah pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi tentang pandangan para ahli yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini baik yang bersumber dari buku-buku literatur, jurnal ilmiah maupun peraturan perundang-undangan guna memperkuat kajian dalam penelitian ini.

Tehnik Analisa Data

Dari data hasil penelitian tersebut diatas kemudian di analisis dengan alat statistik yang terdiri sebagai berikut :

1. Statistik deskriptif; untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian ini (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, lama bekerja, unit kerja) dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian . penelitian menggunakan tabel distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan angka rata-rata dan standar deviasi .
2. Uji kualitas data; menurut hair et al., (1998) kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dapat di evaluasi melalui uji reabilitas dan validitas. Pengujian tersebut masing-masing adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Dalam rangka mengukur kualitas data terdiri dari 3 (tiga) prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:
Asumsi klasik; terdapat empat bentuk dalam pengujian asumsi klasik, dalam penggunaan

model regresi. asumsi tersebut terdiri dari pengujian multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan keempat bentuk pengujian dari sumsi klasik dalam proses pengolahan data penelitian.

Analisis Data

Metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Penerbitan SP2D
- X1 = Prosedur
- X2 = Pegawai
- X3 = Sistem Jaringan
- b₁,b₂,b₃ = Konstanta dan koefisien regresi
- E = error

Hasil Analisis dan Pembahasan

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini maka, hasil analisis data yang dilakukan berdasarkan statistik deskriptif dan regresi berganda adalah sebagai berikut:

Analisis Statistik Deskriptif

Untuk menguji hipotesis penelitian maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis data melalui tehnik analisa statistik regresi berganda. Karena model analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini, maka sebelum model tersebut digunakan untuk menguji hipotesis perlu dilakukan pengujian beberapa asumsi-asumsi yang mendasarinya.

Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara varibel independent. Menurut (Ghozali, 2005:93), deteksi adanya multiko dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai *tolerance* dari variabel independen. Ketentuan, jika nilai *tolerance* dari variabel independen kurang dari 0,10 atau 10 % maka terdapat multikolonieritas, jika terjadi sebaliknya maka tidak tidak ada multikolonieritas.

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23.252	56.466		3.947	.000		
Prosedur	.054	.099	.058	.301	.765	.731	1.368
Staf Pengelola	.044	.156	.035	.825	.414	.891	1.098
Jaringan	-.026	.141	-.023	-.126	.836	.911	1.298

a. Dependent Variable : Penerbitan SP2D

Hasil perhitungan di atas, menunjukkan tidak ada varibel independent yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar veriabel independent yang nilainya lebih dari 95%. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dimana semua

variabel bebas (independen) yang ditetapkan dalam penelitian ini yang memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) antara 1.098 – 1.368. Artinya penggunaan indikator dari variabel yang ditetapkan tidak ada yang sama atau tidak ada multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mengetahui adanya korelasi yang kuat antar variabel independen dengan variabel dependen, maka uji multikolinearitas dilakukan dengan cara mendiagnosa perubahan pada

koefisien regresi berganda (multiple R), koefisien determinasi (R^2), dan standard error melalui analisis regresi. Matriks interkorelasi variabel-variabel penelitian pada tingkat signifikansi alpha (α) = 5% (lampiran 5), ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Matriks Interkorelasi Variabel

		Correlations			
		Y	X1	X2	X3
Pearson	Y	1,000	-.102	-.076	.118
Correlation	X1	.076	1,000	.472	.153
	X2	.047	.472	1,000	.244
	X3	-.036	.153	.040	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.256	.312	.223
	X1	.312	.	.001	.078
	X2	.223	.125	.	.392
	X3	.380	.001	.078	.055
	N	44	44	44	44

Sumber: Hasil analisis statistic

Jika masuknya satu variabel independen tidak menyebabkan turunnya koefisien korelasi dan koefisien determinasi, dan naiknya standard error, berarti variabel independen yang masuk dalam persamaan regresi tidak menyimpang dari asumsi multikolinearitas.

faktor-Faktor Keterlambatan SPM yang terdiri dari Prosedur (X_1), Pegawai (X_2), Sistem Jaringan (X_3) dalam mempengaruhi Penerbitan SP2D (Y). Berikut ini, disajikan statistik deskriptif untuk semua variabel dengan jumlah N serta hasil regresi berganda sebagai berikut:

Analisis hasil regresi akan melengkapi hasil-hasil pembahasan sebelumnya dengan mengkaji pengaruh

Tabel 4.3. Rekapitulasi Hasil Penelitian

Konstanta (b0)	23.252
Multiple R	.172
R Square (R^2)	.031
Adjusted R Square	.084
F Hitung	.238

Sumber : Analisis Data

Sebagaimana angka-angka pada tabel 4.4 dan 4.5, maka dapat disusun persamaan penelitian ini sesuai regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 23.252 + 054 X_1 + 026 X_2 + 0,44 X_3$$

Persamaan ini menggambarkan bahwa apabila salah satu variabel independen (X) berubah sebesar 1 unit, sedangkan variabel X lainnya konstan, maka maksimum perubahan Y adalah sebesar nilai koefisien regresi (b_i) dari X tersebut.

Dengan menduga bahwa Penerbitan SP2D (Y).dalam pengelolaan keuangan di Biro Setda Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagai instansi yang memiliki tugas pengelolaan Keuangan Daerah baik dalam Prosedur (X_1), Staf Pengelola (X_2), Sistem Jaringan (X_3) mempengaruhi Penerbitan SP2D (Y) Hasil analisis regresi berganda dengan cara memecahkan variabel bebas X_1, X_2, X_3 . menunjukkan pengaruhnya terhadap Penerbitan SP2D (Y) sebagaimana dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10. Hasil Analisis Regresi

Variabel Penelitian	Regresi (enter method)			
	Koef. Regresi (B)	SE	t_{hitung}	Sig. T (p)
Konstanta	23.252	6,466	3,497	0,000
X_1	0,044	0,148	0,541	0,765
X_2	0,129	0,156	0,301	0,414
X_3	0,026	0,127	0,208	0,836
F ratio			0,118	0,923
Multiple R			0,182	
R Square (R^2)			0,33	
Adj. R Square			-0,94	

Sumber: Hasil analisis statistik

Hasil analisis regresi metode enter menunjukkan bahwa koefisien regresi berganda (multiple R) yang diperoleh sebesar 0,182 atau 18,20%, dan F ratio sebesar 0,118 pada tingkat signifikansi $p < 0,05$, menunjukkan bahwa Faktor-faktor pada tahap

Prosedur (X_1), Staf Pengelola (X_2), dan peralatan (X_3), secara simultan berpengaruh terhadap keterlambatan Penerbitan SPM. (Y) dalam lingkungan SETDA Pemerintah Daerah Provinsi Papua khususnya Biro Keuangan. Selanjutnya

koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,33 atau 33 % menunjukkan bahwa variabel dependen (Y; dijelaskan oleh variabel independen faktor-faktor yang mempengaruhi SP2D pada tahap Prosedur (X_1), Staf pengelola (X_2), peralatan (X_3), sebesar 33,00 % sedangkan yang tidak dijelaskan sebesar 67,00 % (1-33,00%). Penyesuaian terhadap koefisien determinasi (adjusted R Square) yang diperoleh sebesar 0,94 atau 94,00 %, menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang belum dimasukkan dalam model penelitian setelah disesuaikan menjadi 0,06%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan masalah pokok dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya SIMDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) (ini sangat membantu pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan lebih cepat karena dengan penyelesaian pekerjaan secara manual biasanya sampai 3-7 hari, namun dengan adanya system ini pekerjaan dapat diselesaikan selama 1 hari bahkan dalam waktu jam 1-3 jam penerbitan Surat perintah Pencairan Dana dapat diselesaikan asalkan jaringan koneksi tidak terganggu.
2. SIMDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dapat menghindari penyimpangan, penyelewengan, karena dengan sistem yang telah terprogram menyebabkan data yang di input harus lebih jelas dan akurat sebab jika pengiputan data tidak akurat maka akan terjadi penolakan dari system.
3. SIMDA (Sistem Informasi Keuangan Daerah) adalah salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan kinerja keuangan sektor publik agar Akuntabel dan Transparans.

SARAN

Saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi kepentingan operasional guna mengevaluasi penerapan sistem SIMDA untuk mewujudkan kinerja keuangan berbasis kinerja dalam penerbitan SP2D adalah:

- a. Peningkatan ketrampilan staf pengelolaan dalam pengoperasian sistem guna mendukung pelaksanaan pekerjaan yang lebih cepat, efektif, efisien perlu terus di tingkatkan.
- b. Sistem Jaringan untuk wilayah Papua yang tidak bisa diprediksi maka perlu diantisipasi dengan model dan jaringan non telkomsel.

Daftar Pustaka

- Abdul H. 2001, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah)*". Salemba Empat. Jakarta.
- _____. Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah, UPP AMP YPKN: Yogyakarta
- Devas, N. 1989. *Finansial Local Government in Indonesia*. Center for Internasional Studies Ohio University, Ohio.
- Prasetya Edy Gede, 2004. *Penyusunan Dana Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.;
- Rahardjo Adisasmita, 2006, *Manajemen Keuangan Daerah*, fakultas Ekonomi UNHAS Makassar
- Arsyad Nurdjaman. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* Rajawali Press. Jakarta.
- Simamora, H. 2002. *Akuntansi, Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jilid II. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000 *Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah*

PETUNJUK BAGI PENULIS

- Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan spasi rangkap pada kertas folio, panjang tulisan 10 – 20 halaman dan diserahkan paling lambat 2 bulan sebelum penerbitan dalam bentuk ketikan pada CD/R beserta hasil cetaknya pada kertas sebanyak 2 eksemplar. Berkas naskah pada computer diketik dengan menggunakan pengolahan kata MS Word.
- Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan dan risensi buku baru.
- Semua karangan ditulis dalam bentuk essay, disertai judul subbab (heading) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul subbab. Peringkat judul subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua huruf dicetak tebal, cetak miring), letaknya pada tepi kiri halaman dan tidak dengan angka.
- Setiap karangan harus disertai (a) abstrak (50 – 70) kata, (b) kata-kata kunci, (c) identitas pengarang (tanpa gelar akademik), (d) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, dan (e) daftar rujukan. Hasil penelitian disajikan dengan sistematika sebagai berikut : (a) judul, (b) nama pengarang, (c) abstrak, (d) kata-kata kunci, (e) pendahuluan tanpa judul subbab berisi pembahasan kepustakaan dan tujuan penelitian, (f) metode, (g) pembahasan, (h) kesimpulan dan saran, dan (i) daftar rujukan.
- Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah : Skripsi, Artikel dan Makalah. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda baca dengan ejaan yang dimuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.